



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta memerlukan panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis (Renstra);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

h r

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta terdiri atas: Pendahuluan: Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, Tantangan; Prinsip Dasar dan Nilai, Visi, Misi, serta Tujuan, dan Sasaran: Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kemendikbudristek, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Sasaran Strategis-Program-Kegiatan-Unit Penanggung Jawab; Arah Kebijakan Strategi dan Kerangka Kelembagaan: Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi Kemendikbudristek, Arah Kebijakan dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta: Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis, Target Kinerja dan Kerangka Pendaan Program Strategis, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan; dan Penutup; Pentingnya Renstra, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini, maka Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2020-2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2025



MOHAMAD IRHAS EFFENDI *le*



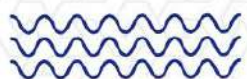
DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rencana Strategis

Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Yogyakarta

2025–2029



upnyk.ac.id



info@upnyk.ac.id

KATA PENGANTAR



Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus merupakan bentuk penyesuaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Ditjen Diktisaintek) serta mendukung pencapaian program prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Renstra UPN "Veteran" Yogyakarta 2025–2029 disusun sebagai arah transformasi institusi dari *Kampus Merdeka* menuju *Kampus Berdampak* dengan menekankan peran nyata perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan unggul, inovasi riset dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi langsung pada penyelesaian masalah bangsa. Dalam kerangka tersebut, institusi memperkuat peran strategisnya sebagai pelopor perubahan sosial melalui implementasi nilai-nilai bela negara dan kolaborasi lintas sektor. Renstra ini juga dirancang selaras dengan **Asta Cita** Presiden RI, khususnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul, transformasi digital, pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang bersih menjadikan institusi sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdampak luas. Renstra ini menjadi arah strategis UPN "Veteran" Yogyakarta dalam mewujudkan kontribusi nyata ketercapaian program prioritas Kemdiktisaintek sebagaimana tertuang dalam misi UPN "Veteran" Yogyakarta.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dilandasi oleh analisis menyeluruh terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, maupun mitra strategis universitas. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta dalam merancang rencana kerja tahunan, mengembangkan kebijakan kelembagaan, serta mengimplementasikan fungsi

manajemen secara terpadu. Lebih dari itu, Renstra ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas melalui penetapan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan tinggi nasional dan perkembangan global. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja yang memastikan setiap langkah pembangunan universitas dapat terukur, terarah, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Kami terus memberikan ruang untuk masukan konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Renstra bagi kemajuan dan daya saing UPN "Veteran" Yogyakarta. Dengan adanya dukungan, kolaborasi, dan sinergi yang berkesinambungan, renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pengambilan kebijakan, pengembangan program, serta pencapaian kinerja institusi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global berlandaskan nilai-nilai Bela Negara.

Akhirnya, kami percaya bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini bukan hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaannya, tetapi terutama oleh semangat kebersamaan, integritas dan tanggung jawab moral seluruh unsur universitas dalam mewujudkan cita-cita besar UPN "Veteran" Yogyakarta.

Yogyakarta, Juni 2025



Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si
NIP. 196212191988031001.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Renstra UPN "Veteran" Yogyakarta periode 2025-2029 merupakan periode Renstra **tahap ketiga dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)** UPN "Veteran" Yogyakarta 2015-2039. **Dasar utama penyusunan** Renstra periode 2025-2029 adalah

1. Arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional.
2. Kondisi yang diharapkan pada periode ketiga Rencana Strategis periode 2025-2029
3. Hasil evaluasi Rencana Strategis UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2020-2024.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka **arah kebijakan dan strategi** UPN "Veteran" Yogyakarta pada periode 2025-2029 difokuskan

“**Mendukung penguatan tata kelola UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dalam rangka menuju status kelembagaan PTN-BH dan menguatkan landasan *World Class University* melalui peningkatan kualitas kinerja layanan dan keuangan untuk menghasilkan *International* atau *Global Competitiveness* dengan dilandasi nilai bela negara**”

Pada tahap ini **dipersiapkan sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia**. Salah satu kriterianya adalah sejumlah pengakuan dalam lingkup internasional, baik itu penelitian, kualitas SDM, laboratorium, proses belajar mengajar, termasuk juga dari sisi kapasitas teknologi informasi dan popularitas websitenya.

Langkah menuju pengakuan adalah fokus pada **instrumen pengakuan** dan **keterlibatan kolaborasi internasional**. Pada tahun 2029 diharapkan UPN "Veteran" Yogyakarta dapat mewujudkan **empat indikator kinerja utama** yaitu:

1. Lulusan berdaya saing global dilandasi bela negara
2. Luaran riset & pengabdian yang mendapatkan rekognisi internasional & berdampak
3. Program studi terakreditasi unggul & internasional, terakreditasi secara institusi,
4. Status kelembagaan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai PTN-BH.

Secara umum, dokumen renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Target Kinerja, Program dan Kegiatan, Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Selain hal tersebut, dalam dokumen renstra ini juga dideskripsikan tentang rencana pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas dan manajemen resiko.

VISI

Menjadi Universitas Pionir Pembangunan yang dilandasi jiwa Bela Negara di era global

MISI

- 1** Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa Bela Negara melalui pembelajaran berkualitas dan pengembangan konsepsi ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan kemanusiaan
- 2** Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kerjasama dan program terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan
- 3** Mengembangkan tata kelola universitas melalui manajemen mandiri, modern dan berkelanjutan dalam bidang SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

TUJUAN

1. Pengembangan pembelajaran berkualitas dan kampus berdampak, serta mengembangkan konsepsi ilmu pengetahuan teknologi sains dan kemanusiaan dalam menghasilkan lulusan berdaya saing global dan berjiwa bela negara
2. Pengembangan kualitas dosen, kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan dan kerjasama dalam meningkatkan akreditasi program studi
3. Peningkatan kualitas dosen dan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Perwujudan tata Kelola BLU yang reformatif, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good University Governance*

SASARAN

S.1.
Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan
tinggi

S.2.
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan
tinggi

S.3.
Meningkatnya
kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

S.4.
Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja di
Ditjendikti

INDIKATOR SASARAN

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Indikator Kinerja
Tambah (IKT)

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lulusan | | | | | | | | |
| 1 | IKU-1.1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dalam waktu 6 bulan setelah wisuda. | % | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 80 |
| 2 | IKU-1.2. Persentase (%) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. | % | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| 3 | IKT-1.1. Jumlah prodi baru pada program S1, S2 dan S3, serta program profesi yang dibuka | Jumlah | 0 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 4 | IKT-1.2. Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | Indeks | 3.5 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 3.58 | 3.6 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen | | | | | | | | |
| 1 | IKU-2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | % | 32.35 | 32.35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 2 | IKU-2.2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | % | 31.15 | 31.15 | 35 | 37 | 40 | 45 |
| 3 | IKU-2.3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen | Indeks | 1.93 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 4 | IKT-2.1. Persentase kualifikasi pendidikan S3 dan jabatan fungsional dosen | % S3 | 35 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| | | % GB | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | | % LK | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | | |
| 1 | IKU-3.1. Indeks program studi S1 dan D4/D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | Indeks | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 2 | IKU-3.2. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | % | 59.81 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 3 | IKU-3.3. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 4 | IKT-3.1. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | IKT-3.2. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang akreditasi Unggul | % | 21 | 45 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Kelembagaan | | | | | | | | |
| 1 | IKU-4.1. Predikat SAKIP | Nilai | A (81,1) | A (83) | A (85) | A (87) | A (89) | AA (91) |
| 2 | IKU-4.2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | Nilai | 79 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 3 | IKU-4.3. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | % | 50 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| 4 | IKT 4.1. Status opini laporan keuangan oleh akuntan publik | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | IKT 4.2. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (EBITDA) | Rasio | 3 | 3 | 3,1 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
| 6 | IKT 4.3. Jumlah pendapatan operasional | Jumlah | 197 M | 210 M | 212 M | 215 M | 218 M | 220 M |
| 7 | IKT 4.4. Jumlah pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset | Jumlah | 5,5 M | 5,7 M | 6 M | 7 M | 8 M | 9 M |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | IKT 4.5. Jumlah pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama | Jumlah | 2,6 M | 10 M | 10,5 M | 11 M | 11,5 M | 12 M |
| 9 | IKT 4.6. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU | % | 84 | 84 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 10 | IKT 4.7. Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU | Indeks | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 11 | IKT 4.8. Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | Indeks | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 12 | IKT 4.9. Nilai <i>self maturity rating</i> | Nilai | 2.25 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| 13 | IKT 4.10. Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Kualifikasi | Belum Informatif | Menuju Informatif (85) | Informatif (90) | Informatif (92) | Informatif (94) | Informatif (95) |
| 14 | IKT 4.11. Indeks kepuasan pemangku kepentingan | Indeks | 78.93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 15 | IKT 4.12. Capaian standar pelayanan minimum setiap unit sesuai tugas fungsinya | % | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 16 | IKT 4.13. Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | IKT 4.14. Persentase integrasi sistem informasi dan komunikasi antar bidang akademik dan non akademik | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | IKT 4.15. Ranking <i>webometric</i> | Ranking Nasional | 92 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 19 | IKT 4.16. Persentase ketercapaian target peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 20 | IKT 4.17. Terwujudnya status kelembagaan PT sebagai PTNBH | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 21 | IKT 4.18. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | % | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 22 | IKT 4.19. Indeks sikap dan perilaku bela negara pegawai | Indeks | 3.55 | 3.57 | 3.59 | 3.61 | 3.63 | 3.64 |
| 23 | IKT 4.20. Status akreditasi institusi | Akreditasi | B | B | Akreditasi | Akreditasi | Akreditasi | Akreditasi |

Program Prioritas

| | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Peningkatan Kualitas Lulusan yang berdaya saing global dan dilandasi bela negara | 16 | Peningkatan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan di masyarakat |
| 2 | Pengembangan Proses Pembelajaran di Luar Program Studi | 17 | Peningkatan predikat SAKIP |
| 3 | Peningkatan Jumlah Mahasiswa Asing di UPNVY | 18 | Peningkatan tata kelola perencanaan dan keuangan |
| 4 | Peningkatan Prestasi Mahasiswa | 19 | Peningkatan fakultas yang membangun zona integritas |
| 5 | Pengembangan Program Studi Baru untuk program S1, S2, S3, dan profesi | 20 | Peningkatan kinerja anggaran dalam pelaksanaan RKA/KL |
| 6 | Peningkatan Sikap dan Perilaku Bela Negara Mahasiswa | 21 | Peningkatan kepuasan pemangku kepentingan |
| 7 | Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri | 22 | Pengembangan tata kelola dan dokumen informasi publik |
| 8 | Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis kasus/proyek/bela negara | 23 | Peningkatan kinerja keuangan berdasarkan indikator kinerja dari kementerian keuangan |

| Program Prioritas | | | | | |
|-------------------|---|--|----|--|--|
| 9 | Peningkatan akreditasi internasional prodi | | 24 | Pengembangan sistem informasi terintegrasi | |
| 10 | Peningkatan akreditasi unggul prodi | | 25 | Peningkatan akreditasi institusi | |
| 11 | Pengembangan kuantitas dan kualitas dosen dalam berkegiatan tridharma di luar kampus | | 26 | Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran memadai | |
| 12 | Pengembangan kompetensi dosen internal dan peningkatan dosen luar yang berasal dari praktisi/dosen dari luar negeri | | 27 | Pengembangan status kelembagaan menuju PTNBH | |
| 13 | Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan jabatan fungsional dosen | | 28 | Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan | |
| 14 | Peningkatan kualitas luaran penelitian yang bereputasi internasional | | 29 | Peningkatan sikap dan perilaku bela negara pegawai | |
| 15 | Pembangunan budaya kerja berbasis nilai CREATIVE | | 30 | Peningkatan pelaksanaan standar pelayanan minimum | |

Secara umum kerangka pendanaan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan tersebut bersumber pada Rupiah Murni dan Pendapatan BLU (bersumber dari mahasiswa dan Non mahasiswa). Proyeksi pendapatan dan belanja 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut:

| NO | KODE AKUN | NAMA AKUN | TAHUN | | | | |
|------------------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 424112 | Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 180.281.793.000 | 191.039.140.000 | 200.591.097.000 | 210.620.652.000 | 221.151.684.000 |
| 2 | 424119 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 527.500.000 | - | - | - | - |
| 3 | 424312 | Pendapatan Hasil Kerja sama Lembaga/ Badan Usaha | 3.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.625.000.000 | 2.756.250.000 | 2.894.063.000 |
| 4 | 424911 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU | 4.950.000.000 | 3.600.000.000 | 2.700.000.000 | 2.565.000.000 | 2.693.250.000 |
| 5 | 424919 | Pendapatan Lain-Lain BLU | - | 873.672.000 | 1.310.508.000 | 1.376.033.000 | 1.444.835.000 |
| 6 | 424921 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah | 438.800.000 | 650.100.000 | 695.607.000 | 730.387.000 | 766.907.000 |
| 7 | 424922 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | 747.907.000 | 1.219.858.000 | 1.280.851.000 | 1.344.893.000 | 1.412.138.000 |
| 8 | 424923 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan | 51.000.000 | 45.500.000 | 47.775.000 | 50.164.000 | 52.672.000 |
| 9 | 424924 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | 3.000.000 | 96.730.000 | 101.567.000 | 106.645.000 | 111.977.000 |
| JUMLAH TPNBP BLU | | | 190.500.000.000 | 200.025.000.000 | 209.352.405.000 | 219.550.024.000 | 230.527.526.000 |
| Asumsi Pendapatan RM | | | 209.710.671.000 | 211.807.778.000 | 211.807.778.000 | 222.398.166.400 | 166.171.714.000 |
| Asumsi Penggunaan Saldo Awal | | | 146.000.000.000 | 68.400.387.000 | 40.000.000.000 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | 546.210.671.000 | 480.233.165.000 | 461.160.183.000 | 461.948.190.400 | 411.699.240.000 |

| SASARAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 377.969.517.322 | 525.255.671.000 | 480.233.165.000 | 384.144.474.000 | 375.853.796.000 | 388.646.487.000 |
| Sasaran 1: Meningkatkan kualitas lulusan | 47.601.351.100 | 66.129.689.000 | 60.461.355.000 | 48.363.789.000 | 47.319.993.000 | 48.930.593.000 |
| Sasaran 2: Meningkatkan kualitas dosen | 37.684.874.282 | 52.367.990.000 | 47.879.247.000 | 38.299.204.000 | 37.472.623.000 | 38.748.055.000 |
| Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran | 74.747.797.197 | 103.895.572.000 | 94.990.120.000 | 75.983.777.000 | 74.343.881.000 | 76.874.275.000 |
| Sasaran 4: Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan organisasi | 217.935.494.743 | 302.862.420.000 | 276.902.443.000 | 221.497.704.000 | 216.717.299.000 | 224.093.564.000 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | xi |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Kondisi Umum..... | 1 |
| A. Gambaran Umum (Capaian Renstra 2020-2024) | 1 |
| B. Isu-Isu Strategis | 4 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan..... | 10 |
| A. Permasalahan..... | 10 |
| B. Analisis Masalah | 12 |
| C. Potensi..... | 16 |
| D. Pohon Kinerja..... | 20 |
| BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 21 |
| 2.1. Visi UPN “Veteran” Yogyakarta | 21 |
| 2.2. Misi UPN “Veteran” Yogyakarta..... | 22 |
| 2.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan..... | 22 |
| 2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran | 24 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... | 26 |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi..... | 26 |
| 3.2. Kerangka Regulasi..... | 44 |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan..... | 44 |
| A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPN “Veteran” Yogyakarta | 44 |
| B. Hubungan Kinerja, Strategi, Kebijakan dan Peran Unit Lintas Fungsi (<i>Crosscutting</i>) | 47 |
| 3.4. Reformasi Birokrasi | 50 |
| A. Rasionalitas | 50 |
| B. Kondisi Saat Ini | 52 |
| C. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi..... | 53 |
| 3.5. Manajemen Risiko..... | 55 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 53 |
| 4.1. Target Kinerja..... | 53 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan..... | 55 |
| BAB V PENUTUP | 57 |
| LAMPIRAN..... | 59 |
| Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan | 59 |
| Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data..... | 70 |
| Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan..... | 80 |
| Lampiran 4. Pohon Kinerja | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Tren Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UPN Veteran Yogyakarta Tahun 2020 - 2024..... | 1 |
| Gambar 2. Strategi Bidang Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan | 16 |
| Gambar 3. Strategi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 17 |
| Gambar 4. Strategi Bidang Pengembangan Bela Negara | 18 |
| Gambar 5. Strategi Bidang Organisasi , Kelembagaan dan Tata Kelola | 19 |
| Gambar 6. Pohon Kinerja UPN “Veteran” Yogyakarta..... | 20 |
| Gambar 7. Milestone Perwujudan Visi UPN “Veteran” Yogyakarta | 29 |
| Gambar 8. Peta Jalan Capaian Renstra 2025-2029 | 31 |
| Gambar 9. Rumusan Strategi 2025-2029 | 43 |
| Gambar 10. Organ UPN “Veteran” Yogyakarta..... | 45 |
| Gambar 11. Hubungan Antar Unit dalam Mendukung IKU dan IKT..... | 48 |
| Gambar 12. Area Perubahan Reformasi Birokrasi | 51 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Analisis SWOT Bidang Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan..... | 14 |
| Tabel 2. Analisis SWOT Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 14 |
| Tabel 3. Analisis SWOT Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Tata Kelola | 15 |
| Tabel 4. Analisis SWOT Bidang Pengembangan Bela Negara | 15 |
| Tabel 5. Indikator Tujuan dan Target Keberhasilan 2029 | 23 |
| Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran..... | 24 |
| Tabel 7. Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2025-2029 | 32 |
| Tabel 8. Program-Kegiatan Kerjasama Pendukung IKU Tahun 2025-2029..... | 40 |
| Tabel 9. Unit Terkait dengan Indikator Kinerja Utama | 49 |
| Tabel 10. Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi | 53 |
| Tabel 11. Pembangunan ZI/WBK/WBBM | 53 |
| Tabel 12. Prioritas Penguatan Instrumen Reformasi Birokrasi (RB) | 54 |
| Tabel 13. Desain Manajemen Risiko | 57 |
| Tabel 14. Target Kinerja 2025-2029..... | 53 |
| Tabel 15. Proyeksi Pendapatan | 55 |
| Tabel 16. Kerangka Pendanaan | 56 |



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penyusunan Renstra 2025–2029, serta gambaran umum mengenai kondisi capaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020–2024. Di dalamnya juga disajikan uraian program-program strategis yang telah dijalankan selama periode sebelumnya sebagai dasar evaluatif untuk penyusunan arah kebijakan ke depan. Selain itu, Bab I memuat hasil analisis SWOT yang menggambarkan posisi strategis universitas saat ini, baik dari aspek internal maupun eksternal. Berdasarkan analisis tersebut, disusun arah strategis dan dasar perumusan kebijakan yang akan menjadi pijakan pencapaian target dan prioritas program UPN “Veteran” Yogyakarta untuk periode 2025–2029.

1.1.

Kondisi Umum

1.2.

Potensi dan Permasalahan

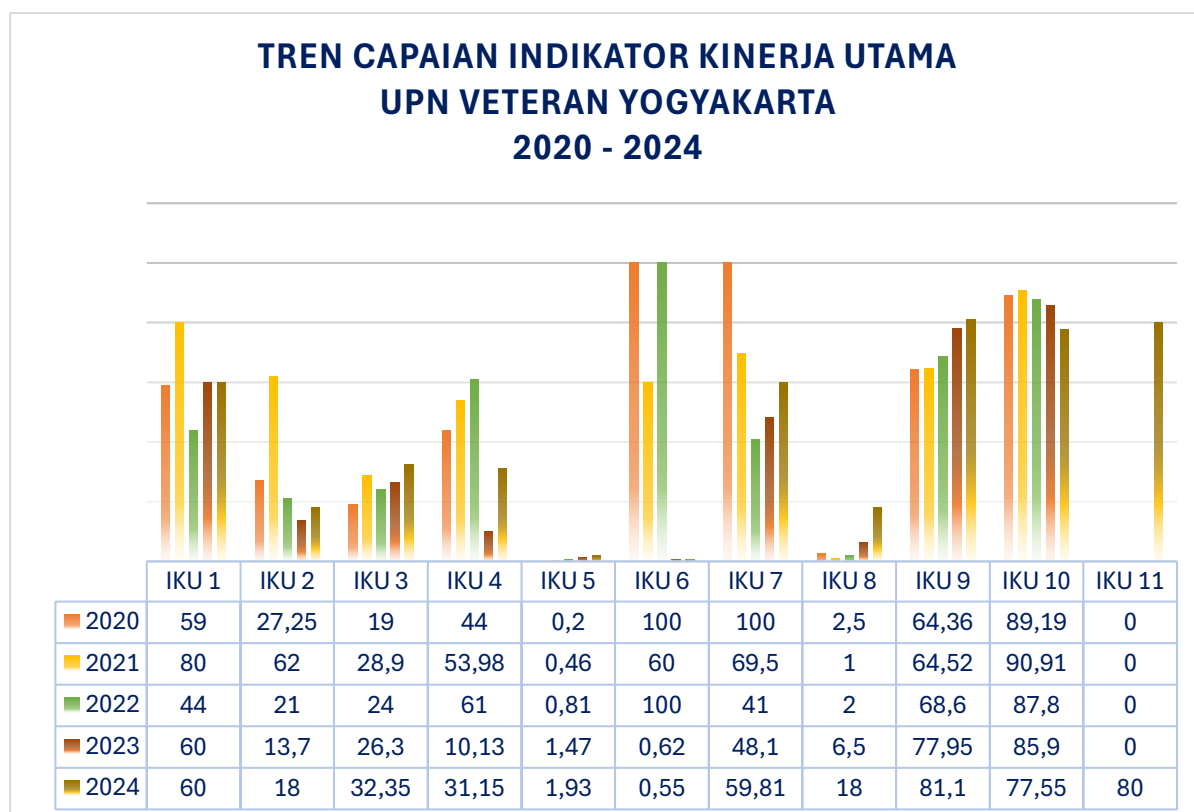
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

A. Gambaran Umum (Capaian Renstra 2020-2024)

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) UPN Veteran Yogyakarta tahun 2025–2029, penting untuk memahami terlebih dahulu kondisi awal perguruan tinggi secara menyeluruh. Gambaran kondisi tersebut tercermin dalam data dasar (*baseline*) tahun 2024, yang menjadi pijakan awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan institusi ke depan. Data *baseline* ini disusun berdasarkan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Capaian kinerja UPN Veteran Yogyakarta hingga bulan Desember 2024 menjadi referensi utama dalam menilai posisi awal institusi dan menjadi dasar dalam merancang program strategis guna mewujudkan visi dan misi universitas di masa mendatang.



Sumber: Data diolah (2025)

Gambar 1.

Tren Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UPN Veteran Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Pada periode tahun 2022 hingga 2024, UPN Veteran Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana universitas mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, relevansi lulusan, serta integrasi dengan dunia industri dan masyarakat. Evaluasi terhadap sebelas IKU menunjukkan adanya perkembangan positif di sejumlah indikator, meskipun terdapat beberapa tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti dalam siklus perencanaan dan implementasi program berikutnya karena terdapat berbagai dinamika dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kinerja institusi pendidikan tinggi.

IKU 1 mencerminkan keberhasilan lulusan dalam memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausahawan. Setelah menurun tajam pada 2022 (44), capaian meningkat menjadi 60 pada tahun 2023 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam keterserapan lulusan di dunia kerja yang layak, yang bisa mencerminkan peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Walaupun begitu, stabilitas ini mencerminkan perlunya peningkatan sistem kinerja *tracer study* dalam mendokumentasikan data lulusan. Sementara itu, **IKU 2**, yang mengukur partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran di luar kampus, menunjukkan tren fluktuatif. Setelah turun dari 21 (2022) ke 13,7 (2023), capaian meningkat kembali menjadi 18 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) meskipun belum optimal. Fluktuasi ini dapat menjadi sinyal perlunya penguatan kerja sama dengan mitra eksternal untuk mendukung kegiatan magang, pertukaran pelajar, proyek sosial ataupun program lainnya.

Capaian **IKU 3**, yaitu dosen yang melakukan kegiatan tridharma di luar kampus seperti menjadi praktisi atau pembimbing mahasiswa, juga menunjukkan tren positif: dari 24 (2022), meningkat ke 26,3 (2023), dan mencapai 32,35 pada 2024. Indikator ini mencerminkan peningkatan kolaborasi dosen dengan dunia usaha dan industri yang mendukung dalam penciptaan proses pembelajaran dengan praktik nyata.

Namun demikian, **IKU 4**, yang berkaitan dengan jumlah dosen bersertifikat kompetensi atau berasal dari kalangan praktisi, mengalami penurunan dari 61 (2022) menjadi 10,13 (2023), sebelum meningkat kembali menjadi 31,15 pada tahun 2024. Sama halnya dengan IKU 3, perubahan tren capaian ini terjadi karena adanya indikator operasional yang berubah. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan literasi dosen terhadap sertifikasi profesional serta pencatatan yang lebih baik. Untuk **IKU 5**, yang mengukur output riset dan pengabdian yang mendapat pengakuan dan diterapkan di masyarakat, menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan. Ini merupakan hasil dari strategi peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan, insentif, akses hibah, serta kolaborasi dengan mitra eksternal. Sistem penghargaan turut mendorong budaya akademik yang kompetitif dan produktif, sementara dukungan sistem informasi meski belum optimal, telah berkontribusi dalam dokumentasi capaian. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi dalam

program eksternal, dominasi hibah internal, serta hambatan dalam pelaporan dan validasi luaran.

Capaian **IKU 6** yang mengukur keterlibatan program studi dalam kerja sama dengan mitra mengalami penurunan drastis dari 100 (2022) menjadi 0,62 (2023), dan turun lagi menjadi 0,55 pada tahun 2024. Perubahan tren ini tidak serta merta karena ketidaktercapaian target, namun pada tahun 2023 adanya perubahan tata cara perhitungan atas IKU 3. Sehingga, meskipun angka capaian terlampau kecil, namun sudah memenuhi target universitas. Selain itu, hal ini mengindikasikan perlunya revitalisasi kemitraan dan pendokumentasian kerja sama secara sistematis. Pemilihan mitra kerja sama tertentu memiliki bobot yang berbeda – beda dari indikator penilaian yang dipersyaratkan kementerian sehingga perlu adanya pemetaan mitra untuk mendukung ketercapaian kinerja dan mendukung kolaborasi program studi. Penguatan jaringan internasional dan kemitraan strategis akan mendorong capaian program studi dalam melibatkan mahasiswa, dosen, kurikulum dan lainnya. Di sisi lain, **IKU 7** menunjukkan peningkatan yang cukup menjanjikan. Persentase program studi yang menerapkan metode pembelajaran berbasis kasus atau proyek meningkat dari 41 (2022) menjadi 48,1 (2023), dan mencapai 59,81 pada 2024, mengindikasikan penguatan kualitas proses pembelajaran berbasis *student-centered learning*.

IKU 8 mencerminkan jumlah program studi yang telah memperoleh akreditasi internasional. Dari capaian 2 pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 6,5 (2023), dan melonjak menjadi 18 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen universitas dalam mendorong program studi menuju standar global dan benchmarking mutu. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, UPNVY mencatat kemajuan signifikan dari sisi jumlah kegiatan, jenis mitra, dan dampak sosial melalui berbagai program strategis, termasuk KKN Tematik dan KKN Bela Negara. Kendati demikian, hilirisasi hasil pengabdian serta dokumentasi dampak sosial masih perlu diperkuat. Kurangnya indikator evaluasi berbasis kualitas dan keberlanjutan menyebabkan capaian seringkali hanya tercatat secara kuantitatif tanpa mencerminkan dampak riil terhadap masyarakat.

Dalam hal tata kelola, **IKU 9** yang mencerminkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menunjukkan perbaikan dari predikat BB pada 2023 menjadi A pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikator penguatan sistem manajemen kinerja institusi. Sebaliknya, **IKU 10**, yakni nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, mengalami penurunan dari 87,8 (2022) menjadi 85,9 (2023), dan kembali menurun menjadi 77,55 pada tahun 2024. Penurunan ini perlu dicermati untuk perbaikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu, **IKU 11** yang baru terukur pada tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 80 persen untuk persentase fakultas yang membangun Zona Integritas, menandai langkah awal yang baik dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan melayani.

PROGRAM DAN TANTANGAN PELAKSANAAN CAPAIAN SEBELUMNYA

PENDIDIKAN

Tantangan utama yang dihadapi mencakup rendahnya respons alumni terhadap tracer study, belum optimalnya penyesuaian kurikulum untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan lemahnya sinergi lintas program studi dan kemitraan eksternal. Keterbatasan integrasi sistem informasi akademik (seperti NAKULA dan SISTER), inkonsistensi pelaporan oleh program studi, serta belum optimal pemahaman dosen terhadap metode pembelajaran berbasis *case* atau *project* semakin memperumit upaya pencapaian IKU. Dalam merespons hal ini, diperlukan penguatan koordinasi internal, pelatihan dosen, serta percepatan digitalisasi akademik secara terintegrasi.

PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Kemajuan telah terlihat dari meningkatnya luaran dan pengakuan eksternal. Namun demikian, pelaksanaan perencanaan masih belum konsisten, terutama terkait kolaborasi lintas unit kerja dan integrasi sistem informasi. Sistem pendanaan pun masih cenderung berbasis *historical budgeting*, bukan *performance-based*. Perlu penguatan program hilirisasi hasil riset. Sebagai respons, UPN Veteran Yogyakarta telah merancang sejumlah intervensi strategis seperti penguatan pusat studi lintas disiplin, kemitraan strategis dengan industri dan pemerintah, skema insentif berbasis kinerja, serta transformasi digital sistem. Rekomendasi ke depan mencakup integrasi penguatan hilirisasi, sistem informasi, reformulasi skema pendanaan, peningkatan kapasitas SDM dan diseminasi praktik baik melalui platform terstandar.

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Intervensi di bidang organisasi dan tata kelola melalui penyesuaian renstra agar selaras dengan kebijakan Kementerian dan Unit Eselon I, penyusunan rencana kinerja berbasis SMART, serta penguatan evaluasi internal untuk mendorong akuntabilitas berkelanjutan. Dalam pengelolaan anggaran, integrasi antara Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dioptimalkan agar kinerja anggaran mencerminkan capaian riil. Di tingkat fakultas, pembangunan Zona Integritas diarahkan pada penguatan komitmen pimpinan, transparansi layanan, sistem pengawasan internal, dan pelibatan sivitas akademika, disertai penerapan *whistleblowing system* dan audit rutin sebagai upaya mitigatif.

BELA NEGARA

Difokuskan pada internalisasi nilai-nilai dasar kebangsaan ke dalam aktivitas akademik dan non-akademik. Melalui tiga tahap strategi ini, UPN Veteran Yogyakarta menanamkan karakter bela negara secara sistematis - peningkatan kesadaran, penyusunan kebijakan, dan penguatan implementasi dalam tridharma. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil turut memperkuat peran kampus sebagai benteng ideologi kebangsaan. Program seperti KKN Bela Negara menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi institusi dalam membangun ketahanan nasional melalui pendidikan tinggi.

B. Isu-Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, UPN "Veteran" Yogyakarta menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu diidentifikasi secara tepat untuk merumuskan strategi intervensi yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Beberapa isu utama meliputi peningkatan relevansi dan mutu lulusan melalui penguatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi dan nilai Bela Negara, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi, serta penguatan tata kelola organisasi yang adaptif, transparan dan berbasis data dalam menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan akuntabilitas publik. Berikut adalah isu-isu strategis yang

berhasil dihimpun dari evaluasi dokumen Rencana Strategis dan Laporan Kinerja sebelumnya dan hasil implementasi tridharma perguruan tinggi:

Bidang Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1. Jumlah lulusan yang bekerja, berwirausaha dan studi lanjut dalam lingkup internasional masih relatif rendah

Kualitas lulusan yang berdaya saing global/internasional menjadi isu strategis, bukan hanya sebagai tujuan utama lembaga pendidikan tinggi, namun juga menjadi tujuan pertama dalam renstra dan menjadi indikator penting dalam akreditasi nasional maupun internasional. Kualitas lulusan juga menjadi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan kemdiktisaintek. Berdasarkan capaian kinerja dalam bidang pendidikan, masa tunggu lulusan relatif pendek untuk bekerja atau berwirausaha atau studi lanjut. Namun demikian lulusan yang bekerja sebagian besar masih dalam lingkup nasional.

2. Kurikulum belum sepenuhnya mendukung pembelajaran MBKM dalam mendukung peningkatan capaian pembelajaran yang bersifat *hard skills* dan *soft skills*

Kurikulum dalam lembaga pendidikan tinggi merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran yang merupakan dokumen penting untuk melihat profil lulusan dan bagaimana untuk mencapainya. Keberhasilan Pembelajaran MBKM atau pembelajaran yang berdampak akan sangat ditentukan pada muatan kurikulum yang disusunnya. Terakreditasi atau tidak, baik akreditasi nasional maupun internasional juga ditentukan oleh kualitas kurikulumnya. Begitu juga dengan RPJMN 2025-2029 arah kebijakan dalam bidang pendidikan menekankan pentingnya Kurikulum yang berbasis STEAM untuk memperkuat kompetensi lulusan yang berdaya saing global. Bagi UPN "Veteran" Yogyakarta keberadaan kurikulum menjadi sangat urgen untuk selalu dievaluasi dalam rangka memastikan bahwa kurikulum telah mencerminkan nilai-nilai bela negara.

3. Pola Pembinaan dan Penjaminan Mutu mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan belum dijalankan secara konsisten dan terstruktur

Salah faktor penting dalam mendukung proses kurikuler atau pembelajaran dalam kelas, yaitu kegiatan ko dan ekstra kurikuler. Tata kelola organisasi kemahasiswaan yang baik dapat menumbuhkan kompetensi *hard skills* dan *soft skills*. Tata kelola yang baik dapat dibangun melalui pola pembinaan dan penjaminan mutu yang tepat dan berkelanjutan. Pola pembinaan dan penjaminan mutu bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dan kompetensi *hard skills* dan *soft skills* bagi pengurus organisasi kemahasiswaan serta sekaligus dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kemahasiswaan (OK). UPN "Veteran" Yogyakarta telah memiliki peraturan rektor yang mengatur Pembinaan dan Penjaminan Mutu bagi Organisasi Kemahasiswaan dalam mewujudkan kualitas OK dan mendukung kinerja institusi melalui program kemitraan dan kolaboratif.

4. Prodi unggul dan prodi terakreditasi internasional masih dibawah 50%

Status akreditasi institusi unggul ditentukan oleh seberapa banyak program studi yang terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional. Oleh karenanya upaya mewujudkan atau memperbanyak prodi yang terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional menjadi isu

strategis dan juga telah menjadi indikator kinerja utama bagi institusi. Maka program dan kegiatan untuk mencapai akreditasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas.

5. Kegiatan internasionalisasi dalam bidang tri dharma PT masih belum merata di seluruh program studi

Dalam rangka mewujudkan akreditasi unggul dan terakreditasi internasional, serta dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, maka kegiatan internasionalisasi dalam bidang tridharma menjadi sebuah isu strategis UPN "Veteran" Yogyakarta. Sebagai sebuah isu strategis maka program dan kegiatannya harus menjadi prioritas. Secara umum, ranking perguruan tinggi di Indonesia dalam level internasional, seperti dalam QS World University Rankings 2026, hanya Universitas Indonesia yang masuk ke dalam 200 besar dunia (rangking 189). 200 besar dalam QS World University Ranking menjadi salah satu kriteria untuk dijadikan mitra kerjasama perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Kepmendikbud 210/M/2023. Kegiatan internasionalisasi merupakan salah satu standar utama dalam mewujudkan akreditasi internasional dan menjadi salah satu indikator kinerja utama yang ditetapkan kemendiktisaintek. Kinerja kelembagaan secara internasional juga bisa berdampak pada peran dosen dan mahasiswa dalam mencapai kinerjanya.

6. Selama periode renstra sebelumnya, masih sedikit prodi baru yang dibentuk, baik program sarjana, magister maupun doktoral

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Indonesia pada tahun 2024 adalah 39,37 persen, di bawah rata-rata global yang 40 persen. Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia (43 persen), Thailand (49,29 persen), dan Singapura (91,09 persen) (www.kompas.id). Kendala utamanya faktor ekonomi, yakni biaya kuliah yang tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan APK PT tersebut adalah dengan meningkatkan kuantitas layanan melalui pengembangan prodi baru. Selama periode renstra 2020-2024, UPN "Veteran" Yogyakarta hampir tidak ada pembukaan prodi baru. Hal ini sebagai akibat adanya kebijakan moratorium pemerintah terhadap pembukaan prodi baru yang sudah banyak dibuka di perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya menjadi tantangan bagi UPN "Veteran" Yogyakarta untuk mengembangkan prodi baru baik program S1, S2, S3 dan Profesi, utamanya program S1, yang berbeda dengan prodi-prodi yang umum ada di Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dan dunia industri.

7. Kerjasama masih didominasi dengan mitra di dalam negeri, baik dengan lembaga pendidikan maupun lembaga non pendidikan

Berdasarkan kepmendikbud 210/M/2023, mitra kerjasama PT yang memiliki bobot besar dalam penghitungan kinerjanya adalah mitra yang berasal dari luar negeri, seperti: perusahaan multinasional; perusahaan teknologi global; organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject); dan lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional. Kerjasama UPN "Veteran" Yogyakarta masih sebagian besar dengan lembaga pendidikan dan lembaga non pendidikan yang berasal dari dalam negeri. Oleh karenanya menjadi isu strategis untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga non pendidikan dari luar negeri dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, proses pembelajaran dan kemahasiswaan, serta kualitas institusi menuju *World Class University*.

8. Monitoring tindak lanjut hasil monev pembelajaran belum sepenuhnya konsisten dan terstruktur

Proses penjaminan mutu di UPN “Veteran” Yogyakarta telah menerapkan prinsip dan siklus PPEPP. Prinsip dan siklus PPEPP yang dijalankan oleh perguruan tinggi ini untuk memastikan kualitas pendidikan berjalan secara berkesinambungan. Namun demikian yang menjadi isu strategis dalam konteks pelaksanaan PPEPP ini adalah memastikan tahapan Pengendalian dan Peningkatan Mutu dapat berjalan dengan baik. Tahapan ini memastikan bahwa hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan standar ditindaklanjuti oleh pihak atau unit terkait, dan memastikan bahwa pada periode berikutnya telah masuk dalam program dan kegiatan unit terkait.

9. Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran dan iklim akademik yang kondusif belum memadai dan terkini

Salah satu komponen penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembelajaran dan iklim akademik yang kondusif adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan terkini. Aspek yang termasuk dalam sarpras pendukung meliputi: ruang kelas beserta fasilitas pendukung di dalamnya, ketersediaan ruang dan peralatan laboratorium, dan ruang publik yang memadai, terkini dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi isu strategis, ketika UPN “Veteran” Yogyakarta telah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan kapasitas layanan mahasiswa baru, sebagai akibat dari status kelembagaan PTN PK-BLU dan menuju PTN-BH. Selain itu, masalah sarpras ini menjadi komponen yang paling banyak dikritisi atau dinilai masih kurang oleh sivitas akademika, ketika dilakukan pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan.

Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Lemahnya Orientasi Penelitian Dasar terhadap Perekonomian Berbasis Pengetahuan

Penelitian dasar di UPNVY masih didominasi pendekatan konseptual tanpa koneksi langsung dengan agenda inovasi nasional dan kebutuhan sektor strategis seperti energi, pertanian, dan industri kreatif. Tidak adanya *roadmap* riset tematik lintas fakultas menyebabkan penelitian bersifat individual dan terputus dari kebutuhan nyata. Rendahnya sinergi antara *basic research* dan *applied research* juga melemahkan posisi universitas dalam ekosistem inovasi nasional.

2. Ketimpangan Partisipasi dan Budaya Akademik dalam Penelitian dan Pengabdian

Meskipun capaian IKU menunjukkan tren positif, partisipasi dosen belum merata di seluruh fakultas. Hal ini menunjukkan belum terbentuknya budaya akademik yang kuat dan kolektif dalam menghasilkan luaran tridharma secara berkelanjutan.

3. Kesenjangan antara Luaran dan Hilirisasi

Peningkatan publikasi dan HKI belum diiringi dengan tingkat hilirisasi yang memadai. Luaran riset masih belum banyak yang dapat diterapkan di masyarakat atau diadopsi industri, sehingga potensi manfaatnya belum maksimal.

4. Lemahnya Integrasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi PPM

Sistem informasi yang digunakan seperti NAKULA, SISTER, dan Pergiwa belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan duplikasi data, inkonsistensi informasi kinerja, serta rendahnya efisiensi dalam perencanaan dan pelaporan berbasis data.

5. Minimnya Evaluasi Berbasis Dampak Sosial

Evaluasi program pengabdian masih berorientasi pada jumlah kegiatan atau mitra, bukan pada *outcome* atau dampak nyata seperti perubahan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, atau adopsi teknologi tepat guna.

6. Ketergantungan pada Hibah Internal dan APBN

Pendanaan PPM masih bergantung pada sumber internal dan kompetisi dari pemerintah. Belum ada strategi diversifikasi pendanaan dari mitra industri, kerja sama internasional, CSR, maupun unit usaha kampus.

7. Perlunya Internasionalisasi Riset dan PPM

Kolaborasi internasional dalam riset dan pengabdian masih sangat terbatas, padahal untuk mencapai daya saing global, UPNVY perlu aktif dalam jaringan riset global, konsorsium internasional, dan program berbasis SDGs.

8. Lemahnya Skema Insentif dan Rekognisi untuk PPM

Kegiatan pengabdian belum mendapatkan porsi insentif dan pengakuan akademik yang setara dengan pengajaran dan penelitian, sehingga kurang menarik terutama bagi dosen-dosen muda.

9. Belum Optimalnya Kolaborasi Lintas Disiplin

Penelitian dan pengabdian masih dilakukan dalam batasan bidang ilmu masing-masing, padahal tantangan sosial dan lingkungan saat ini membutuhkan pendekatan multidisipliner untuk menciptakan solusi komprehensif.

Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Tata Kelola

1. Pengembangan Pusat Usaha untuk Kemandirian Institusi

Aset institusi yang dimiliki UPNVY, seperti tanah, bangunan, dan investasi, belum dioptimalkan untuk mendukung *generating income*. Pemanfaatan aset secara profesional dan berbasis prinsip bisnis diperlukan untuk mendorong institusi menjadi lebih mandiri secara finansial dan berkelanjutan.

2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sistem TIK yang ada belum terintegrasi dan belum mampu memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Untuk itu, UPNVY perlu strategi transformasi digital menuju *Smart Digital University*, tidak hanya dalam bentuk perangkat teknologi, tetapi juga dalam pola pikir, budaya kerja, dan proses pengambilan kebijakan.

3. Pengembangan Organisasi dan Tata kerja UPN "Veteran" Yogyakarta

Dengan ditetapkan OTK baru UPN "Veteran" Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024, UPN "Veteran" Yogyakarta perlu menjabarkan ke dalam rincian tugas unit yang sesuai OTK baru. Selain itu proses bisnis juga perlu dikembangkan sesuai OTK baru agar proses bisnis

yang dijalankan dapat berjalan efektif dan efisien. Isu ini menjadi strategis ketika pada tahun 2024, terjadi pergantian pejabat secara serentak, mulai dari Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, dan Pimpinan UPA.

4. Pembangunan Budaya Organisasi dalam menguatkan karakter sebagai kampus Bela Negara dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja

UPN "Veteran" Yogyakarta, sebagai kampus bela negara, telah memiliki nilai-nilai budaya kerja yang dituangkan dalam kata "CREATIVE". Namun demikian, budaya "creative" ini belum sepenuhnya menjadi sebuah cerminan sikap dan perilaku pegawai. Oleh karenanya perlu upaya yang sistematis, terstruktur dan berkelanjutan untuk membangun budaya kerja organisasi UPN "Veteran" Yogyakarta. Isu ini menjadi strategis karena budaya kerja yang terbangun dengan baik akan melahirkan beberapa hal diantaranya: mengarahkan perilaku karyawan, meningkatkan kinerja dan produktivitas, membangun loyalitas dan kepuasan, memperkuat identitas organisasi, dan mendorong adaptasi & perubahan.

Bidang Pengembangan Bela Negara

1. Standar pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang dimiliki belum dikembangkan sesuai karakteristik perguruan tinggi

Sebagai kampus bela negara, UPN "Veteran" Yogyakarta harus terus mengembangkan standar bela negara terkait dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, yang sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara serta menyesuaikan dengan dinamika zaman. Tantangan strategis dalam merumuskan pengembangan standar bela negara adalah bagaimana pendekatan non militer dalam implementasi nilai-nilai bela negara, baik dalam kehidupan kampus, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Instrumen pengukuran indeks bela negara bagi mahasiswa dan pegawai belum dikembangkan sesuai karakteristik perguruan tinggi

Mengingat tantangan yang dihadapi juga bisa berubah, maka pengukuran indeks bela negara, baik untuk mahasiswa maupun pegawai, harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Untuk dapat menghasilkan hasil pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan institusi, maka perlu disusun instrumen pengukuran yang sesuai juga dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Oleh karenanya pengembangan instrumen tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.

3. Pengukuran indeks bela negara bagi mahasiswa dan pegawai belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dan berbasis sistem informasi

Untuk melihat hasil pengukuran secara berkelanjutan, maka pelaksanaan pengukuran indeks bela negara harus dilakukan secara berkelanjutan juga. Penggunaan sistem informasi atau aplikasi yang lebih ramah responden (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) menjadi isu strategis yang perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan unit terkait.

4. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara dalam membangun kesadaran, pemahaman, sikap dan perilaku sivitas akademika belum dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Untuk menghasilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bela negara, harus diawali dengan adanya kesadaran dan pengetahuan tentang nilai-nilai bela negara. Kedua hal tersebut dapat terwujud apabila kegiatan sosialisasi dan internalisasi dapat dijalankan secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh unit di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya kegiatan sosialisasi dan internalisasi menjadi isu strategis bagi UPN "Veteran" Yogyakarta, yang dikenal sebagai kampus bela negara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada capaian kinerja pada periode Renstra 2020-2024, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UPN "Veteran" Yogyakarta dibagi ke dalam 2 bidang utama yaitu bidang tridharma dan bidang tata kelola kelembagaan. Dalam bidang tridharma meliputi tiga aspek yaitu: pendidikan, pembelajaran dan kemahasiswaan; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang kelembagaan terdiri dari status kelembagaan sebagai PTN PK-BLU, tata kelola sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana termasuk sistem informasi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, kualifikasi keterbukaan informasi publik, indeks kepuasan pemangku kepentingan, indeks bela negara pegawai dan akreditasi institusi.

Permasalahan utama di **bidang pendidikan, pembelajaran dan kemahasiswaan** adalah pertama, masih relatif rendahnya lulusan yang berdaya saing internasional, yang ditunjukkan dengan lulusan yang bekerja, berwirausaha dan studi lanjut di lingkup internasional. Hal ini disebabkan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler belum sepenuhnya terintegrasi dalam mendukung lulusan yang berdaya saing global. Hal ini ditunjukkan dengan kurikulum yang sepenuhnya belum berorientasi pada hard skills dan soft skills serta berbasis standar internasional (OBE) dalam metode pembelajarannya, keterlibatan mahasiswa dalam program MBKM relatif rendah, sertifikasi kompetensi (nasional/internasional) bagi lulusan masih bersifat sukarela, organisasi kemahasiswaan belum sepenuhnya dijadikan oleh mahasiswa sebagai wahana pengembangan hard skills dan soft skills di luar pembelajaran di kelas. Kedua, lulusan yang berkarakter bela negara belum terlihat dalam dokumen kelulusan mahasiswa. Ketiga, kegiatan internasionalisasi dalam bidang pendidikan oleh sivitas akademika relatif rendah dan belum merata untuk seluruh prodi. Hal ini disebabkan oleh kerjasama kelembagaan masih didominasi oleh kerjasama tingkat nasional. Keempat, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran belum sepenuhnya memadai dan terkini, dengan disesuaikan dengan rasio antara mahasiswa dan ketersediaan sarpras seperti ruang kelas, ruang laboratorium dan peralatan laboratorium fakultas.

Masalah utama dalam **bidang penelitian** adalah sebagian besar riset didanai dari pendanaan internal dan berikutnya adalah pendanaan dari kemdiktisaintek. Sedangkan pendanaan dari lembaga lainnya, apalagi pendanaan melalui kerjasama internasional masih relatif sedikit. Hal ini disebabkan kerjasama internasional dalam bidang riset masih relatif sedikit. Luaran riset sebagian besar masih berorientasi pada publikasi, baik nasional maupun internasional. Namun luaran riset yang berdampak bagi masyarakat atau digunakan oleh dunia industri dan dunia usaha (DUDI) masih relatif sedikit. Hal ini disebabkan program hilirisasi hasil riset melalui pendekatan kolaboratif dengan mitra perguruan tinggi belum optimal dilakukan. Masalah lainnya dalam bidang riset adalah riset yang kolaboratif dengan lembaga dan dosen dari luar UPN "Veteran" Yogyakarta belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi bidang penelitian. Sedangkan masalah utama dalam **bidang pengabdian kepada masyarakat** adalah sebagian program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum dilakukan dalam jangka waktu menengah atau panjang untuk menghasilkan luaran yang lebih berdampak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kolaboratif dengan mitra dan didasarkan pada hasil riset dan pengetahuan untuk jangka menengah atau panjang belum menjadi program yang masif.

Masalah utama dalam **bidang tata kelola kelembagaan** adalah: *Pertama*, status kelembagaan sebagai PTN PK-BLU belum sepenuhnya berjalan karena sistem remunerasi sebagai sistem reward and punishment belum berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta. Hal ini sebagai akibat adanya perubahan kebijakan dari kementerian keuangan yang membuat kebijakan sistem klastering dalam penentuan sistem remunerasi pada PTN PK-BLU. *Kedua*, Proses bisnis utama dan pendukung UPN "Veteran" Yogyakarta dalam memberikan layanan belum sepenuhnya efektif dijalankan yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 20 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UPN "Veteran" Yogyakarta. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya pergantian pejabat pada tahun 2024 sehingga mengakibatkan perlunya penguatan sosialisasi terlebih dahulu tentang OTK yang baru dengan proses bisnis yang ada. *Ketiga*, sistem informasi yang terintegrasi antara bidang akademik dan non akademik serta sistem informasi layanan berbasis SSO belum sepenuhnya berjalan. Tata kelola web resmi dan berbagai media sosial belum sepenuhnya dikelola secara efektif dan efisien, sehingga hal ini belum berkontribusi signifikan dalam mendukung target ranking webometrics UPN "Veteran" Yogyakarta. *Keempat*, sistem pendataan program, kegiatan dan capaian kinerja belum berjalan secara tertib melalui dukungan sistem informasi. Hal ini berakibat pada kualifikasi keterbukaan informasi publik UPN "Veteran" Yogyakarta yang belum informatif. Sistem pendataan yang belum berjalan efektif dan juga sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi telah berdampak pada belum tercapainya akreditasi unggul bagi UPN "Veteran" Yogyakarta. *Kelima*, budaya kerja organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai institusi yang dituangkan menjadi "Creative", belum menjadi cerminan sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Hal ini disebabkan karena budaya kerja organisasi belum difahami oleh seluruh pegawai, sehingga memerlukan upaya sosialisasi dan internalisasi dalam organisasi melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung terbangunnya budaya organisasi.

Keenam, Badan Pengembangan Usaha (BPU) belum berjalan secara efektif. Hal ini berdampak pada masih relatif kecilnya kontribusi pendapatan yang berasal dari Non mahasiswa (Non UKT).

Sedangkan masalah utama dalam **bidang pengembangan bela negara** dan sebagai kampus bela negara adalah program internalisasi nilai-nilai bela negara yang belum berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Internalisasi harus dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan dalam kehidupan kampus untuk mewujudkan sikap dan perilaku pegawai yang berkarakter bela negara. Internalisasi belum dilakukan secara merata di seluruh unit di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta. Masalah lainnya adalah standar dan instrumen tingkat kesadaran, pemahaman, sikap dan perilaku perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat penciri sebagai perguruan tinggi atau kampus bela negara. Lanjutannya adalah perlu ada pengembangan dalam metode pengukuran indeks bela negara melalui sistem informasi.

B. Analisis Masalah

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) UPN Veteran Yogyakarta 2025–2029, pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) menjadi alat penting dalam mengevaluasi posisi strategis universitas secara menyeluruh dan komprehensif. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan internal yang dapat dioptimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Evaluasi ini mencakup keempat bidang strategis universitas: Pendidikan dan Kemahasiswaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi, Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pengembangan Bela Negara. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan UPN Veteran Yogyakarta mampu merumuskan strategi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global dan nasional.

Secara umum, UPN Veteran Yogyakarta memiliki berbagai kekuatan yang menjadi pondasi dalam mencapai tujuan strategis. Di bidang pendidikan, universitas menunjukkan keunggulan pada bidang kebumihandan energi, tingginya minat calon mahasiswa, serta kualitas input mahasiswa baru yang baik. Rata-rata IPK lulusan tinggi dan masa studi yang relatif singkat mencerminkan efektivitas pembelajaran. Di sisi lain, organisasi kemahasiswaan yang aktif serta jejaring alumni yang kuat turut mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa. Pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), capaian indikator kinerja utama yang melampaui target menunjukkan komitmen institusi terhadap penguatan tridharma perguruan tinggi.

Dari aspek kelembagaan, status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) memberikan fleksibilitas keuangan dalam tata kelola, sementara semua program studi telah terakreditasi dan SDM dinilai cukup mumpuni. Dukungan sistem informasi tridharma dan tersedianya roadmap birokrasi juga menandakan kesiapan institusi dalam menghadapi tantangan tata kelola modern. Sementara itu, status hukum sebagai kampus bela negara yang diperkuat oleh Perpres No. 121 Tahun 2014 menjadi landasan legal dan ideologis yang

membedakan UPN Veteran Yogyakarta dari perguruan tinggi lain. Nilai-nilai bela negara telah diintegrasikan ke dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan pendukung seperti UKM, LSP, serta unit karir.

Meski demikian, universitas masih menghadapi berbagai kelemahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi jangka menengah. Di bidang pendidikan, tracer study belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, sementara implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) masih belum merata di seluruh program studi. Sertifikasi kompetensi lulusan juga belum sepenuhnya tersedia di semua jurusan. Di bidang PPM, partisipasi dosen belum merata dan sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi. Luaran penelitian yang dihasilkan masih minim hilirisasi, serta evaluasi dampak pengabdian belum menyentuh aspek kualitatif secara mendalam. Dari sisi kelembagaan, perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis Renstra, visi-misi universitas belum dipahami secara luas oleh seluruh sivitas akademika, dan kompetensi tenaga kependidikan (tendik) dinilai belum optimal. Di bidang bela negara, pemahaman terhadap misi bela negara masih belum merata, akreditasi internasional belum kuat, dan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis bela negara belum maksimal.

Di sisi eksternal, universitas memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kinerja institusi. Terbukanya peluang kerja sama nasional dan internasional, meningkatnya kebutuhan terhadap sertifikasi kompetensi, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap kewirausahaan dan energi terbarukan menjadi momentum yang dapat dikapitalisasi. Peningkatan dukungan terhadap riset berbasis kearifan lokal, transformasi digital untuk diseminasi hasil penelitian, serta keselarasan kegiatan PPM dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi peluang yang patut dioptimalkan. Dalam bidang kelembagaan, momentum reformasi birokrasi dan peningkatan standar akreditasi dapat mendorong peningkatan mutu institusi. Peluang kerja sama dalam isu-isu bela negara dan penggunaan media digital untuk kampanye nilai-nilai kebangsaan juga menjadi kekuatan tambahan dalam memperluas pengaruh institusi.

Namun demikian, universitas juga harus mewaspadaai berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan efektivitas strategi yang dirumuskan. Di antaranya adalah meningkatnya jumlah perguruan tinggi asing yang dapat menjadi kompetitor baru, perubahan nilai dan gaya hidup generasi muda akibat pengaruh globalisasi dan disrupsi digital, serta tuntutan akreditasi dan sertifikasi internasional yang semakin tinggi. Selain itu, dalam bidang PPM, ketatnya persaingan dalam memperoleh pendanaan, fluktuasi alokasi anggaran dari pemerintah, serta lemahnya insentif jangka panjang untuk kegiatan pengabdian menjadi tantangan tersendiri. Dari aspek tata kelola, keterbatasan sumber pendanaan eksternal, serta disrupsi teknologi yang cepat dapat menyulitkan adaptasi kelembagaan, sementara pada sisi bela negara, nilai-nilai kebangsaan dapat tergerus oleh ideologi global dan liberalisme jika tidak dikelola secara cermat. Secara keseluruhan, hasil analisis SWOT ini menunjukkan bahwa UPN Veteran Yogyakarta berada pada posisi strategis yang cukup kuat, namun perlu memperkuat sistem internal dan memperluas kemitraan eksternal agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Dengan memperhatikan dinamika yang telah diidentifikasi dalam analisis ini, universitas dapat menyusun arah kebijakan yang berbasis data dan bukti, serta mengembangkan program-program unggulan yang tidak hanya meningkatkan reputasi akademik, tetapi juga memperkuat peran institusi dalam membangun karakter bela negara dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Tabel 1.
Analisis SWOT Bidang Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan

| Bidang Pendidikan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan | |
|--|--|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| S1. Unggul Dalam Bidang Ilmu dalam Kebumihan dan Energi | W1. Sistem tracer study belum berjalan secara sistemik |
| S2. Pengakuan Masyarakat Terhadap Kualitas Pendidikan Perguruan Tinggi Sangat Baik | W2. Belum semua kurikulum berbasis OBE |
| S3. Animo Mahasiswa Baru Tinggi | W3. Program internasionalisasi masih rendah dan belum merata di seluruh prodi |
| S4. Kualitas mahasiswa baru sangat baik berdasarkan nilai UTBK | W4. Belum semua prodi memiliki jenis sertifikasi profesi bagi mahasiswa |
| S5. Sistem penjaminan mutu sudah optimal | W5. Beberapa dosen masih dalam proses mendapatkan jabatan fungsional dan tersertifikasi sesuai syarat undang-undang |
| S6. Masa studi cukup cepat | W6. Kinerja OK belum optimal dalam mendukung kinerja Institusi |
| S7. IPK Lulusan Tinggi | W7. Dampak pendidikan pada kebutuhan teknologi dan kesejahteraan masyarakat belum optimal |
| S8. Jaringan alumni luas dan Kokoh serta memiliki posisi strategis di berbagai Instansi dan Wilayah | W8. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa |
| S9. Program studi yang tersedia sesuai kebutuhan masyarakat | W9. Sinergi antar fakultas/jurusan/program studi dalam mewujudkan universitas yang unggul di bidang kebumihan belum maksimal |
| S10. Prestasi Mahasiswa baik tingkat regional, nasional dan Internasional semakin meningkat | W10. Sistem Informasi Akademik belum terintegrasi secara optimal |
| S11. Memiliki organisasi kemahasiswaan Dari Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan (BEM, DPM, HMJ/HMPS, UKM, dan KSM) | W11. Rekognisi dosen dan mahasiswa Kurang optimal |
| S12. Komitmen Universitas Terhadap Dukungan Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan | W12. Kerjasama dengan mitra kelas dunia belum optimal |
| PELUANG | ANCAMAN |
| O1. Kerjasama di tingkat internasional dan nasional semakin terbuka dalam rangka benchmarking dan mewujudkan Worldclass University. | T1. Ijin Pembukaan Perguruan Tinggi Asing sudah dilakukan |
| O2. Semakin tingginya standar penilaian akreditasi untuk Unggul pada program studi oleh LAM dan institusi oleh BAN PT | T2. Transformasi karakter dan nilai pendidikan terdiskrupsi pada generasi muda di era milenial |
| O3. Kewajiban lulusan perguruan tinggi memiliki sertifikasi kompetensi | T3. Era globalisasi telah mengaburkan batas Negara, sehingga tingkat persaingan semakin tinggi |
| O4. Adanya kebutuhan dosen perguruan tinggi memiliki sertifikasi kompetensi untuk peningkatan kompetensi lulusan dan pemenuhan capaian IKU | T4. Daya saing pendidikan Indonesia masih rendah di tingkat Asia dan Global |
| O5. Pemanfaatan jaringan alumni untuk mengembangkan pembelajaran bidang energi terbuka luas | T5. Tuntutan pemeringkatan internasional karena masyarakat dan dunia kerja menjadikan pemeringkatan sebagai referensi |
| O6. Posisi universitas unggul yang mengembangkan bidang energi dilandasi jiwa belanegara dan berdampak pada kemandirian energi negara | T6. Standar Kompetensi yang berubah dan Semakin tinggi tuntutan standarnya . |
| O7. Sinergi dengan alumni/pihak ketiga yang bergerak di bidang energi untuk mendukung pengembangan universitas | T7. Kompetisi global memberi ruang yang lebar masuknya investasi dan tenaga asing ke Indonesia. |
| O8. Arah kebijakan pemerintah mendukung terciptanya kewirausahaan dibidang energi terbarukan | T8. Diversifikasi sumber-sumber pendanaan masih terbatas |
| | T9. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang cepat |

Tabel 2.
Analisis SWOT Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

| Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | |
|---|---|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| S13. Capaian indikator kinerja utama (IKU) yang sangat baik | W13. Partisipasi dosen belum merata dan tidak konsisten antar unit. |
| S14. Dukungan kelembagaan dan ekosistem riset yang berkembang | W14. Sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi |
| S15. Pusat studi dan desa binaan sebagai basis implementasi | W15. Hilirisasi dan diseminasi hasil PPM belum maksimal |
| S16. Integrasi nilai bela negara dalam tridharma | W16. Evaluasi berbasis dampak belum terstruktur |
| PELUANG | ANCAMAN |
| O9. Kebutuhan nasional terhadap riset dan inovasi lokal. | T10. Kompetisi antarperguruan tinggi dalam memperoleh pendanaan dan |
| O10. Peluang kerja sama internasional dan industri | T11. Fluktuasi pendanaan dari pemerintah |
| O11. Transformasi digital dan diseminasi daring. | T12. Minimnya regulasi insentif jangka panjang untuk pengabdian |
| O12. Peran kampus dalam penguatan SDGs dan bela negara | T13. Ancaman disrupsi nilai kebangsaan di era globalisasi. |

Tabel 3.
Analisis SWOT Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Tata Kelola

| Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Tata Kelola | |
|--|---|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| <p>S17. Memiliki Visi, Misi, dan Tujuan organisasi sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan</p> <p>S18. Fleksibilitas dalam pengelolaan kelembagaan dan tata kelola keuangan karena sudah ditetapkan sebagai PTN PK-BLU untuk mendukung sasaran strategis dapat secara efektif dan efisien terlaksana</p> <p>S19. Memiliki sumber daya yang potensial sebagai income generating BLU</p> <p>S20. Memiliki ciri khas kampus bela Negara, dan positioning yang jelas dan baik karena memiliki kekhususan</p> <p>S21. Semua Program Studi telah terakreditasi.</p> <p>S22. Memiliki jumlah dan kualifikasi SDM yang cukup memadai dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.</p> <p>S23. Telah memiliki sistem informasi dalam kegiatan tridharma</p> <p>S24. Telah memiliki roadmap reformasi birokrasi</p> <p>S25. Memiliki kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri</p> | <p>W17. Sistem pengelolaan perencanaan dan anggaran berbasis renstra belum dilaksanakan secara optimal</p> <p>W18. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi belum sepenuhnya difahami oleh pemangku kepentingan internal (pegawai dan mahasiswa)</p> <p>W19. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi belum terintegrasi secara</p> <p>W20. Kompetensi tendik masih lemah dalam mendukung kinerja organisasi</p> <p>W21. Status dosen PPPK saat ini belum memungkinkan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional dan studi lanjut, sehingga berdampak pada keterbatasan pemenuhan syarat akademik di program studi dan berpotensi menghambat pengembangan mutu serta akreditasi prodi.</p> <p>W22. Tata kelola keuangan sebagai PPK-BLU belum berjalan optimal</p> <p>W23. Reformasi birokrasi belum berjalan optimal</p> <p>W24. Kerjasama nasional maupun internasional masih relatif rendah</p> |
| PELUANG | ANCAMAN |
| <p>O13. Tuntutan dan perlunya penguatan reformasi birokrasi dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>O14. Semakin tingginya standar penilaian akreditasi pengelola pendidikan dan institusi oleh BAN PT</p> <p>O15. memiliki peluang strategis untuk mengelola dan mengembangkan potensi energi, yang didukung oleh kapasitas dan keahlian Fakultas Teknologi Mineral</p> | <p>T14. Laju modernisasi yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi ancaman bagi UPNVIY apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas digital, sistem keamanan data, serta adaptasi sumber daya manusia terhadap perubahan teknologi.</p> <p>T15. Kurangnya pemetaan kebutuhan SDM yang berbasis kompetensi di UPN berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kualifikasi pegawai dengan tuntutan tugas, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas kerja, kualitas layanan, dan pencapaian kinerja organisasi</p> |

Tabel 4.
Analisis SWOT Bidang Pengembangan Bela Negara

| Bidang Pengembangan Bela Negara | |
|---|---|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| <p>S26. Identitas dan Ciri Khas Kampus Bela Negara: Ditetapkan secara hukum melalui Perpres No. 121 Tahun 2014 bahwa UPNVIY memiliki identitas bela negara sebagai bagian dari keunikan institusi.</p> <p>S27. Integrasi Nilai Bela Negara dalam Kurikulum dan Ekstrakurikuler: Nilai-nilai seperti patriotisme, nasionalisme, dan semangat juang ditanamkan dalam seluruh aktivitas Tri Dharma.</p> <p>S28. Dukungan Sejarah dan Budaya Institusi: UPNVIY lahir dari semangat juang para veteran RI, sehingga semangat bela negara menjadi pondasi sejarah kampus.</p> <p>S29. Sarana Pendukung Terpadu: Tersedianya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Lembaga Sertifikasi Profesi, dan UPT Pengembangan Karir mendukung penguatan soft skill berwawasan bela negara.</p> | <p>W25. Pemahaman Internal Belum Merata: Tidak semua sivitas akademika memahami visi, misi, dan tujuan bela negara sebagai identitas institusi.</p> <p>W26. Kurangnya Akreditasi Internasional dan Prestasi Global: Rendahnya pengakuan internasional bisa menghambat positioning sebagai kampus bela negara.</p> <p>W27. Belum Optimalnya Implementasi MBKM Berbasis Bela Negara: Belum seluruh prodi mengintegrasikan nilai bela negara dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara maksimal.</p> <p>W28. Keterbatasan Dalam Evaluasi Dampak Program Bela Negara: Belum terlihat sistematisnya pelacakan hasil kegiatan bela negara terhadap perubahan karakter mahasiswa.</p> |
| PELUANG | ANCAMAN |
| <p>O16. Isu Kebangsaan dan Radikalisme: Meningkatnya isu radikalisme dan disintegrasi nasional memperkuat urgensi dan nilai tawar program bela negara.</p> <p>O17. Dukungan Regulasi Pemerintah & Agenda Nasional: Selaras dengan agenda Nawacita dan Kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pembentukan karakter Pancasila.</p> <p>O18. Kerja Sama Internasional dan Nasional: Terbuka peluang kolaborasi dalam pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memperkuat nilai bela negara.</p> <p>O19. Teknologi Informasi dan Media Digital: Dapat dimanfaatkan untuk kampanye nilai bela negara secara lebih kreatif dan luas jangkauannya</p> | <p>T16. Globalisasi dan Neo-Liberalisme: Penyebaran nilai-nilai luar yang bertentangan dengan Pancasila dapat menggerus semangat bela negara.</p> <p>T17. Kompetisi Perguruan Tinggi Global: Universitas tanpa kekhasan dapat dengan mudah tergerus oleh tren pendidikan global yang lebih pragmatis.</p> <p>T18. Tuntutan Sertifikasi Profesional dan Soft Skills Global: Fokus pada bela negara tanpa dikombinasikan dengan kompetensi global dapat dianggap kurang relevan oleh dunia kerja.</p> <p>T19. Kelemahan Literasi Digital Generasi Muda: Berpotensi sulit menyerap nilai-nilai bela negara yang disampaikan secara konvensional</p> |

C. Potensi



Sumber: Data Diolah (2025)

Gambar 2.

Strategi Bidang Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan berdasarkan Analisis SWOT

UPN Veteran Yogyakarta memiliki sejumlah potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan, pembelajaran, dan kemahasiswaan. Kekuatan utama seperti reputasi unggul di bidang kebumih dan energi, kualitas mahasiswa baru, serta IPK dan masa studi yang baik menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Jaringan alumni yang luas dan organisasi kemahasiswaan yang aktif dapat dimobilisasi untuk memperkuat program internasionalisasi serta penanaman nilai kebangsaan di tengah disrupsi karakter generasi muda. Selain itu, prestasi mahasiswa dan dukungan pendanaan kegiatan kemahasiswaan dapat diarahkan untuk mengembangkan inovasi, seperti startup energi terbarukan yang berbasis pada kompetensi unggulan.

Untuk menjawab kelemahan internal seperti belum optimalnya penerapan kurikulum OBE, sistem informasi akademik, dan sinergi antar-fakultas, kampus perlu memanfaatkan peluang kerja sama global, dukungan kebijakan pemerintah, serta sumber daya digital. Kolaborasi dengan mitra internasional dapat mempercepat pembaruan kurikulum dan pembukaan program sertifikasi profesi. Sementara itu, pemanfaatan pendanaan hibah bisa menjadi solusi atas keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan strategi yang terintegrasi dan berbasis pada kekuatan internal serta dukungan eksternal, UPN Veteran Yogyakarta memiliki posisi strategis untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang adaptif, kompetitif, dan unggul dalam menjawab tantangan masa depan.



Sumber: Data diolah (2025)

Gambar 3.

Strategi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Analisis SWOT

UPN Veteran Yogyakarta memiliki kekuatan dan peluang yang signifikan dalam pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM). Capaian IKU yang tinggi dan dukungan LPPM serta ekosistem riset yang semakin matang dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama internasional dan dengan industri, memperkuat posisi kampus dalam persaingan hibah yang kompetitif. Nilai-nilai bela negara yang khas dapat diintegrasikan dalam riset-riset berbasis SDGs seperti energi terbarukan dan ketahanan pangan, menjadikan kampus memiliki diferensiasi yang unik dalam menghadapi tren liberalisasi riset global. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi institusi di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga membangun narasi riset yang relevan dengan tantangan strategis bangsa.

Sementara itu, sejumlah kelemahan seperti kurangnya hilirisasi riset, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta evaluasi dampak pengabdian yang masih bersifat kuantitatif dapat diatasi melalui peluang digitalisasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan dunia industri. Perbaikan sistem informasi terintegrasi akan mendukung monitoring luaran PPM secara real-time, sementara kerja sama dengan industri dapat mempercepat hilirisasi hasil riset menjadi produk nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada APBN, sehingga kampus tetap adaptif dalam menghadapi fluktuasi kebijakan dan tuntutan akreditasi. Dengan pemanfaatan kekuatan dan peluang secara strategis, tantangan yang ada dapat diubah menjadi momentum untuk peningkatan kualitas tridharma secara berkelanjutan.



Sumber: Data Diolah (2025)

Gambar 4.
Strategi Bidang Pengembangan Bela Negara berdasarkan Analisis SWOT

UPN Veteran Yogyakarta memiliki potensi strategis dalam pengembangan bela negara melalui integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kerja sama internasional. Nilai bela negara juga dapat dikampanyekan secara luas melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan media digital, menjadikannya relevan di kalangan generasi muda. Strategi ini diperkuat dengan pengembangan sertifikasi soft skills berbasis bela negara yang akan memperkuat kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Identitas bela negara dapat menjadi diferensiasi penting sekaligus tameng budaya di tengah arus globalisasi yang kuat, menjadikan institusi ini mampu tetap kompetitif secara karakter dan nasionalisme.

Untuk menjawab kelemahan seperti pemahaman internal yang belum merata dan sistem evaluasi program yang belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi serta pelatihan berbasis regulasi pemerintah menjadi peluang besar yang dapat dimaksimalkan. Selain itu, tantangan dari kampus luar negeri dan rendahnya literasi digital mahasiswa dalam hal bela negara bisa diatasi dengan mengombinasikan nilai-nilai bela negara dengan kompetensi global serta penyediaan konten kreatif yang menarik. Dengan demikian, UPNVY tidak hanya melestarikan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mentransformasikannya menjadi kekuatan strategis yang adaptif terhadap dinamika zaman dan kompetisi internasional.



Sumber: Data Diolah (2025)

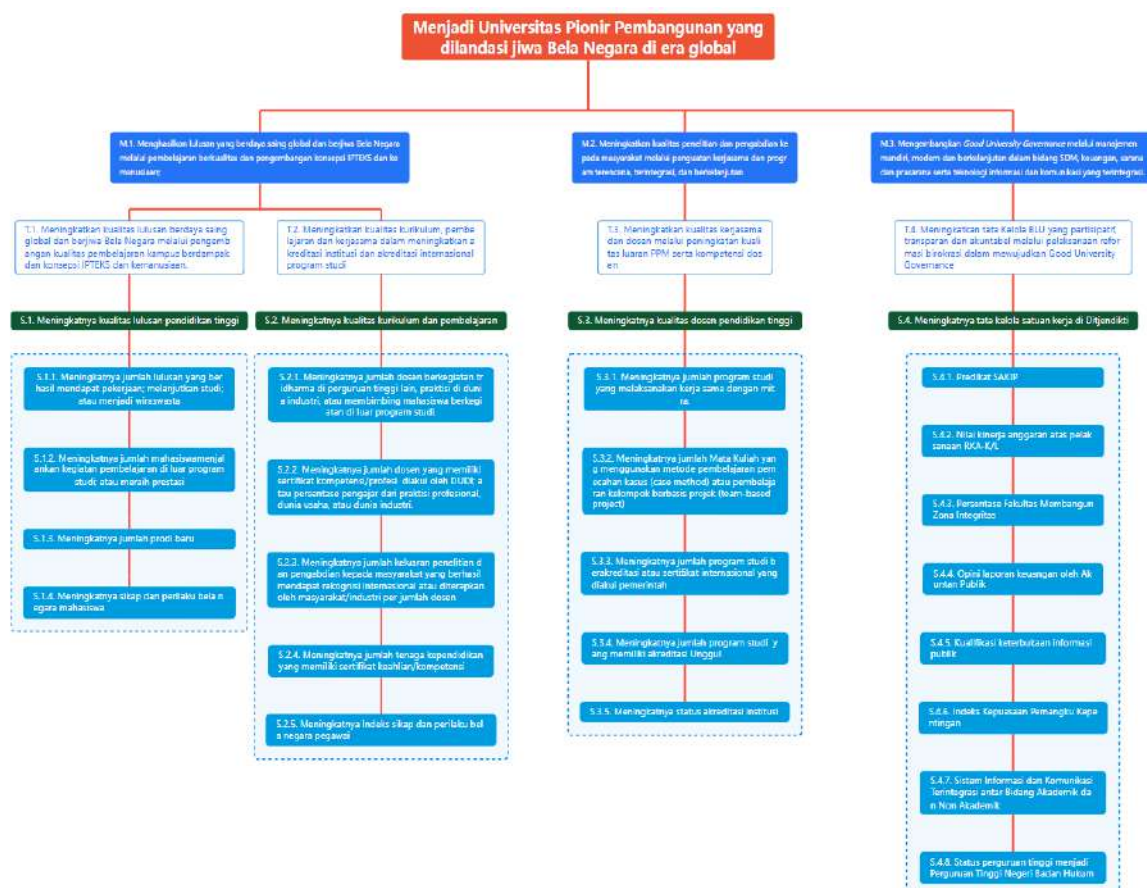
Gambar 5.

Strategi Bidang Organisasi , Kelembagaan dan Tata Kelola berdasarkan Analisis SWOT

Strategi dalam bidang organisasi, kelembagaan, dan tata kelola memiliki peran krusial dalam menjawab hasil analisis SWOT, karena keberhasilan pengelolaan kelembagaan sangat menentukan kapasitas universitas dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal dan mengoptimalkan potensi internal. Kekuatan dan peluang yang dimiliki perlu dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan, seperti melalui status PTN PK-BLU yang memberi ruang otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta kekhasan Bela Negara yang dapat menjadi pembeda dalam menjalin kemitraan nasional. Di sisi lain, identifikasi kelemahan dan ancaman mendorong perlunya pembenahan sistem birokrasi, integrasi teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi SDM agar tata kelola semakin responsif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.

D. Pohon Kinerja

Pohon kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 karena menjadi kerangka logis dan sistematis yang menjabarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, hingga sasaran strategis organisasi. Melalui pohon kinerja, setiap unsur perencanaan dapat disusun secara konsisten dan terpadu, sehingga arah pembangunan dan program kerja tidak menyimpang dari mandat dan identitas kelembagaan. Pohon kinerja juga mempermudah proses evaluasi dan pengukuran kinerja, karena indikator kinerja utama (IKU) dapat diturunkan secara tepat dari sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan. Selain itu, pohon kinerja memperkuat akuntabilitas dan transparansi, karena menunjukkan secara jelas kontribusi masing-masing unit kerja terhadap pencapaian visi institusi. Dalam konteks operasional, pohon kinerja menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, sehingga pelaksanaan rencana kerja tetap berada dalam jalur strategi jangka menengah. Tidak kalah penting, keberadaan pohon kinerja membantu memperkuat komunikasi strategis kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, karena bentuk visual dan hierarkisnya lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, penyusunan pohon kinerja secara cermat menjadi bagian yang esensial dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra 2025–2029.



Gambar 6.
Pohon Kinerja UPN “Veteran” Yogyakarta



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II memuat penjabaran mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator program yang menjadi arah dan landasan strategis UPN "Veteran" Yogyakarta dalam periode Renstra 2025–2029. Visi dan misi dijelaskan sebagai panduan utama dalam mewujudkan cita-cita institusi yang adaptif, unggul, dan berdaya saing global. Tujuan dan sasaran disusun secara terukur untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, sementara indikator program disusun sebagai alat kendali kinerja yang memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program secara sistematis dan berkelanjutan.

2.1.

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

2.2.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

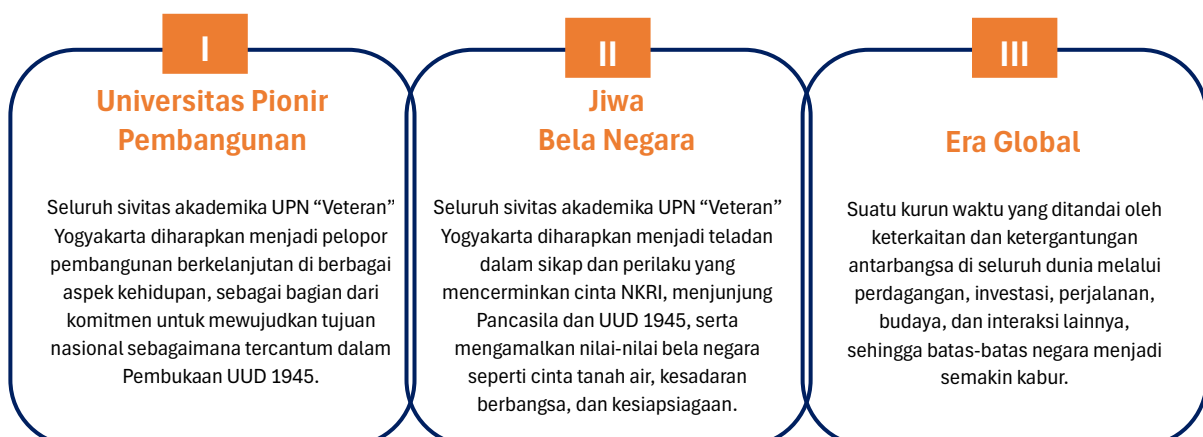
2.1. Visi UPN “Veteran” Yogyakarta

Visi adalah pernyataan fundamental yang menggambarkan arah dan tujuan jangka panjang suatu organisasi, mencerminkan cita-cita besar yang ingin dicapai di masa depan. Dalam konteks perguruan tinggi, visi menjadi representasi identitas, nilai dasar, dan orientasi strategis lembaga dalam menghadapi perubahan lingkungan pendidikan, sosial, ekonomi, dan teknologi. Visi bukan sekadar slogan, melainkan landasan ideologis yang mengarahkan seluruh proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program institusi secara konsisten dan terintegrasi.

Memiliki visi yang kuat dan relevan sangat penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 karena visi menjadi titik pijak utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan indikator kinerja. Visi memastikan bahwa semua langkah perencanaan tidak bersifat reaktif atau jangka pendek, tetapi berorientasi masa depan dan selaras dengan tantangan serta peluang yang berkembang. Bagi UPN “Veteran” Yogyakarta, visi berperan sebagai kompas untuk menjamin kesinambungan identitas sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai Bela Negara, sekaligus menjawab tuntutan globalisasi melalui transformasi digital, kolaborasi internasional, dan penciptaan lulusan yang berdaya saing tinggi. Sehingga, Visi UPN “Veteran” Yogyakarta adalah

“Menjadi Universitas Pionir Pembangunan yang dilandasi jiwa Bela Negara di era global”

Visi ini mengandung tiga kata kunci utama:



2.2. Misi UPN "Veteran" Yogyakarta

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi, sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai berikut:

1

Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa Bela Negara melalui pembelajaran berkualitas dan pengembangan konsepsi ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan kemanusiaan

2

Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kerjasama dan program terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan

3

Mengembangkan tata kelola universitas yang baik melalui manajemen mandiri, modern dan berkelanjutan dalam bidang SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi

2.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Sejalan dalam mewujudkan visi dan misinya, tujuan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 85 tahun 2017 yaitu menunjang pembangunan nasional melalui bidang pendidikan tinggi dalam rangka terciptanya sumberdaya manusia yang unggul di era global dengan dilandasi jiwa Bela Negara.

Berdasarkan tujuan tersebut, telah ditetapkan **tujuan strategis** yaitu:

1. Pengembangan pembelajaran berkualitas dan kampus berdampak, serta mengembangkan konsepsi ilmu pengetahuan teknologi sains dan kemanusiaan dalam menghasilkan lulusan berdaya saing global dan berjiwa bela negara
2. Pengembangan kualitas dosen, kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan dan kerjasama dalam meningkatkan akreditasi program studi
3. Peningkatan kualitas dosen dan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan luaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
4. Perwujudan tata Kelola BLU yang reformatif, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good University Governance*

Tabel 5.
Indikator Tujuan dan Target Keberhasilan 2029

| Indikator Tujuan | Target 2029 |
|---|-------------|
| T.1. Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa Bela Negara | |
| Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | 70% |
| Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. | 30% |
| Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | 80 |
| T.2. Pengembangan kualitas kurikulum, pembelajaran dan kerjasama | |
| Indeks program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerja sama | 0,8 |
| Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi. | 75% |
| Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | 65% |
| Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi Unggul | 60% |
| Status Akreditasi Institusi | A |
| T.3. Peningkatan kualitas kerjasama dan dosen | |
| Persentase dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodi | 40% |
| Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | 20% |
| Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen | 2,5 |
| Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat keahlian/kompetensi | 30% |
| Indeks sikap dan perilaku bela negara pegawai | 85 |
| T.4. Perwujudan tata Kelola BLU yang partisipatif, transparan dan akuntabel | |
| Predikat SAKIP | A |
| Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | 90 |
| Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | 100% |
| Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | WTP |
| Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif |
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan | 85 |
| Sistem Informasi Terintegrasi antar Bidang Akademik dan Non Akademik | 100% |
| Status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum | PTN-BH |

2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuannya, UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan **4 (empat) sasaran strategis** yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 6.
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

| Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran | |
|--|---|
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lulusan | |
| 1 | IKU-1.1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dalam waktu 6 bulan setelah wisuda. |
| 2 | IKU-1.2. Persentase (%) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. |
| 3 | IKT-1.1. jumlah prodi baru pada program S1, S2 dan S3, serta program profesi yang dibuka |
| 4 | IKT-1.2. Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen | |
| 1 | IKU-2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. |
| 2 | IKU-2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. |
| 3 | IKU-2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen |
| 4 | IKT-2.1. Persentase kualifikasi pendidikan S3 dan jabatan fungsional dosen |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | |
| 1 | IKU-3.1. Indeks program studi S1 dan D4/D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. |
| 2 | IKU-3.2 Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi. |
| 3 | IKU-3.3. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah |
| 4 | IKT-3.1. Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot evaluasi |
| 5 | IKT-3.2. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang akreditasi Unggul |
| Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Kelembagaan | |
| 1 | IKU-4.1. Predikat SAKIP |

| Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran | |
|---------------------------------------|--|
| 2 | IKU-4.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L |
| 3 | IKU-4.3 Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas |
| 4 | IKT 4.1 Status Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik |
| 5 | IKT 4.2 Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional (EBITDA) |
| 6 | IKT 4.3 Jumlah Pendapatan operasional |
| 7 | IKT 4.4 Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset |
| 8 | IKT 4.5 Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama |
| 9 | IKT 4.6 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU |
| 10 | IKT 4.7 Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU |
| 11 | IKT 4.8 Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU |
| 12 | IKT 4.9 Nilai self Maturity Rating |
| 13 | IKT 4.10 Kualifikasi keterbukaan informasi publik |
| 14 | IKT 4.11 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan |
| 15 | IKT 4.12 Capaian Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai Tugas Fungsinya |
| 16 | IKT 4.13. Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO |
| 17 | IKT 4.14 Persentase Integrasi Sistem Informasi dan Komunikasi antar Bidang Akademik dan Non Akademik |
| 18 | IKT 4.15 Ranking Webometric |
| 19 | IKT 4.16 Persentase ketercapaian target peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 |
| 20 | IKT 4.17 Terwujudnya Status kelembagaan PT sebagai PTNBH |
| 21 | IKT 4.18 Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi |
| 22 | IKT 4.19 Indeks sikap dan perilaku bela negara pegawai |
| 23 | IKT 4.20 Status akreditasi institusi |

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kelembagaan yang menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029. Arah kebijakan dirumuskan untuk menjawab tantangan strategis dan mendukung pencapaian visi dan misi universitas secara menyeluruh. Strategi disusun sebagai pendekatan implementatif yang terintegrasi antar bidang, guna memastikan efektivitas program dan kegiatan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka regulasi yang melandasi pelaksanaan program, serta penguatan kelembagaan yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola universitas yang adaptif, profesional, dan akuntabel.

3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi

3.2.

Kerangka Regulasi

3.3.

Kerangka Kelembagaan

3.4.

Reformasi Birokrasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara umum, arah kebijakan UPN “Veteran” Yogyakarta pada periode 2025–2029 didasarkan pada **empat landasan utama**.

Pertama, mengacu pada mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Asta Cita Presiden RI** mendukung agenda pembangunan nasional.

Asta Cita Presiden adalah:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi (pemberantasan korupsi dan narkoba);
- h. Meningkatkan keharmonisan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan Asta Cita tersebut, Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada Prioritas Nasional 4 yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan. Kemdiktisaintek secara khusus mendapat amanat untuk mendukung empat Program Prioritas (PP) yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional 4, yaitu: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan STEAM; Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional; dan Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Selain keempat Program Prioritas di atas, terdapat tiga Program Prioritas lain di mana Kemdiktisaintek turut berkontribusi dalam mendukung ketercapaian Prioritas Nasional 4, yaitu: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; Penguatan dan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola.

Selain merujuk pada dokumen RPJM Nasional 2025-2029, arah kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang akan dilaksanakan Kemdiktisaintek juga mempertimbangkan beberapa amanat regulasi yang telah diundangkan dan masih berlaku,

yaitu: Pertama, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang saat ini sedang dalam proses revisi, dengan dengan pendekatan kodifikasi yang mengintegrasikan ketentuan dari tiga undang undang lain bidang pendidikan seperti UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Kedua, UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan amanat regulasi tersebut, arah kebijakan Kemdiktisaintek periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan ekosistem riset, teknologi, dan inovasi nasional melalui pengembangan kapasitas kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan jumlah SDM Iptek khususnya dosen perguruan tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset untuk mendukung kebutuhan strategis nasional. Ketiga, Kemdiktisaintek turut berperan dalam penguatan Manajemen Talenta Nasional, khususnya terkait talenta riset dan inovasi, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 108/2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Keempat, Kemdiktisaintek akan berperan dalam revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kelima, PP No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PTKL). Keenam, UU No. 17/2023 tentang Kesehatan Pasal 208 memberikan amanat bagi kementerian yang membidangi pendidikan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kedua, mengacu pada **arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek)** mendukung agenda pembangunan nasional.

Arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek, difokuskan pada 3 hal yaitu: Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung PHTC; Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung Program Prioritas Presiden; dan Arah Kebijakan dan Strategi Kemdiktisaintek secara Umum.

Untuk **mendukung tercapainya PHTC**, arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek meliputi:

a. Memperkuat SDM Unggul.

SDM unggul dihasilkan melalui upaya gotong royong menyiapkan talenta masa depan untuk menopang pembangunan dan industri nasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya dengan pemberian KIP kuliah dan KIP kuliah daerah, 1 riset diikuti oleh 1 mahasiswa S3 melalui PMDSU, revitalisasi pendidikan STEM, dan program mahasiswa berdampak untuk pemimpin masa depan Indonesia emas.

b. Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi.

Mendorong hilirisasi produk akademik melalui program saintek untuk inovasi berdasarkan skema pembinaan/afirmasi, penugasan, dan relevansi dengan Asta Cita, memperkuat platform dan skema pendanaan padanan, serta penguatan riset terapan di PT Vokasi.

- c. Pusat riset dan akselerator kebijakan strategis
Mengembangkan kampus yang dapat memberikan solusi berbasis riset untuk kebijakan publik dan pembangunan nasional. Beberapa hal yang telah dan akan terus dilakukan di antaranya melalui penguatan Pusat Antar Perguruan Tinggi, pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*), serta penguatan komunikasi sains.
- d. Perluasan delegasi kewenangan ke perguruan tinggi.
Otonomi perguruan tinggi menjadi landasan utama agar tiga agregator “berdampak” sebagaimana tiga poin sebelumnya memperkuat SDM Unggul, kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, dan kampus sebagai pusat riset dan akselerator kebijakan strategis–dapat terwujud. Beberapa aspek yang diperluas sebagai delegasi kewenangan ke perguruan tinggi meliputi tata kelola kelembagaan, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, dan penguatan otonomi PT Vokasi. Dengan otonomi ini kampus dapat lebih inklusif, adaptif, transformatif, dan berdampak.

Untuk **mendukung program prioritas presiden**, arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek meliputi:

- a. Untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air, Kemdiktisaintek mendorong kontribusi nyata dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air. Program riset dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian nasional dalam sektor-sektor vital .
- b. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, percepatan transformasi digital di kampus, dan pengembangan ekosistem riset yang terintegrasi menjadi bagian dari strategi besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*).
- c. Kemdiktisaintek berkomitmen pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kampus-kampus didorong untuk membangun sistem pembelajaran yang ramah gender, menyediakan layanan disabilitas, serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.
- d. Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, Kemdiktisaintek melalui kurikulum hijau, riset keberlanjutan, serta pengembangan laboratorium hidup (*living labs*), perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemdiktisaintek juga mendukung penelitian penelitian yang berbasis ekologi dan perubahan iklim.
- e. Kemdiktisaintek mengambil peran penting dalam proses hilirisasi melalui integrasi hasil riset ke dalam industri nasional. Fokusnya adalah menghasilkan inovasi yang aplikatif, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat penciptaan nilai tambah dalam negeri, terutama di sektor maritim dan sumber daya alam.
- f. Dalam rangka pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga, Kemdiktisaintek mendorong pendidikan tinggi tidak hanya pada aspek sains dan teknologi, tetapi juga pada pelestarian kebudayaan nasional. Perguruan tinggi seni, lembaga riset budaya, serta kegiatan mahasiswa di bidang seni dan olahraga difasilitasi untuk menjadi ruang ekspresi dan pencapaian prestasi tingkat nasional hingga internasional.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemdiktisaintek secara umum sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi.
- b. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja.
- c. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan SDM pendidikan tinggi.
- e. Peningkatan SDM pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi tingkat internasional.
- f. Peningkatan kontribusi perguruan tinggi berdasarkan keunggulan.
- g. Peningkatan peran lembaga di perguruan tinggi dalam layanan IPTEK dan inovasi.
- h. Peningkatan kualitas keluaran riset yang berdampak.
- i. Peningkatan kualitas kebijakan terkait pendidikan tinggi, riset pengembangan, sains teknologi yang berdampak.
- j. Peningkatan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ketiga, mengacu pada kondisi yang diharapkan dalam **tahap ketiga Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2015–2039**.



Gambar 7.

Milestone Perwujudan Visi UPN "Veteran" Yogyakarta

Fokus tahap ini adalah **penguatan fondasi menuju World Class University** melalui peningkatan efisiensi eksternal guna mencapai daya saing internasional/global, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai bela negara. Pada periode ini, UPN "Veteran" Yogyakarta mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, struktur organisasi, serta penguatan sumber daya manusia menuju pengakuan internasional. Indikator yang menjadi acuan meliputi pengakuan internasional di bidang penelitian, kualitas SDM, laboratorium, proses pembelajaran, kapasitas teknologi informasi, hingga popularitas situs web institusi. Strategi utama untuk mencapai pengakuan tersebut adalah melalui pemenuhan instrumen standar internasional dan keterlibatan aktif dalam kolaborasi global.

Keempat, mengacu pada **hasil evaluasi Rencana Strategis UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2020–2024**.

Secara umum, capaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja tambahan, terdapat beberapa catatan penting yang dapat disampaikan.

1. **Pada bidang pendidikan**, kualitas lulusan yang berdaya saing internasional masih perlu ditingkatkan. Jumlah program studi terakreditasi unggul masih di bawah 50%, dan baru terdapat 4 program studi sarjana serta 1 program studi magister yang memperoleh akreditasi internasional. Proses pembelajaran dan kurikulum berbasis Kampus Berdampak dan pendekatan STEAM belum berjalan optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan, kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan perlu terus dikembangkan menuju standar *World Class University*, dan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan riset masih perlu diperluas.
2. **Pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**, pengembangan luaran riset yang diakui secara internasional masih perlu ditingkatkan. Program hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha dan industri (DUDI) juga masih membutuhkan penguatan. Kualitas jurnal ilmiah di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta pun perlu terus ditingkatkan untuk mendukung reputasi akademik institusi.
3. **Pada bidang tata kelola kelembagaan**, khususnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan status PK-BLU, UPN "Veteran" Yogyakarta belum optimal dalam mengembangkan unit usaha (*income generating*). Sistem remunerasi belum sepenuhnya diterapkan, sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh, keterbukaan informasi publik masih belum informatif, dan pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan belum dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka **arah kebijakan dan strategi periode 2025–2029** difokuskan pada:





Gambar 8.
Peta Jalan Capaian Renstra 2025-2029

Peta jalan capaian Renstra berfungsi sebagai panduan terstruktur yang mengarahkan setiap program, kebijakan, dan kegiatan agar selaras dengan tujuan strategis lembaga dalam periode perencanaan tertentu. Keberadaan peta jalan ini memungkinkan institusi seperti UPN "Veteran" Yogyakarta untuk menetapkan tahapan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan secara berkala. Rencana pengembangan UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2025–2029 disusun secara bertahap dengan fokus yang saling berkesinambungan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan mutu layanan, serta mewujudkan daya saing institusi di tingkat nasional dan internasional. Pada tahap awal, tahun 2025 difokuskan pada penataan struktur organisasi dan program studi agar lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan, disertai dengan penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja layanan dan keuangan. Upaya ini diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai fondasi utama penguatan kualitas akademik.

Memasuki tahun 2026, prioritas diarahkan pada modernisasi sistem manajemen melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis SSO, penerapan sistem remunerasi yang adil dan berbasis kinerja, serta optimalisasi sarana pembelajaran. Pada tahun 2027, universitas berfokus pada peningkatan pendapatan dari sumber nonmahasiswa guna memperkuat kemandirian finansial institusi, sekaligus melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung pembelajaran. Selanjutnya, tahun 2028 menjadi momentum penguatan hasil dengan menargetkan capaian kinerja layanan dan keuangan hingga 90%, serta memastikan seluruh fasilitas pembelajaran memenuhi standar kualitas yang tinggi. Akhirnya, pada tahun 2029, UPN "Veteran" Yogyakarta menargetkan lahirnya lulusan berdaya saing global berlandaskan nilai bela negara, seluruh program studi mencapai akreditasi unggul, luaran penelitian dan pengabdian diakui secara internasional, serta tercapainya status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sebagai puncak kemandirian dan keunggulan institusi. Dalam rangka mewujudkan peta jalan capaian kinerja selama periode Renstra 2025-2029, program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 7.
Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2025-2029

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|
| Peningkatan kualitas lulusan yang berdaya saing global dan dilandasi bela negara | | | | | |
| Menyelenggarakan pelatihan memasuki dunia kerja | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Menyelenggarakan pelatihan dan ujian toefl bagi mahasiswa yang akan studi lanjut | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pendampingan dan fasilitasi bagi mahasiswa yang memiliki usaha baru | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan monitoring perkembangan studi mahasiswa | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Membuka skema baru sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa | + | +++ | + | +++ | + |
| Menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa, sebagai salah satu syarat yudisium | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan penilaian kinerja OK | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memfasilitasi pendanaan bagi OK | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan evaluasi kurikulum yang berorientasi pada <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> | + | +++ | + | +++ | + |
| Melakukan internalisasi muatan/mk seperti bahasa inggris, literasi digital/kompetensi tik, kewirausahaan, materi anti korupsi dalam kurikulum | + | +++ | + | +++ | + |
| Memfasilitasi pembelajaran di luar kampus seperti magang/job training atau kegiatan abdimas pada desa/kegiatan abdimas yang terprogram dan berkelanjutan | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan internalisasi nilai-nilai <i>soft skills</i> /personality/non teknis/bela negara dalam proses pembelajaran | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Fasilitasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, sebagai syarat yudisium | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan sharing session dari alumni secara rutin dan berkelanjutan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menerbitkan kta bagi fresh graduate | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan perbaikan data base alumni | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melibatkan alumni dalam melakukan tracer study | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pengembangan proses pembelajaran di luar program studi | | | | | |
| Melaksanakan evaluasi kurikulum dan penyusunan kurikulum kampus berdampak berbasis steam, obe, <i>soft skills</i> , bahasa asing dan nilai-nilai bela negara | + | +++ | + | +++ | + |
| Menyusun kebijakan tentang skema alokasi pendanaan kegiatan studi ekscursi/praktek lapangan/kerja praktek/dll yang masuk dalam kurikulum dan BKT | +++ | + | + | + | + |
| Menyelenggarakan kegiatan kampus berdampak bagi mahasiswa, baik yang bersifat internal (lintas prodi dalam upnvy) maupun eksternal (kemdikbudristek dan mitra) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan evaluasi kurikulum bagi program studi | + | +++ | + | +++ | + |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|
| Peningkatan prestasi mahasiswa | | | | | |
| Memfasilitasi kegiatan lomba dan non lomba, baik nasional maupun internasional | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Menjalankan standar layanan sesuai standar akreditasi | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan publikasi dan sosialisasi sumber-sumber pemberia beasiswa kepada mahasiswa S1/S2/S3 secara rutin | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan website universitas, fakultas, jurusan dan prodi yang informatif, terkini dan bilingual | + | +++ | + | + | + |
| Pengembangan program studi baru untuk program s1, s2, s3 dan profesi | | | | | |
| Membuka prodi baru program D4/S1/S2/S3 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan pengadaan dosen tetap (ASN) untuk memastikan rasio dosen dan mahasiswa tetap ideal | +++ | +++ | + | +++ | + |
| Membuka program profesi insinyur | + | +++ | + | + | + |
| Peningkatan sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | | | | | |
| Melakukan integrasi nilai-nilai bela negara dalam kurikulum dan proses pembelajaran | ++ | + | ++ | + | ++ |
| Menyelenggarakan pelatihan metode pembelajaran berbasis nilai-nilai bela negara | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan instrumen pengukuran indeks bela negara bagi mahasiswa | + | ++ | + | + | + |
| Melaksanakan pengukuran sikap dan perilaku bela negara bagi mahasiswa | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melaksanakan internalisasi bela negara dalam kebijakan/kehidupan kampus | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program bela negara bagi mahasiswa | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pengembangan kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri | | | | | |
| Membuka kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dalam mendukung pembelajaran di luar kampus/kampus berdampak | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mengembangkan kerjasama dengan berbagai mitra dalam bidang beasiswa | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mengembangkan kerjasama dengan ikatan alumni di fakultas atau jurusan masing-masing | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mengembangkan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan monev kerjasama | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Pengembangan metode pembelajaran berbasis kasus/proyek/bela negara | | | | | |
| Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan model pembelajaran berbasis kasus, proyek dan bela negara bagi dosen | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mengembangkan sistem informasi rps berbasis kasus (<i>case method</i>) atau berbasis proyek (<i>team-based project</i>) atau berbasis bela negara sebagai sebagian bobot evaluasi oleh jurusan/prodi | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Peningkatan akreditasi internasional prodi | | | | | |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|
| Memfasilitasi kegiatan internasionalisasi | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Membuka program/kelas internasional | + | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memfasilitasi dan mendampingi pengajuan akreditasi/sertifikasi internasional bagi program studi | + | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memfasilitasi dosen dari PT luar negeri | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Memfasilitasi untuk mengikuti kegiatan <i>visiting lecturer</i> dengan perguruan tinggi di luar negeri | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan akreditasi unggul prodi | | | | | |
| Memfasilitasi dosen menjadi anggota profesi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Memfasilitasi dan pendampingan pengajuan akreditasi unggul oleh LAM dan BAN PT bagi prodi dan pt | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan akreditasi laboratorium | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pengembangan kuantitas dan kualitas dosen dalam berkegiatan tridharma di luar kampus | | | | | |
| Menyusun regulasi tentang dosen praktisi untuk memastikan bahwa kewajiban proses belajar dan mengajar dapat tetap terlaksana dengan baik | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Menyusun ketentuan dan prosedur program pembelajaran jarak jauh atau <i>open learning</i> /pembelajaran daring | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memfasilitasi dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memfasilitasi kegiatan di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 <i>by subject</i>) dalam dan luar negeri | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memberikan penugasan kepada dosen oleh pembina organisasi kemahasiswaan atas kegiatan mahasiswa di luar prodi, baik kegiatan akademik maupun non akademik | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Pengembangan kompetensi dosen dari praktisi/dosen dari luar negeri | | | | | |
| Menyelenggarakan pelatihan bahasa inggris dan lainnya | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Memfasilitasi kegiatan sertifikasi kompetensi/profesi bagi dosen, baik melalui skema mandiri maupun skema kerjasama dengan lembaga penyelenggara sertifikasi | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memfasilitasi dosen tamu yang berasal dari praktisi | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan jabatan fungsional dosen | | | | | |
| Memfasilitasi bagi dosen untuk mendapatkan beasiswa dari dalam dan luar negeri | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun kerjasama dengan PT di luar negeri untuk fasilitasi program S3 dosen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membentuk tim pendamping percepatan jabfung di tingkat fakultas/universitas | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengadakan klinik penulisan karya ilmiah, buku ajar, dan artikel jurnal bereputasi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dupak, portofolio, dan dokumen pendukung lainnya | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan sistem informasi kepegawaian dan pengusulan jabatan fungsional berbasis digital terintegrasi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membuat dashboard progres PAK dosen di fakultas untuk memantau perkembangan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Memberikan insentif finansial atau non-finansial bagi dosen yang berhasil naik jabfung lebih cepat | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan proses penerimaan dosen baru | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan kualitas luaran penelitian yang bereputasi internasional | | | | | |
| Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas luaran penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Memperbaiki sistem pengumpulan data | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan skema insentif bagi dosen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun pusat unggulan iptek/center of excellent di tingkat fakultas/universitas yang berbasis keunggulan dan karakteristik upnv | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal nasional | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal internasional | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan revitalisasi tata kelola jurnal menuju jurnal terindeks sinta dan terindeks global | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan kegiatan penelitian melalui skema kolaborasi (termasuk dengan alumni dan pengguna) yang berdampak langsung kepada masyarakat/industri | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mengembangkan tata kelola layanan kegiatan penelitian dan abdimas yang berbasis sistem informasi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan dunia usaha/dunia industri | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun kelompok riset dalam mendukung kepentingan bangsa dan daya saing internasional | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan di masyarakat | | | | | |
| Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas luaran penelitian yang diterapkan oleh masyarakat | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis bela negara | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat (pemerintah, swasta/industri, pihak lainnya yang terkait) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Menyusun skema dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa selain kkn | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan kerjasama pkm dengan perguruan tinggi dan dunia usaha/dunia industri | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun kelompok pelaksana pkm dalam mendukung kepentingan bangsa dan daya saing internasional | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan predikat SAKIP | | | | | |
| Menyusun/mengevaluasi dokumen perencanaan strategis | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun rencana strategi bisnis (RSB) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Menyusun rencana bisnis anggaran (RBA) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun perjanjian kinerja | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun rencana aksi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pengukuran kinerja | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun rencana pendapatan dan belanja | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SAKIP | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun laporan kinerja | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membentuk pokja SAKIP | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun kegiatan berdasarkan mitigasi resiko | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun budaya kerja organisasi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan sosialisasi nilai CREATIVE kepada pegawai seluruh unit | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun kebijakan tentang penilaian kinerja berbasis budaya kerja | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan kinerja anggaran dalam pelaksanaan RKA/KL | | | | | |
| Menerapkan perencanaan berbasis kinerja (performance-based budgeting). | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Workshop atau bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengelolaan keuangan negara dan sistem aplikasi (misal: SAKTI, OM-SPAN, E-MONEV, dll). | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Integrasi data perencanaan dan penganggaran dengan sistem pengawasan | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Menyusun laporan capaian output | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun standar biaya keluaran (sbk) universitas | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun peraturan rektor tentang efisiensi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun keputusan rektor tentang pelaksanaan revisi anggaran | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pemutakhiran halaman iii dipa setiap triwulan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran tiap triwulan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melaksanakan langkah-langkah awal dan akhir tahun. | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan yang terintegrasi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan audit internal | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan evaluasi sistem dan prosedur perencanaan dan keuangan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Evaluasi proses bisnis dan standar operasional prosedur | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan fakultas yang membangun zona integritas | | | | | |
| Sosialisasi ZI kepada seluruh sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa). | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun rencana aksi pembangunan zi jangka pendek, menengah, dan panjang | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Digitalisasi layanan akademik dan administratif (surat menyurat, legalisir, permohonan ijazah, dll). | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|
| Mempublikasikan informasi keuangan, kinerja, dan layanan di website fakultas | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun budaya kerja yang jujur dan melayani | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan penilaian kinerja objektif dan transparan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program zi. | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program zi. | | | | | |
| Kolaborasi dengan mahasiswa, alumni, mitra industri, dan masyarakat untuk memperkuat integritas layanan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan tata kelola perencanaan dan keuangan | | | | | |
| Melakukan penyusunan dan pencatatan keuangan yang tertib | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pengendalian internal oleh spi secara rutin dan berkelanjutan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkala | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan kodifikasi aset | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pengamanan fisik dan administrasi aset | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi keuangan dan bmn secara berkala | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas sdm perencanaan dan keuangan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut temuan audit. | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan audit dan penilaian maturitas manajemen risiko, termasuk mitigasi penyimpangan dan pelaporan fraud | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan kinerja keuangan berdasarkan indikator kinerja dari kementerian keuangan | | | | | |
| Revitalisasi pemanfaatan aset | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Revitalisasi kedudukan dan tata kelola badan pengembangan usaha | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Revitalisasi pusat studi di lingkungan UPNVY | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Pembentukan unit-unit usaha baru dalam mendukung <i>income generating</i> | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan monev terhadap capaian pendapatan dan belanja | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan pengelolaan terhadap aktivitas yang tidak produktif | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pengukuran standar biaya dan waktu layanan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan survey kepuasan pengguna dan analisis ulang kebutuhan layanan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyelesaian modernisasi pengelolaan blu | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melaksanakan <i>Self Maturity Rating</i> , monitoring dan evaluasinya | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Pengembangan tata kelola dan dokumen informasi publik | | | | | |
| Melaksanakan kuisisioner keterbukaan informasi publik secara rutin | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun presentasi evaluasi sesuai indikator penilaian | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengklasifikasikan jenis-jenis dokumen informasi publik sesuai peraturan perundangan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan media publikasi baik offline maupun online yang mudah diakses dan informatif | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan teknologi sistem informasi, komunikasi dan dokumentasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan publikasi secara rutin bagi dokumen yang sesuai peraturan harus dipublikasikan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan kepuasan pemangku kepentingan | | | | | |
| Mengembangkan instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan berdasarkan tugas pokok unit | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan secara rutin (tahunan) oleh setiap unit utama (Fakultas, Biro, UPA dan Lembaga) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mengembangkan layanan tridharma dan kelembagaan berbasis teknologi sistem informasi dan komunikasi | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan monitoring dan evaluasi indikator kepuasan pemangku kepentingan secara rutin (triwulanan dan tahunan) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Melakukan monitoring dan evaluasi capaian standar pelayanan minimum (triwulanan dan tahunan) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Menyusun standar pelayanan minimum institusi | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melaksanakan monitoring SPM | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Pengembangan sistem informasi terintegrasi | | | | | |
| Melakukan evaluasi seluruh aplikasi/sistem informasi yang ada | + | +++ | +++ | + | + |
| Mengembangkan sistem informasi terintegrasi berbasis sso | + | + | +++ | +++ | + |
| Mengembangkan sistem informasi terintegrasi bidang akademik dan non akademik | + | + | +++ | +++ | + |
| Melakukan monev ranking <i>versi webometric</i> | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan terkini | | | | | |
| Menyusun roadmap pembangunan gedung baru, revitalisasi ruang kelas dan pengembangan laboratorium 2025-2029 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Merevitalisasi ruang kelas yang memadai, modern dan terkini | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pengembangan laboratorium (lama dan baru) dalam mendukung kegiatan tridharma | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pengadaan peralatan laboratorium | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Melakukan pemeliharaan rutin sarpras pendukung pembelajaran | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan revitalisasi asrama mahasiswa | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Membangun fasilitas sarana dan prasarana kampus yang mendukung terciptanya kampus yang sehat, aman dan ramah lingkungan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun tata kelola sampah di lingkungan kampus | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun tata kelola gedung untuk memastikan keamanan dan keselamatan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun standar K3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan fasilitas sarpras yang bercirikan bela negara | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pembangunan gedung baru untuk perkuliahan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun roadmap pengembangan green metric upnv | + | +++ | + | + | + |
| Melaksanakan monev pelaksanaan roadmap pengembangan <i>Green Metric</i> | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Pengembangan status kelembagaan menuju ptnbh | | | | | |
| Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator syarat pembentukan ptnbh secara rutin (triwulanan dan tahunan) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun proposal pembentukan PTNBH | + | + | + | +++ | +++ |
| Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan | | | | | |
| Melakukan rotasi tendik secara berkala dan terencana untuk memastikan distribusi di setiap unit kerja proporsional | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pelatihan/sertifikasi bagi laboran dan tendik lainnya | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan pengadaan tenaga laboran sesuai kebutuhan laboratorium | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melakukan monitoring kinerja satuan keamanan kampus (skk) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun peta kebutuhan sertifikasi bagi tendik sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berkontribusi dalam kinerja institusi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Pelatihan bahasa inggris dan bahasa asing lainnya | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan sikap dan perilaku bela negara pegawai | | | | | |
| Menyusun instrumen pengukuran indeks bela negara bagi dosen dan tenaga kependidikan | ++ | ++ | + | + | + |
| Melaksanakan pengukuran sikap dan perilaku bela negara bagi dosen dan tendik secara rutin (tahunan) | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program bela negara bagi dosen dan tendik | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Mengembangkan model pelatihan bela negara dengan penggunaan pendekatan non militer | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Peningkatan akreditasi institusi | | | | | |
| Membangun perpustakaan digital yang terintegrasi dengan sumber-sumber referensi dan selalu terkini | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

| Kegiatan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Melaksanakan proses penjaminan mutu berbasis ppepp secara berkelanjutan | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Menyusun dan mengajukan akreditasi institusi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |

Keterangan:

menunjukkan Program Prioritas

Tanda (+) menunjukkan Derajat Prioritas

Dalam rangka untuk meningkatkan dan mempercepat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT), UPN “Veteran” Yogyakarta telah menetapkan berbagai program dan kegiatan yang berbasis kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan dunia industri, pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan lainnya sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Melalui kolaborasi ini, UPN “Veteran” Yogyakarta berupaya memperluas jejaring kemitraan, memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing institusi dalam skala global. Sinergi antar pihak ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.
Program-Kegiatan Kerjasama Pendukung IKU Tahun 2025-2029

| PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | KEGIATAN KERJASAMA |
|--|--|--|
| Peningkatan Kualitas Lulusan yang berdaya saing global dan dilandasi bela negara | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | Membangun kerjasama dengan pengurus IA (Ikatan Alumni) Pusat UPN “Veteran” Yogyakarta |
| | | Membangun Kerjasama dengan Pengurus IA tingkat Fakultas dan Prodi |
| | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi | Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perusahaan nasional dan multinasional |
| | | Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah |
| | | Membangun kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat tingkat Nasional dan Internasional |
| Pengembangan kuantitas dan kualitas dosen dalam berkegiatan tridharma di luar kampus | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri |
| | | Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun luar negeri |

| PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | KEGIATAN KERJASAMA |
|---|--|---|
| Pengembangan kompetensi dosen internal dan peningkatan dosen luar yang berasal dari praktisi/dosen dari luar negeri | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | Membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui BNSP dan lembaga lain yang diakui Kemdikbudristek |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perusahaan nasional dan multinasional |
| | | Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah |
| | | Membangun kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat tingkat Nasional dan Internasional |
| Peningkatan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen. | Membangun Kerjasama dengan Perusahaan nasional dan multinasional |
| | | mengembangkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi |
| | | Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah |
| Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | Membangun Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perusahaan nasional dan multinasional |
| | | Membangun kerjasama lembaga/organisasi internasional |
| Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis kasus/proyek/bela negara | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi | Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Dalam Negeri |
| Peningkatan akreditasi internasional prodi | Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah | Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri |
| | | Membangun Kerjasama dengan Perusahaan nasional dan multinasional |
| | | Membangun kerjasama lembaga/organisasi internasional |
| Peningkatan predikat SAKIP | Predikat SAKIP Satker minimal BB | Membangun kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah yang berpredikat A/AA |
| Peningkatan kinerja anggaran dalam | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | Membangun kerjasama dengan dengan instansi/lembaga pemerintah yang nilai kinerja anggarannya sangat baik |

| PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | KEGIATAN KERJASAMA |
|---|--|---|
| pelaksanaan RKA/KL | | |
| Peningkatan fakultas yang membangun zona integritas | Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas dalam pembangunan zona integritas |

Program dan kegiatan disusun untuk merespons tantangan internal dan eksternal yang dihadapi universitas, baik dalam aspek tata kelola, sumber daya manusia, pendanaan, maupun dinamika perkembangan pendidikan tinggi nasional dan global. Setiap program dirancang secara adaptif agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis, memperkuat kapasitas institusi, serta memastikan tercapainya visi UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi unggul, inovatif, dan berdaya saing global berlandaskan nilai bela negara serta diarahkan pada tiga bidang utama:

- 1. Bidang Pendidikan.** Difokuskan pada peningkatan daya saing internasional lulusan berlandaskan nilai Bela Negara, peningkatan jumlah program studi terakreditasi unggul dan internasional, pengembangan program studi baru (S1, S2, S3, dan profesi), serta peningkatan indeks sikap dan perilaku Bela Negara mahasiswa. Selain itu, strategi penguatan mutu pembelajaran juga dilakukan melalui penerapan kurikulum berbasis *outcome-based education* (OBE), pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, serta perluasan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi Kampus Berdampak yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global.
- 2. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.** Diarahkan pada pencapaian klaster mandiri dalam penelitian dan klaster unggul dalam pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat kontribusi UPN “Veteran” Yogyakarta terhadap pembangunan berbasis riset dan inovasi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah bereputasi, penguatan kolaborasi riset lintas disiplin dan mitra eksternal, serta hilirisasi hasil penelitian yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.
- 3. Bidang Tata Kelola Kelembagaan.** Menekankan pada penerapan sistem tata kelola PK-BLU menuju *Good University Governance* sebagai PTN-BH, pengembangan unit usaha pencapaian predikat SAKIP dan opini WTP atas laporan keuangan, peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi publik, penguatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan sikap dan perilaku Bela Negara .

Seluruh arah kebijakan difokuskan untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan meningkatkan daya saing global melalui tata kelola yang adaptif, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan riset dan inovasi. Selain itu, UPN “Veteran” Yogyakarta memperluas jejaring kerja sama strategis dengan berbagai pihak guna memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi dan masyarakat. Berdasarkan arah tersebut, UPN “Veteran” Yogyakarta merumuskan strategi pengembangan sebagaimana dijabarkan berikut ini:



Gambar 9.
Rumusan Strategi 2025-2029

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam pendidikan tinggi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Rencana Strategis UPN "Veteran" Yogyakarta 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPN "Veteran" Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, UPN "Veteran" Yogyakarta memiliki tugas utama menyelenggarakan pendidikan akademik, serta dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila memenuhi persyaratan, universitas juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Selain bidang pendidikan, juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi diatur melalui peraturan rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Senat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi UPN "Veteran" Yogyakarta meliputi:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi,
2. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan
4. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Yogyakarta, UPN "Veteran" Yogyakarta secara resmi berubah status dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Seiring dengan perubahan status kelembagaan tersebut, struktur organisasi juga telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta.



Gambar 10.
Organ UPN "Veteran" Yogyakarta

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta mempunyai Organ yang terdiri dari:

1. Senat: Merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Pimpinan: Merupakan organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta untuk dan atas nama Menteri, yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan membina hubungan dengan lingkungan.

Organ Pemimpin terdiri dari:

- a. Rektor merupakan pemimpin UPN "Veteran" Yogyakarta
- b. Rektor dibantu oleh:
 - Wakil rektor; dan
 - Unsur organisasi di bawah pemimpin.

Wakil Rektor terdiri dari:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sistem informasi.
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Unsur organisasi di bawah pemimpin terdiri dari:

1. Pelaksana akademik terdiri dari:
 - a. Fakultas, yang terdiri dari:
 - Fakultas Teknologi Mineral dan Energi
 - Fakultas Teknik Industri
 - Fakultas Pertanian
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - b. Lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM)
2. Pelaksana administrasi, dilaksanakan oleh Biro yang terdiri dari:
 - a. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - b. Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum
3. Penjaminan mutu, dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu (Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran/LPMPP); dan
4. Penunjang akademik dilaksanakan oleh unit penunjang akademik (UPA), terdiri dari:
 - UPA Perpustakaan;
 - UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - UPA Bahasa;
 - UPA Laboratorium Terpadu;
 - UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;
 - UPA Layanan Uji Kompetensi; dan
 - UPA Pengembangan Sains dan Energi.

3. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Satuan Pengawasan Internal (SPI) unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.

4. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta UPN "Veteran" Yogyakarta.

Sebagai PTN PK-BLU, selain organ yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, UPN "Veteran" Yogyakarta juga memiliki organ Dewan Pengawas, yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

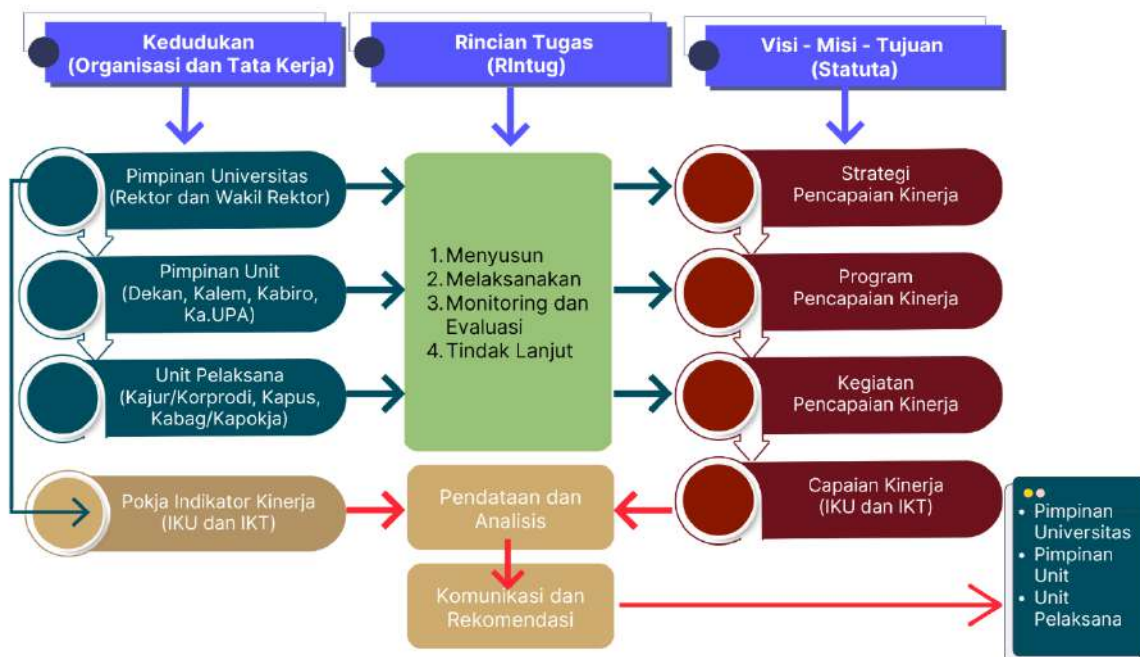
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas juga berperan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU. Kehadiran Dewan Pengawas diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan dan memastikan seluruh kegiatan operasional universitas sejalan dengan prinsip *Good University Governance*, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

B. Hubungan Kinerja, Strategi, Kebijakan dan Peran Unit Lintas Fungsi (*Crosscutting*)

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis UPN "Veteran" Yogyakarta pada periode 2025–2029, diperlukan keterpaduan antara strategi, kebijakan, dan pelaksanaan kinerja di seluruh lini organisasi, termasuk peran unit-unit lintas fungsi. Hubungan antara kinerja dan strategi tidak dapat dipandang sebagai hubungan linear, melainkan saling mempengaruhi secara dinamis, di mana strategi mendorong pencapaian kinerja dan hasil kinerja menjadi dasar perumusan kebijakan serta penyempurnaan strategi ke depan.

Kebijakan yang ditetapkan pada tingkat institusi perlu diturunkan secara terstruktur dalam rencana operasional masing-masing unit dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang telah ditetapkan, sehingga setiap unit memiliki arah dan target yang selaras dengan tujuan strategis universitas. Bagian ini menguraikan bagaimana kinerja strategis diintegrasikan dengan kebijakan dan strategi institusi serta bagaimana peran unit lintas fungsi menjadi penggerak utama dalam memastikan implementasi Renstra berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan akuntabel.

Pendekatan lintas fungsi ini diharapkan menjadi dasar budaya kerja kolaboratif dalam pengelolaan kelembagaan menuju *Good University Governance* dan *World Class University*, sekaligus memperkuat daya adaptif universitas terhadap perubahan lingkungan strategis, mendorong inovasi berkelanjutan, serta memastikan seluruh sumber daya organisasi dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi pemangku kepentingan.



Gambar 11.
Hubungan Antar Unit dalam Mendukung IKU dan IKT

Berdasarkan gambar di atas, peran dan fungsi unit dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Target Kinerja berdasarkan kedudukannya dalam OTK UPN “Veteran” Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pimpinan Universitas** yang dipimpin oleh Rektor bersama para wakil rektor menyusun dan merumuskan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi, misi, tujuan serta target kinerja yang terdapat dalam Renstra maupun secara khusus yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan Dirjen Pendidikan Tinggi.
- b. **Pimpinan Unit di bawah Rektor** seperti Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) menyusun dan merumuskan program kerja sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Pimpinan Universitas dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. **Pimpinan Sub Unit Pelaksana** seperti Ketua Jurusan/Koorprodi Fakultas, Kepala Pusat Lembaga, Kepala Bagian/Kelompok Kerja menyusun kegiatan sebagai penjabaran dari program kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. **Kelompok Kerja Capaian Indikator Kinerja** yang dibentuk oleh Rektor dibawah koordinasi wakil rektor yang menangani bidang perencanaan bertugas untuk melakukan pengumpulan data capaian kinerja, analisis capaian kinerja, pelaporan capaian kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit penanggung jawab capaian kinerja serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi capaian kinerja, baik di tingkat universitas maupun di tingkat unit (Fakultas, Lembaga, Biro dan UPA).

Tabel 9.
Unit Terkait dengan Indikator Kinerja Utama

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | JABATAN UNIT TERKAIT |
|--|---|
| Persentase jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | Rektor-Wakil Rektor Bidang KAK-Ka UPA (PIC)-Dekan/Warek/Kajur/Koorprodi-Bagian Akademik-Operator UPA PKK-Bagren |
| Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi | Rektor-Wakil Rektor Bidang AKSI-Kabiro KAK (PIC)-Dekan/Wadek/Kajur/Koorprodi-Bagian Akademik Univ & Bagian Umum Fak-Operator PDDIKTI Univ & Fak-Bagren |
| Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | Rektor-Wakil Rektor Bidang AKSI-Kabiro KAK (PIC)-Dekan/Wadek/Kajur/Pusat Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) PIC-Bagian Akademik/Operator PDDIKTI Univ & Fak-Bagren-Mhs-Dosen |
| Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | Rektor-Wakil Rektor Bidang AKSI-Kabiro KAK (PIC)-Dekan/Wadek/Kajur/Koorprodi-Bagian Akademik Univ/Bagian Umum/Operator PDDIKTI Univ/Fak-Bagren Dosen |
| Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | Rektor-Wakil Rektor Bidang AKSI-Kabiro KAK (PIC)-Dekan/Wadek/Kajur/Koorprodi-Bagian Akademik Univ/Bagian Umum/Operator PDDIKTI Univ/Fak-Koord.Kepeg-Bagren-Dosen Praktisi |
| Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen | Rektor-Wakil Rektor Bidang KAK-Kabiro KAK-Dekan/Wadek/Kajur/Koorprodi-Koord.Kerjasama/Humas (PIC)-Operator Lemkerma-Bagren |
| Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | Rektor-Wakil Rektor Bidang KAK-Kabiro KAK-Dekan/Wadek/Kajur/Koorprodi-Koord.Kerjasama/Humas (PIC)-Operator Lamkerma-Bagren |
| Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi. | Rektor-Ka LPMPP/Ses LPMPP/Kapus PP (PIC) Dekan/Wadek/Kajur/Koorprodi-Kabag Akademik Unit/Kabag Umum Fak-Operator PDDIKTI-Bagren-Dosen |
| Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | Rektor-Wakil Rektor Bidang KAK-Kabiro KAK-Dekan/Warek/Kajur/Koorprodi-Bagian Akademik |
| Predikat SAKIP | Rektor, Warek PKU, Kepala Biro PKU, Ka Unit |
| Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | Rektor, Warek PKU, Kepala Biro PKU, Ka Unit |
| Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | Rektor, Warek PKU, Kepala Biro PKU, Dekan |

Untuk memperjelas proses dan hubungan antar unit dalam pendataan dan pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor 1448/UN62/OT.02.00/KEP/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pendataan IKU di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta dan Prosedur Operasional Standar Pendataan IKU.

3.4. Reformasi Birokrasi

A. Rasionalitas

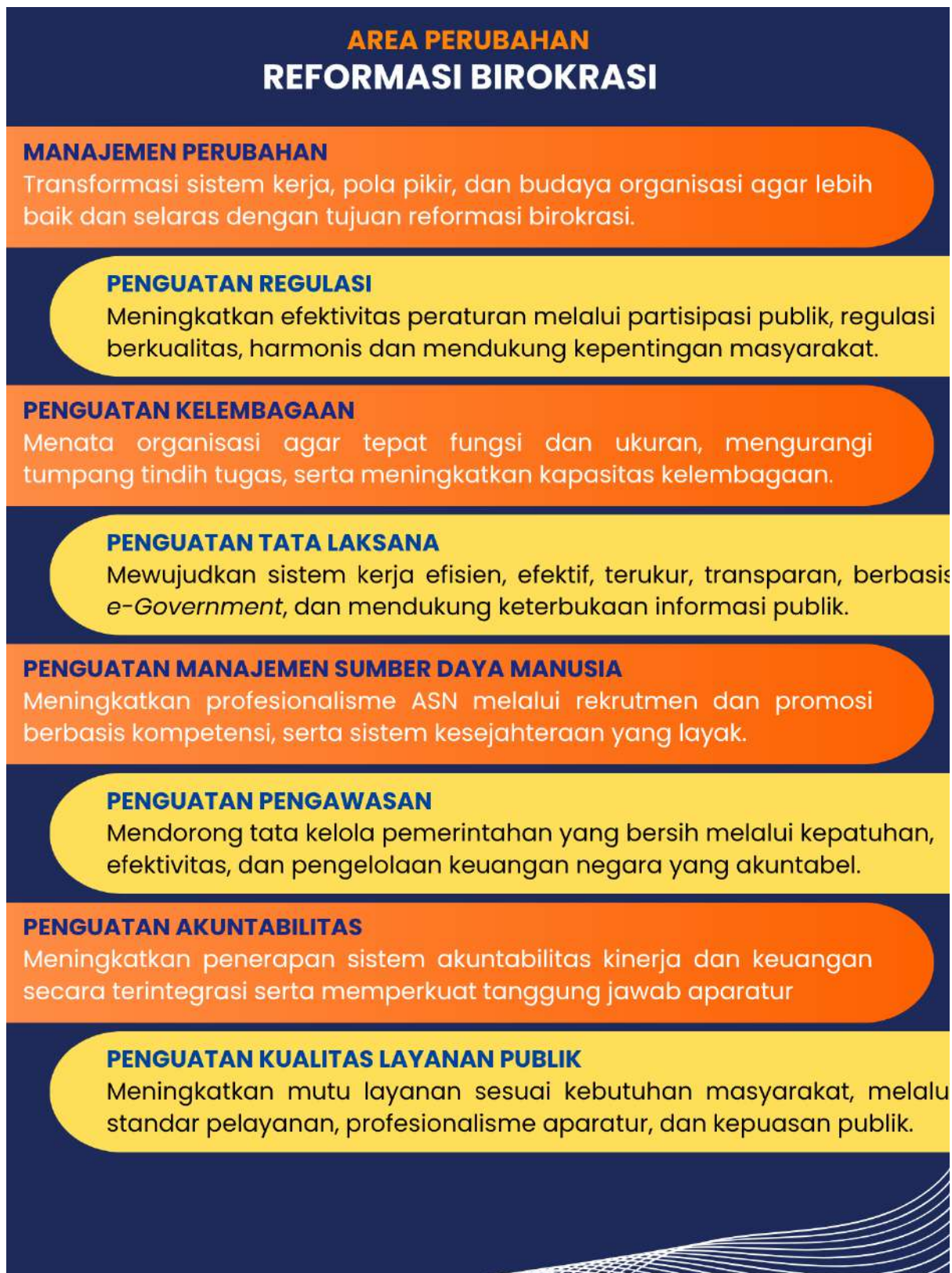
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Reformasi Birokrasi menjadi satu mandat yang harus dilaksanakan di semua lembaga publik yang dimandatkan dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain sebagai respons terhadap tuntutan perbaikan kinerja birokrasi, reformasi birokrasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing bangsa. Di era globalisasi dan transformasi digital, keberhasilan suatu negara juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan publik. Reformasi birokrasi menjadi bagian integral dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sehingga, reformasi birokrasi juga menjadi penopang keberhasilan transformasi kelembagaan, termasuk pada institusi pendidikan tinggi seperti UPN "Veteran" Yogyakarta. Birokrasi yang baik akan mendorong terciptanya ekosistem akademik yang sehat, mendukung kualitas tridharma, mempercepat proses internasionalisasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Keterkaitan antara kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga dengan akreditasi institusi maupun reputasi global menjadikan reformasi birokrasi bukan hanya keharusan administratif, tetapi juga strategi pengembangan institusi. Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi akan memberikan dampak luas tidak hanya bagi aparatur dan internal organisasi, tetapi juga bagi pengguna layanan, dunia usaha, dan mitra internasional.

Langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja pemerintahan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan, WBBM adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 12.
Area Perubahan Reformasi Birokrasi

B. Kondisi Saat Ini

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi secara sistematis, melembaga dan berkelanjutan telah dimulai sejak tahun 2017 dengan diterbitkannya Roadmap Reformasi Birokrasi 2017–2019 yang juga terintegrasi dalam Rencana Strategis 2015–2019 sebagai bagian dari pelaksanaan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UPN “Veteran” Yogyakarta 2015–2039. Pada tahap kedua RPJP, melalui Renstra 2020–2024, UPN “Veteran” Yogyakarta melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengusung *Quick Wins* berupa sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien. Memasuki tahap ketiga RPJP yaitu melalui Renstra 2025–2029, UPN “Veteran” Yogyakarta berkomitmen untuk memperkuat reformasi birokrasi melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit pelaksana reformasi. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan terpantau secara berkelanjutan telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diketuai oleh Kepala Biro PKU, serta bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang PKU.

Sebagai bentuk implementasi nyata, UPN “Veteran” Yogyakarta secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta telah memulai pembangunan Zona Integritas di tingkat fakultas sejak tahun 2023, diawali oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salah satu capaian penting pada periode 2017–2024 adalah digunakannya sistem informasi terintegrasi dalam mendukung layanan Tridharma Perguruan Tinggi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Sejak tahun 2015, universitas telah mengikuti proses penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Namun, baru pada tahun 2020 UPN “Veteran” Yogyakarta mulai memperoleh kualifikasi dalam kategori tersebut. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 9/KEP/KIP/X/2020, UPN “Veteran” Yogyakarta dikategorikan sebagai institusi tidak informatif. Kemudian pada tahun 2021, melalui Keputusan Nomor 10/KEP/KIP/X/2021, kualifikasinya meningkat menjadi kurang informatif. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024 yaitu mencapai kualifikasi informatif pada tahun 2024, sehingga menjadi salah satu fokus perbaikan pada periode berikutnya.

Pada periode 2024–2025, pelaksanaan reformasi birokrasi akan difokuskan pada pembangunan Zona Integritas di seluruh fakultas serta mendorong pencapaian predikat WBK/WBBM melalui penguatan ekosistem pendukung. Fokus ini menjadi penting mengingat hingga saat ini belum ada satu pun fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang memperoleh predikat ZI WBK/WBBM secara penuh dengan memenuhi enam aspek pengungkit pembangunan zona integritas. Salah satu elemen kunci dalam pembangunan ekosistem tersebut adalah pengembangan sistem yang mendukung pencapaian ZI WBK dan WBBM secara efektif dan efisien. Sistem tersebut antara lain meliputi: Sistem Anti Gratifikasi, *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, standar pelayanan serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan.

Seluruh hasil evaluasi menjadi dasar dalam penetapan prioritas pembangunan reformasi birokrasi periode 2025–2029. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola yang bersih, melayani, dan akuntabel sebagai bagian dari transformasi menuju *Good University Governance*.

C. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi

Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi mengacu pada hasil evaluasi pembangunan Refomasi Birokrasi di UPN “Veteran” Yogyakarta, maka prioritas Reformasi Birokrasi tahun 2029 adalah pembangunan tiga pilar utama dalam mendukung penguatan 8 area perubahan. Prioritas utama tahunan dapat dilihat dari kotak berwarna yang mengisyaratkan bahwa pada tahun bersangkutan, prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi ada pada elemen elemen area perubahan terkait.

Tabel 10.
Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi

| Bidang Penguatan | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Manajemen Perubahan | | | | | |
| 2 | Deregulasi Perundangan | | | | | |
| 3 | Penguatan Kelembagaan/ Organisasi | | | | | |
| 4 | Penguatan Tata Laksana | | | | | |
| 5 | Penguatan Manajemen SDM | | | | | |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | | | | | |
| 7 | Penguatan Pengawasan | | | | | |
| 8 | Penguatan Area Pelayanan Publik | | | | | |
| 9 | Quick Wins/Sistem Informasi Terintegrasi bidang akademik dan non akademik | | | | | |

Target Kinerja Reformasi Birokrasi UPN “Veteran” Yogyakarta didasarkan pada capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Target yang diharapkan adalah diperolehnya nilai reformasi birokrasi yang meningkat secara konsisten serta diraihinya predikat ZI WBK/WBBM bagi unit (fakultas) di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta. Selain itu, reformasi birokrasi juga diarahkan untuk memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Upaya ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju birokrasi perguruan tinggi yang profesional dan berdaya saing.

Tabel 11.
Pembangunan ZI/WBK/WBBM

| Komponen Penilaian | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Nilai Total Reformasi Birokrasi | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 |
| a | Manajemen Perubahan | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| b | Deregulasi Perundangan | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| c | Penguatan Kelembagaan/ Organisasi | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| d | Penguatan Tata Laksana | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| e | Penguatan Manajemen SDM | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| f | Penguatan Akuntabilitas | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| g | Penguatan Pengawasan | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| h | Penguatan Area Pelayanan Publik | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 2 | Unit peraih ZI/WBK/WBBM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sedangkan, Target pembangunan Reformasi Birokrasi UPN “Veteran” Yogyakarta dari aspek pengembangan sistem disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12.
Prioritas Penguatan Instrumen Reformasi Birokrasi (RB)

| Bidang Penguatan/Instrumen Reformasi Birokrasi | | Ada/ belum ada | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Manajemen Perubahan | | | | | | |
| | a. Tim RB | Ada | | | | | |
| | b. Road Map RB | Ada | | | | | |
| | b. Pemantauan dan Evaluasi RB | Ada | | | | | |
| | c. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | Ada | | | | | |
| 2 | Deregulasi Perundangan | | | | | | |
| | a. Harmonisasi | Sudah | | | | | |
| | b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan UU | Sudah | | | | | |
| 3 | Penguatan Kelembagaan/ Organisasi | | | | | | |
| | a. Penataan Organisasi | Internalisasi | | | | | |
| | b. Evaluasi Kelembagaan | Sudah | | | | | |
| | c. Tindak Lanjut Evaluasi | Sudah | | | | | |
| 4 | Penguatan Tatalaksana | | | | | | |
| | a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional (SOP) | Proses Pembaharuan | | | | | |
| | b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Ada tapi belum menyeluruh | | | | | |
| 5 | Penguatan SDM | | | | | | |
| | a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan organisasi | Ada | | | | | |
| | b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN | Ada | | | | | |
| | c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | Ada | | | | | |
| | d. Promosi jabatan secara terbuka | Ada | | | | | |
| | e. Penetapan kinerja individu | Ada | | | | | |
| | f. Penegakkan aturan disiplin / kode etika /perilaku pegawai | Ada | | | | | |
| | g. Pelaksanaan evaluasi jabatan | Dalam proses | | | | | |
| | h. Sistem Informasi Kepegawaian | Ada dan Pengembangan | | | | | |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | | | | | | |
| | a. Keterlibatan Pimpinan | Ada | | | | | |
| | b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja | Ada | | | | | |
| 7 | Penguatan Pengawasan | | | | | | |
| | a. Sistem Anti Gratifikasi | Belum ada | | | | | |
| | b. Penerapan SPI | Ada | | | | | |
| | c. Sistem Pengaduan masyarakat | Ada | | | | | |

| Bidang Penguatan/Instrumen Reformasi Birokrasi | | Ada/ belum ada | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|---------------------------|------|------|------|------|------|
| d. | <i>Whistleblowing System</i> | Belum ada | | | | | |
| e. | Penanganan benturan kepentingan | Belum ada | | | | | |
| f. | Pembangunan Zona Integritas | Ada | | | | | |
| g. | Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) | Ada | | | | | |
| h. | Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | Ada | | | | | |
| 8 | Penguatan Area Pelayanan Publik | | | | | | |
| a. | Standar pelayanan | Ada | | | | | |
| b. | Budaya pelayanan prima | Ada tapi belum Optimal | | | | | |
| c. | Pengelolaan pengaduan | Ada | | | | | |
| d. | Penilaian kepuasan pelayanan | Ada | | | | | |
| e. | Pemanfaatan TI | Ada | | | | | |
| 9 | Quick Wins | | | | | | |
| | Sistem Informasi Terintegrasi Akademik dan Non Akademik | Ada tapi belum menyeluruh | | | | | |

3.5. Manajemen Risiko

Berdasarkan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015, Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko. Pemenuhan kewajiban manajemen risiko di UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk menjamin tercapainya tata kelola yang baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Kewajiban ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, termasuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 - PMK No. 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko, serta
 - PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
2. Menjamin pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, secara efektif dan berkelanjutan.
3. Mengantisipasi dinamika perubahan, terutama dalam menghadapi perubahan status kelembagaan dan pengelolaan, seperti transisi menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
4. Mendukung persiapan akreditasi, baik akreditasi institusi maupun program studi, yang mensyaratkan tata kelola risiko yang terdokumentasi, terukur, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan mutu.

Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, UPN “Veteran” Yogyakarta diharapkan mampu memitigasi berbagai potensi ancaman, memanfaatkan peluang secara optimal, serta menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja institusi. Manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Proses manajemen risiko mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dilakukan secara sistematis, mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis, evaluasi, penanganan, hingga monitoring dan reviu, serta komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini risiko-risiko potensial serta merancang respons yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.



1. Identifikasi Risiko

Merupakan tahap awal untuk mengenali semua potensi risiko yang dapat menghambat, menurunkan, atau menunda pencapaian sasaran unit. Identifikasi dilakukan melalui penelaahan terhadap lokasi, waktu, penyebab, dan proses terjadinya risiko.

2. Analisis Risiko

Bertujuan menyusun profil dan peta risiko melalui penilaian tingkat pengendalian yang tersedia, serta analisis kemungkinan (frekuensi) dan dampak (konsekuensi) dari setiap risiko, guna memperoleh pemahaman komprehensif atas ancaman yang dihadapi.

3. Evaluasi Risiko

Proses ini menentukan prioritas risiko yang telah dianalisis, agar pemilik risiko (Unit Pemilik Risiko/UPR) dapat menetapkan kebutuhan penanganan lebih lanjut serta menyusun prioritas penanganannya secara tepat.

4. Penanganan Risiko

Dilakukan dengan memilih opsi yang paling efektif dan efisien dari berbagai strategi penanganan yang tersedia, seperti: mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampaknya, menghindari, menerima, atau mengalihkan risiko. Setiap pilihan ditindaklanjuti dengan rencana mitigasi yang terukur.

5. Monitoring dan Reviu

Bertujuan memastikan efektivitas penanganan risiko dengan memantau perubahan dalam konteks organisasi, profil risiko, serta efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. Proses ini dilakukan secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

6. Komunikasi dan Konsultasi

Menjadi proses yang melekat dalam seluruh tahapan manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan membangun pemahaman yang sama di antara pemangku kepentingan internal maupun eksternal, sehingga setiap pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

7. Tanggung Jawab Manajemen Risiko

Pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab para Pemilik Risiko yang didukung oleh Koordinator dan Administrator Manajemen Risiko, serta tim yang terdiri dari pejabat atau pegawai yang memahami proses bisnis pada unit kerja masing-masing. Seluruh pelaksanaan proses manajemen risiko harus terdokumentasi sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen risiko berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan tujuan strategis institusi, maka diperlukan suatu **desain manajemen risiko** yang jelas dan terstruktur. Desain ini menjadi fondasi dalam membangun kerangka kerja manajemen risiko yang menyeluruh, mulai dari perumusan kebijakan, penetapan struktur tanggung jawab, hingga pengintegrasian proses risiko ke dalam sistem manajemen organisasi. Desain yang baik akan memastikan bahwa setiap unit kerja memahami perannya dalam mengelola risiko serta mampu mengambil tindakan yang tepat dan terkoordinasi dalam menghadapi ketidakpastian yang berdampak pada pencapaian sasaran organisasi.

Tabel 13.
Desain Manajemen Risiko

| Informasi Desain Manajemen Risiko | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------|----------------|-------|---------------------|----------|----------|----------------------|
| No. | Tahap Proses MR | DEWAS | Rektor | Wakil Rektor/ | Kepala Unit MR | Dekan | Unit kerja Fakultas | | | External stakeholder |
| | | | | | | | Bidang 1 | Bidang 2 | Bidang 3 | |
| 1 | Persiapan | I | | A | R/C | R | I | I | I | |
| 2 | Komunikasi & Konsultasi | I | I | A | R/C | R | C | C | C | I |
| 3 | Menentukan konteks | I | A | C | R/C | R | C | C | C | I |
| 4 | Penilaian risiko : | I | | | | | | | | |
| | Identifikasi risiko | I | C | A | C | R | R/C | R/C | R/C | |
| | Analisis risiko | I | C | A | C | R | R/C | R/C | R/C | |
| | Evaluasi risiko | I | C | A | C | R | R/C | R/C | R/C | |
| 5 | Perlakuan risiko | I | C | A | R/C | R | R/C | R/C | R/C | C/I |
| 6 | Monev | I | R | A | R/C | R | C | C | C | I |
| 7 | Pelaporan | C | C | A | C | R | C | C | C | |

Keterangan:

R (Responsible) : Siapa yang mengejarkan

A (Accountable) : Siapa yang membuat keputusan terakhir "Ya/Tidak"

C (Consulted) : Siapa yang diajak konsultasi sebelum kegiatan dilakukan

I (Informed) : Siapa yang harus diberi informasi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab IV membahas mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029. Target kinerja dirumuskan secara terukur dan realistis untuk setiap tujuan dan sasaran strategis, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja universitas. Sementara itu, kerangka pendanaan disusun untuk menggambarkan proyeksi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan guna mendukung pencapaian target tersebut, baik yang bersumber dari APBN, pendapatan BLU, maupun sumber pendanaan lainnya.

4.1.

Target Kinerja

4.2.

Kerangka Pendanaan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPN “Veteran” Yogyakarta serta mendukung capaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, penetapan target kinerja pada periode 2025–2029 disusun secara terukur dan berkelanjutan. Target kinerja ini mengacu pada capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai baseline, yang menjadi titik awal evaluasi dan dasar perencanaan peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak hanya realistis dan dapat dicapai, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi untuk terus melakukan perbaikan dan akselerasi kinerja di semua bidang, sejalan dengan arah pengembangan menuju perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global.

Tabel 14.
Target Kinerja 2025-2029

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|--------|------------------|-------|------|------|------|------|
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lulusan | | | | | | | | |
| 1 | IKU-1.1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dalam waktu 6 bulan setelah wisuda. | % | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 80 |
| 2 | IKU-1.2. Persentase (%) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. | % | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| 3 | IKT-1.1. Jumlah prodi baru pada program S1, S2 dan S3, serta program profesi yang dibuka | Jumlah | 0 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 4 | IKT-1.2. Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | Indeks | 3.5 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 3.58 | 3.6 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen | | | | | | | | |
| 1 | IKU-2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | % | 32.35 | 32.35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 2 | IKU-2.2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | % | 31.15 | 31.15 | 35 | 37 | 40 | 45 |
| 3 | IKU-2.3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen | Indeks | 1.93 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 4 | IKT-2.1. Persentase kualifikasi pendidikan S3 dan jabatan fungsional dosen | % S3 | 35 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| | | % GB | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | | % LK | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | | |
| 1 | IKU-3.1. Indeks program studi S1 dan D4/D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | Indeks | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | IKU-3.2. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | % | 59.81 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 3 | IKU-3.3. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 4 | IKT-3.1. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | IKT-3.2. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang akreditasi Unggul | % | 21 | 45 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola Kelembagaan | | | | | | | | |
| 1 | IKU-4.1. Predikat SAKIP | Nilai | A (81,1) | A (83) | A (85) | A (87) | A (89) | AA (91) |
| 2 | IKU-4.2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | Nilai | 79 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 3 | IKU-4.3. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | % | 50 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| 4 | IKT 4.1. Status opini laporan keuangan oleh akuntan publik | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | IKT 4.2. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (EBITDA) | Rasio | 3 | 3 | 3,1 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
| 6 | IKT 4.3. Jumlah pendapatan operasional | Jumlah | 197 M | 210 M | 212 M | 215 M | 218 M | 220 M |
| 7 | IKT 4.4. Jumlah pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset | Jumlah | 5,5 M | 5,7 M | 6 M | 7 M | 8 M | 9 M |
| 8 | IKT 4.5. Jumlah pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama | Jumlah | 2,6 M | 10 M | 10,5 M | 11 M | 11,5 M | 12 M |
| 9 | IKT 4.6. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU | % | 84 | 84 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 10 | IKT 4.7. Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU | Indeks | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 11 | IKT 4.8. Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | Indeks | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 12 | IKT 4.9. Nilai <i>self maturity rating</i> | Nilai | 2.25 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| 13 | IKT 4.10. Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Kualifikasi | Belum Informatif | Menuju Informatif (85) | Informatif (90) | Informatif (92) | Informatif (94) | Informatif (95) |
| 14 | IKT 4.11. Indeks kepuasan pemangku kepentingan | Indeks | 78.93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 15 | IKT 4.12. Capaian standar pelayanan minimum setiap unit sesuai tugas fungsinya | % | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 16 | IKT 4.13. Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | IKT 4.14. Persentase integrasi sistem informasi dan komunikasi antar bidang akademik dan non akademik | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | IKT 4.15. Ranking <i>webometric</i> | Ranking Nasional | 92 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 19 | IKT 4.16. Persentase ketercapaian target peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 20 | IKT 4.17. Terwujudnya status kelembagaan PT sebagai PTNBH | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 21 | IKT 4.18. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | % | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 22 | IKT 4.19. Indeks sikap dan perilaku bela negara pegawai | Indeks | 3.55 | 3.57 | 3.59 | 3.61 | 3.63 | 3.64 |
| 23 | IKT 4.20. Status akreditasi institusi | Akreditasi | B | B | Akreditasi | Akreditasi | Akreditasi | Akreditasi |

4.2. Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan

Rencana Strategis UPN “Veteran” Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh IKU dan IKK tersebut kemudian dijadikan sebagai target kinerja bagi seluruh unit pelaksana, mulai dari UPT, lembaga, fakultas, hingga jurusan dan program studi. Untuk mencapai target tersebut, setiap unit menyusun program dan kegiatan tahunan yang dirancang berdasarkan rencana kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan. Hal ini bertujuan agar seluruh program yang telah dirancang dapat terlaksana secara optimal. Proyeksi pendapatan dan anggaran belanja tersebut kemudian diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memperoleh persetujuan yang selanjutnya dituangkan dalam anggaran belanja melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam bentuk Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKK SK).

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), seluruh pendapatan UPN “Veteran” Yogyakarta tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/BLU). Dari sisi pengelolaan aset, seluruh aset yang diperoleh melalui aktivitas usaha PTN PK-BLU menjadi milik negara dan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), termasuk di dalamnya aset berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari sumber APBN. Proyeksi pendapatan tersebut disajikan lebih lanjut dalam bentuk tabel sesuai dengan akun masing-masing.

Tabel 15.
Proyeksi Pendapatan

| NO | KODE AKUN | NAMA AKUN | TAHUN | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 424112 | Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 180.281.793.000 | 191.039.140.000 | 200.591.097.000 | 210.620.652.000 | 221.151.684.000 |
| 2 | 424119 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 527.500.000 | - | - | - | - |
| 3 | 424312 | Pendapatan Hasil Kerja sama Lembaga/ Badan Usaha | 3.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.625.000.000 | 2.756.250.000 | 2.894.063.000 |
| 4 | 424911 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU | 4.950.000.000 | 3.600.000.000 | 2.700.000.000 | 2.565.000.000 | 2.693.250.000 |
| 5 | 424919 | Pendapatan Lain-Lain BLU | - | 873.672.000 | 1.310.508.000 | 1.376.033.000 | 1.444.835.000 |
| 6 | 424921 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah | 438.800.000 | 650.100.000 | 695.607.000 | 730.387.000 | 766.907.000 |
| 7 | 424922 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | 747.907.000 | 1.219.858.000 | 1.280.851.000 | 1.344.893.000 | 1.412.138.000 |
| 8 | 424923 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan | 51.000.000 | 45.500.000 | 47.775.000 | 50.164.000 | 52.672.000 |
| 9 | 424924 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | 3.000.000 | 96.730.000 | 101.567.000 | 106.645.000 | 111.977.000 |
| JUMLAH TPNPB BLU | | | 190.500.000.000 | 200.025.000.000 | 209.352.405.000 | 219.550.024.000 | 230.527.526.000 |
| | | Asumsi Pendapatan RM | 209.710.671.000 | 211.807.778.000 | 211.807.778.000 | 222.398.166.400 | 166.171.714.000 |
| | | Asumsi Penggunaan Saldo Awal | 146.000.000.000 | 68.400.387.000 | 40.000.000.000 | 20.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | 546.210.671.000 | 480.233.165.000 | 461.160.183.000 | 461.948.190.400 | 411.699.240.000 |

Proyeksi Belanja

Rencana Anggaran dan Kegiatan Tahunan (RKT) UPN “Veteran” Yogyakarta disusun pada tahun anggaran sebelumnya dan diajukan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memperoleh persetujuan serta penerbitan DIPA. Dalam penyusunan proyeksi belanja, terdapat dua aspek penting yang diperhatikan, yaitu asumsi makro dan asumsi mikro. Asumsi makro mencakup indikator ekonomi nasional seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, suku bunga SBI, dan suku bunga pinjaman. Sementara itu,

asumsi mikro mencakup kebijakan akuntansi, subsidi dari pemerintah, tarif layanan, volume layanan, serta rencana pengembangan layanan. Berdasarkan kedua asumsi tersebut, proyeksi anggaran disusun secara sistematis melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Menghitung realisasi belanja pada tahun sebelumnya (t-1) dan tahun berjalan (t);
2. Membandingkan target dan realisasi anggaran dari tahun (t-1) hingga (t-n);
3. Mengukur tren realisasi belanja dari tahun-tahun sebelumnya;
4. Menganalisis selisih antara realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya; serta
5. Menghitung proyeksi anggaran untuk tahun berikutnya (t+1). Proses ini memastikan proyeksi belanja disusun secara objektif dan berbasis data historis serta tren kinerja keuangan institusi.

Tabel 16.
Kerangka Pendanaan

| SASARAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 377.969.517.322 | 525.255.671.000 | 480.233.165.000 | 384.144.474.000 | 375.853.796.000 | 388.646.487.000 |
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lulusan | 47.601.351.100 | 66.129.689.000 | 60.461.355.000 | 48.363.789.000 | 47.319.993.000 | 48.930.593.000 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen | 37.684.874.282 | 52.367.990.000 | 47.879.247.000 | 38.299.204.000 | 37.472.623.000 | 38.748.055.000 |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 74.747.797.197 | 103.895.572.000 | 94.990.120.000 | 75.983.777.000 | 74.343.881.000 | 76.874.275.000 |
| Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan organisasi | 217.935.494.743 | 302.862.420.000 | 276.902.443.000 | 221.497.704.000 | 216.717.299.000 | 224.093.564.000 |

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan UPN “Veteran” Yogyakarta tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan UPN “Veteran” Yogyakarta tahun 2025-2029 pada bagian akhir dokumen ini.



BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat simpulan umum dari keseluruhan Rencana Strategis UPN "Veteran" Yogyakarta Tahun 2025–2029 serta menegaskan kembali komitmen institusi dalam menjalankan seluruh program strategis dan kebijakan yang telah dirumuskan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Bab ini juga menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjadi landasan implementasi Renstra, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, serta penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan kebijakan nasional



BAB V PENUTUP

Renstra ini disusun melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap teknokratik, tahap partisipatif, dan tahap politik. Tahap teknokratik adalah proses penyusunan draft renstra oleh Tim yang dibentuk Rektor, yang dasar penyusunan telah disebutkan di atas. Tahap partisipatif adalah proses dimana hasil kerja Tim berbentuk draft Renstra disampaikan kepada para pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk mendapatkan masukan dan saran dalam melengkapi draft yang telah disiapkan Tim. Tahap politik adalah proses pengambilan keputusan oleh Rektor, yang sebelumnya didahului dengan pembahasan dengan organ UPN "Veteran" Yogyakarta seperti Organ Pimpinan Universitas, Organ Senat Akademik, Organ Dewan Pertimbangan, dan sebagai PTN PK-BLU dengan Organ Dewan Pengawas.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 merupakan **periode ketiga** RPJP UPN "Veteran" Yogyakarta periode 2015-2039. Renstra 2025-2029 diarahkan agar proses penguatan kelembagaan sebagai PTN PK-BLU menuju *World Class University* dapat berjalan lancar. Secara umum sasaran strategis UPN "Veteran" Yogyakarta dalam Renstra 2025-2029 dibagi ke dalam dua indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Sasaran strategi UPN "Veteran" Yogyakarta terdiri dari 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi,
2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi,
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, serta
4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Renstra 2025-2029 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan serta unit-unit yang ada di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta seperti Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Penunjang Akademik (UPA). Semua rencana universitas dan unit yang belum sesuai dengan rencana strategis ini perlu diselaraskan. Apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang mengakibatkan lahirnya kendala besar dalam implementasi Renstra, maka pimpinan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan.

Renstra UPN "Veteran" Yogyakarta Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai landasan oleh unit-unit Kerja di lingkungan Universitas (Fakultas, Lembaga, Biro dan UPA) dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan lima tahunan dan rencana pengembangan dua puluh lima tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis UPN "Veteran" Yogyakarta Tahun 2025-2029 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rektor dan jajaran pimpinan di tingkat universitas dan fakultas serta unit-unit di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini dengan penuh tanggung jawab;

2. Rektor dan Wakil Rektor, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Rektor berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra sesuai tugas dan fungsinya;
4. Setiap Fakultas, Lembaga, Biro dan UPA di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta berkewajiban untuk menjabarkan Renstra ke dalam dokumen perencanaan masing-masing unit, baik jangka menengah (Renstra Unit) maupun menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra, Rektor dan para Wakil Rektor berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Fakultas, Lembaga Biro dan UPT dalam perumusan rencana kerja masing-masing;
6. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, Rektor wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI);
7. Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.
8. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis secara umum bertujuan untuk mengevaluasi kinerja rencana strategis dalam menunjang pencapaian kinerja UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan yang direncanakan. Secara khusus monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi perubahan dasar-dasar perumusan rencana strategis, relevansi rencana strategis, kinerja terhadap sasaran yang sudah ditetapkan, melakukan tindakan korektif untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana.
9. Monitoring dan evaluasi didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kesesuaian, konsistensi, kelayakan dan keunggulan. Kesesuaian dan keunggulan didasarkan pada penilaian terhadap lingkungan eksternal, sedangkan konsistensi dan kelayakan didasarkan pada penilaian terhadap internal. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu: evaluasi terhadap dasar-dasar dari rencana strategis, yaitu analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal, membandingkan sasaran hasil yang diharapkan dengan pencapaian sasaran yang telah dicapai, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.
10. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap tahun dan berkesinambungan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan inisiatif dari Rektor beserta jajaran pimpinan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi ini (selain LAKIN) menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Matriks Kinerja

Lampiran 2

Matriks Pendanaan

Lampiran 3

Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
|---|---|------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lulusan | | | | | | | | | | | |
| 1 | IKU-1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dalam waktu 6 bulan setelah wisuda. | | % | 58 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | | |
| 1.1. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lulusan yang berdaya saing global dan dilandasi bela negara | | | | | | | | | | | |
| a | Mendapat pekerjaan | IK-1 | Jumlah lulusan yang langsung bekerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus | % | 43 | 43 | 48 | 55 | 57 | 60 | |
| b | Melanjutkan studi | IK-2 | Jumlah lulusan yang studi lanjut dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| c | Menjadi wiraswasta | IK-3 | Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus | % | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | |
| | | IK-4 | IPK Lulusan: | Rerata | | | | | | | |
| | | | | | a. Program Diploma | 3,55 | 3,56 | 3,57 | 3,58 | 3,59 | 3,6 |
| | | | | | b. Program Sarjana | 3,55 | 3,56 | 3,57 | 3,58 | 3,59 | 3,6 |
| | | | | | c. Program Magister | 3,77 | 3,78 | 3,79 | 3,8 | 3,81 | 3,82 |
| | | IK-5 | Lama Studi Lulusan: | Rerata Tahun, Bulan | | | | | | | |
| | | | | | a. Program Diploma | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3 |
| | | | | | b. Program Sarjana | 4,10 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4 |
| | | | | | c. Program Magister | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2 |
| | | IK-6 | Lulusan Tepat Waktu : | % | | | | | | | |
| | | | | | a. Program Diploma | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| | | | | | b. Program Sarjana | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| | | | | | c. Program Magister | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| | | IK-7 | Lulusan Bersertifikat Kompetensi | % | | | | | | | |
| d. Program Doktor | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| IK-8 | Nilai Skor EPT Lulusan (setara toefl 450) | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | | | |
| IK-9 | Organisasi Kemahasiswaan berkinerja baik | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|--|-------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | IKU-1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi | | % | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | |
| 2.1. Program Prioritas: Pengembangan Proses Pembelajaran di Luar Program Studi | | | | | | | | | | |
| a | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi | IK-10 | Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (Program Internal dan Eksternal) | Jumlah | 3.761 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | | IK-11 | jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa | Jumlah | 17 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | | IK-12 | Rasio Pendaftar dan yang lulus seleksi | Rasio | 13,30 % | 12% | 12% | 11% | 11% | 10% |
| | | IK-13 | Rasio yang daftar ulang dan yang lulus seleksi | Rasio | 84% | 85% | 85% | 88% | 88% | 90% |
| | | IK-14 | Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun | Jumlah | 10.952.400 | 11.000.000 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
| 2.2. Program Prioritas: Pengembangan Proses Pembelajaran di Luar Program Studi | | | | | | | | | | |
| a | Mahasiswa meraih prestasi | IK-15 | Jumlah Mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional (lomba dan non lomba) | Jumlah | 141 | 145 | 150 | 160 | 170 | 190 |
| | | IK-16 | Jumlah Mahasiswa meraih prestasi tingkat internasional (lomba dan non lomba) | Jumlah | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| | | IK-17 | Persentase mahasiswa S1 dan D3 kelompok UKT I dan II | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | IK-18 | Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi | Jumlah | 700 | 730 | 750 | 770 | 780 | 800 |
| 2.3. Program Prioritas: Peningkatan Jumlah Mahasiswa Asing di UPNVY | | | | | | | | | | |
| a | Mahasiswa Asing Non Student Exchange | IK-19 | Jumlah Mahasiswa Asing Non Student Exchange | Jumlah | 250 | 253 | 255 | 260 | 260 | 265 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-------------------|---|--------|------------------|------|------|------|------|------|
| 3 | IKT-1.1. Jumlah Program Studi S1, S2, S3 dan Program Profesi baru yang dibuka | | | Jumlah | 0 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 3.1. Program Prioritas: Pengembangan Program Studi Baru untuk program S1, S2 dan S3 | | | | | | | | | | |
| a | Program Prodi Baru yang dibentuk | IK-20 | Jumlah Prodi S1 | Jumlah | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | IK-21 | Jumlah Prodi S2 | Jumlah | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | IK-22 | Jumlah Prodi S3 | Jumlah | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | IK-23 | Jumlah Program Profesi | Jumlah | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IKT-1.2. Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | | | Indeks | 3,5 | 3,52 | 3,54 | 3,56 | 3,58 | 3,6 |
| 4.1. Program Prioritas: Peningkatan Sikap dan Perilaku Bela Negara Mahasiswa | | | | | | | | | | |
| a | Sikap dan Perilaku Bela Negara Mahasiswa | IK-24 | Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | Indeks | 3,5 | 3,52 | 3,54 | 3,56 | 3,58 | 3,6 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen | | | | | | | | | | |
| 1 | IKU-2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | | | % | 32,35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 1.1. Program Prioritas: Pengembangan kuantitas dan kualitas dosen dalam berkegiatan tridharma di luar kampus | | | | | | | | | | |
| a | Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain | IK-25 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain | Jumlah | 28 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| b | Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri | IK-26 | Jumlah Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri | Jumlah | 92 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| c | Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | IK-27 | Jumlah dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | Jumlah | 161 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 |
| 2 | IKU-2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | | | % | 21,02 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 |
| 2.1. Program Prioritas: Pengembangan kompetensi dosen internal dan peningkatan dosen luar yang berasal dari praktisi/dosen dari luar negeri | | | | | | | | | | |
| a | Dosen memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja | IK-28 | Jumlah Dosen memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja | Jumlah | 136 | 147 | 157 | 179 | 183 | 195 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|-------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b | Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja | IK-29 | Jumlah Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja (dalam dan Luar Negeri) | Jumlah | 2 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| 3 | IKU-2.3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri per jumlah dosen | | | Indeks | 1,93 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| 3.1. Program Prioritas: peningkatan kualitas luaran penelitian yang bereputasi internasional | | | | | | | | | | |
| a | Luaran penelitian dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional | IK-30 | Jumlah Karya Tulis Ilmiah | Jumlah | 228 | 250 | 275 | 280 | 290 | 300 |
| | | IK-31 | Jumlah Karya Terapan | Jumlah | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| | | IK-32 | Jumlah Karya Seni | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | IK-33 | Jumlah publikasi internasional | Jumlah | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 300 |
| | | IK-34 | Jumlah sitasi karya ilmiah | Jumlah | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | IK-35 | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | Jumlah | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 300 |
| | Jumlah pendanaan penelitian | IK-36 | Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri | Jumlah | 10 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | | IK-37 | Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri di luar UPNVY | Jumlah | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| | | IK-38 | Jumlah penelitian dengan biaya UPNVY | Jumlah | 254 | 128 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| | | IK-39 | Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap per tahun | Jumlah | Rp 13.329.040.000 | Rp 8.048.860.000 | Rp 10.000.000.000 | Rp 12.000.000.000 | Rp 13.000.000.000 | Rp 14.000.000.000 |
| | | IK-40 | Persentase dana Penelitian dari total dana PT | % | 2,96 | 2,18 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 3.2. Program Prioritas: peningkatan tata kelola jurnal terindeks SINTA dan Global | | | | | | | | | | |
| a | Jurnal terindeks SINTA dan Global | IK-41 | Jumlah Jurnal terindeks Sinta | Jumlah | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | IK-42 | Jumlah Jurnal Terindeks Global | Jumlah | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3. Program Prioritas: peningkatan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan di masyarakat | | | | | | | | | | |
| a | Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh masyarakat/ industri | IK-43 | Jumlah Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh masyarakat | Jumlah | 47 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
| | | IK-44 | Jumlah Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh lembaga pemerintah | Jumlah | 42 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|-------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | IK-45 | Jumlah Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh dunia usaha dunia industri (DUDI) | Jumlah | 29 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| | | IK-46 | Jumlah PkM dengan biaya luar negeri | Jumlah | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| | | IK-47 | Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri di luar UPNVY | Jumlah | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| | | IK-48 | Jumlah PkM dengan biaya UPNVY | Jumlah | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | IK-49 | Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap per tahun | Jumlah | Rp 1.600.000.000 | Rp 2.400.000.000 | Rp 2.500.000.000 | Rp 2.600.000.000 | Rp 2.700.000.000 | Rp 2.800.000.000 |
| | | IK-50 | Persentase dana PkM dari total dana PT | % | 0,35 | 0,64 | 0,70 | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | IKT-2.1 Persentase dosen yang berkualifikasi pendidikan S3, Jabatan Fungsional guru besar dan Lektor Kepala | | | %S3 | 35 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| | | | | %GB | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | | | | %LK | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 |
| 4.1. Program Prioritas: Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan jabatan fungsional dosen | | | | | | | | | | |
| a | Dosen yang berkualifikasi pendidikan S3, Jabatan Fungsional guru besar dan Lektor Kepala | IK-51 | Persentase Dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | % | 35 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| | | IK-52 | Persentase Dosen dengan jabatan fungsional guru besar | % | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | | IK-53 | Persentase Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala | % | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 |
| b | Rasio dosen | IK-54 | Rasio dosen tetap dengan jumlah prodi/jurusan | Rasio | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:17 |
| | | IK-55 | Rasio dosen tidak tetap dengan dosen tetap | Rasio | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 |
| | | IK-56 | Rasio dosen dengan jumlah mahasiswa | Rasio | 01:37 | 01:37 | 01:37 | 01:35 | 01:35 | 01:35 |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | | | | |
| 1 | IKU-3.1 Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2 | | | Indeks | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| 1.1. Program Prioritas: Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | |
| a | Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | IK-57 | Jumlah pelaksanaan kerjasama prodi dengan mitra di dalam negeri | Jumlah | 30 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 |
| | | IK-58 | Jumlah pelaksanaan kerjasama prodi dengan mitra di luar negeri | Jumlah | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|--|-------|--|---------------|-------|------|------|------|------|----|
| 2 | IKU-3.2 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | | % | 59,81 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | |
| 2.1. Program Prioritas: Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis kasus/proyek | | | | | | | | | | |
| a | Metode pembelajaran mata kuliah S1 dan Diploma berbasis kasus atau proyek | IK-59 | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 29,81 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 |
| | | IK-60 | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
| 3 | IKU-3.3 Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah | | % | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 3.1. Program Prioritas: Peningkatan akreditasi internasional prodi | | | | | | | | | | |
| a | prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah | IK-61 | Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah | % | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 4 | IKT-3.1 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot evaluasi | | % | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 4.1. Program Prioritas: Pengembangan Metode Pembelajaran Bela Negara | | | | | | | | | | |
| a | Metode pembelajaran mata kuliah S1 dan Diploma berbasis bela negara | IK-62 | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-------------------|---|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 5 | IKT-3.2. Persentase program studi S1, S2 dan D4/D3 yang akreditasi Unggul | | | % | 21 | 45 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 5.1. Program Prioritas: Peningkatan akreditasi unggul prodi | | | | | | | | | | |
| a | program studi S1, S2 dan D4/D3 yang akreditasi Unggul | IK-63 | Persentase program studi S1 yang akreditasi Unggul | % | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| | | IK-64 | Persentase program studi S2/S3 yang akreditasi Unggul | % | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | | IK-65 | Persentase program studi D3 yang akreditasi Unggul | % | 0 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan organisasi | | | | | | | | | | |
| 1 | IKU-4.1 Predikat SAKIP | | | Nilai | A (81,1) | A (83) | A (85) | A (87) | A (89) | AA (91) |
| 1.1. Program Prioritas: Peningkatan Predikat SAKIP | | | | | | | | | | |
| a | Predikat SAKIP | IK-66 | Nilai Dokumen Perencanaan Strategis | Nilai | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| | | IK-67 | Nilai Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan | Nilai | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| | | IK-68 | Nilai Pelaksanaan pengukuran Kinerja | Nilai | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| | | IK-69 | Nilai Dokumen Pelaporan Kinerja sesuai standar | Nilai | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| | | IK-70 | Nilai Pelaksanaan Evaluasi Kinerja sesuai standar | Nilai | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| | | IK-71 | Ketersediaan dokumen SAKIP setiap unit | % | 80 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |
| 2 | IKU-4.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | | | Nilai | 77,55 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 2.1. Program Prioritas: Peningkatan Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | | | | | | | | | | |
| a | Kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | IK-72 | Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) | Nilai | 73,67 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| | | IK-73 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 81,43 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 3 | IKU-4.3 Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | | | % | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. Program Prioritas: Peningkatan fakultas yang membangun zona integritas | | | | | | | | | | |
| a | Fakultas dengan Zona Integritas | IK-74 | Rerata Jumlah pengungkit ZI yang tercapai setiap Fakultas | Jumlah | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|-------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4 | IKT-4.1. Status Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 4.1. Program Prioritas: Peningkatan tata kelola perencanaan dan keuangan | | | | | | | | | | |
| a | Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | IK-75 | Status Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 5 | IKT 4.2. Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional (EBITDA) | IK-76 | Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional (EBITDA) | Rasio | 3 | 3 | 3,1 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
| 6 | IKT 4.3. Jumlah Pendapatan operasional | IK-77 | Jumlah Pendapatan operasional | Jumlah | 197 M | 210 M | 215 M | 215 M | 220 M | 220 M |
| 7 | IKT 4.4. Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset | IK-78 | Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset | Jumlah | 5,5 M | 5,7 M | 6 M | 7 M | 8 M | 9 M |
| 8 | IKT 4.5. Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama | IK-79 | Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama | Jumlah | 2,6 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
| 9 | IKT 4.6. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | IK-80 | Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | % | 84 | 84 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 10 | IKT 4.7. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU | IK-81 | Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU | Indeks | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | IKT 4.8. Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | IK-82 | Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | Indeks | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| 12 | IKT 4.9. Nilai self Maturity Rating | IK-83 | Nilai self Maturity Rating | Nilai | 2,25 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 |
| 5-12 Program Prioritas: Peningkatan kinerja keuangan berdasarkan indikator kinerja dari kementerian keuangan | | | | | | | | | | |
| 13 | IKT-4.10. Kualifikasi keterbukaan informasi publik | | Kualifikasi | Belum Informatif | Menuju Informatif (85) | Informatif (90) | Informatif (91) | Informatif (92) | Informatif (93) | |
| 13.1. Program Prioritas: Pengembangan tata kelola dan dokumen informasi publik | | | | | | | | | | |
| a | Keterbukaan informasi publik | IK-84 | Nilai pelaksanaan monitoring kuisisioner (80%) | Nilai | 35 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| | | IK-85 | Nilai pelaksanaan evaluasi (presentasi) (20%) | Nilai | 35 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| | | IK-86 | Ketersediaan Dokumen Informasi Publik setiap unit | % | 70 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|-------------------|--|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | IKT-4.11. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan | | | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 14.1. Program Prioritas: Peningkatan kepuasan pemangku kepentingan | | | | | | | | | | |
| a | Kepuasan Pemangku Kepentingan | IK-87 | Indeks Kepuasan Dosen | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | | IK-88 | Indeks Kepuasan Mahasiswa | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | | IK-89 | Indeks Kepuasan Tendik | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | | IK-90 | Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | | IK-91 | Indeks Kepuasan Mitra Kerjasama (alumni) | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | | IK-92 | Indeks Kepuasan masyarakat umum | Indeks | 78,93 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 15 | IKT-4.12. Capaian Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai Tugas Fungsinya | | | % | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 15.1. Program Prioritas: Peningkatan Standar Pelayanan Minimum | | | | | | | | | | |
| a | Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai Tugas Fungsinya | IK-93 | Capaian Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai Tugas Fungsinya | % | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | | IK-94 | Tingkat capaian jenis Layanan tridharma yang direncanakan oleh Laboratorium Fakultas | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| | | IK-95 | Tingkat capaian jenis Layanan tridharma yang direncanakan oleh Laboratorium Terpadu | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| | | IK-96 | Tingkat capaian jenis Layanan bidang Riset dan Pengabdian yang direncanakan oleh UPA Pengembangan Sains dan Energi | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| | | IK-97 | Jumlah Jenis Layanan kepada pihak eksternal laboratorium terpadu | Jumlah | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | IK-99 | Tingkat capaian jenis Layanan UPA yang direncanakan oleh Unit Penunjang Akademik (UPA) | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| | | IK-100 | Skema Sertifikasi Kompetensi baru yang dibentuk | Jumlah | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|-------------------|--|---------|---------------|------|------|------|------|------|
| 16 | IKT 4.13. Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | IK-101 | Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | IKT 4.14. terwujudnya sistem informasi terintegrasi bidang akademik dan non akademik | IK-102 | Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi Bidang Akademik dan Non Akademik | % | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 18 | IKT 4.15. Ranking Webometric | IK-103 | Ranking Webometric | Ranking | 92 | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| 16-18 Program Prioritas: Pengembangan sistem informasi terintegrasi | | | | | | | | | | |
| 19 | IKT-4.16. Persentase ketercapaian target peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 | | | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 19.1. Program Prioritas: Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai dan terkini | | | | | | | | | | |
| a | Kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 | IK-104 | Persentase ketercapaian target peningkatan sarpras | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | IK-105 | Ranking UI Green Matric | Ranking | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 40 |
| 20 | IKT-4.17. Terwujudnya Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | | | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 20.1. Program Prioritas: Pengembangan status kelembagaan menuju PTNBH | | | | | | | | | | |
| a | Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | IK-106 | Terwujudnya Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| 21 | IKT-4.18. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | | | % | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 21.1. Program Prioritas: peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan | | | | | | | | | | |
| a | Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | IK-107 | Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | % | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| | | IK-108 | Jumlah tenaga kependidikan sesuai standar akreditasi | Jumlah | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 22 | IKT-4.19. Indeks sikap dan perilaku bela negara pegawai | | | Indeks | 3,55 | 3,57 | 3,59 | 3,61 | 3,63 | 3,64 |
| 22.1. Program Prioritas: Peningkatan sikap dan perilaku bela negara pegawai | | | | | | | | | | |
| a | Sikap dan perilaku bela negara pegawai | IK-109 | Indeks sikap dan perilaku bela negara dosen | Indeks | 3,55 | 3,57 | 3,59 | 3,61 | 3,63 | 3,64 |
| | | IK-110 | Indeks sikap dan perilaku bela negara Tendik | Indeks | 3,55 | 3,57 | 3,59 | 3,61 | 3,63 | 3,64 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | IKT-4.20. Status akreditasi institusi | | | Akreditasi | B | B | Unggul | Unggul | Unggul | Unggul |
| 23.1. | | Program Prioritas: Peningkatan akreditasi institusi | | | | | | | | |
| a | Akreditasi institusi | IK-111 | Status akreditasi institusi | Akreditasi | B | B | Terakreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi |
| | | IK-112 | Hasil Monev & AMI yang ditindaklanjuti prodi/jurusan | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | IK-113 | Jumlah prodi melaksanakan Monev Pembelajaran | % | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 |
| | | IK-114 | Jumlah prodi melaksanakan AMI | % | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 |

Lampiran 2. Matriks Pendanaan

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lulusan | | | | 47.601.351.100 | 66.129.689.000 | 60.461.355.000 | 48.363.789.000 | 47.319.993.000 | 48.930.593.000 | |
| 1 | IKU-1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3 yang berhasil memiliki | | | 24.282.652.926 | 33.734.427.000 | 30.842.867.000 | 24.671.593.000 | 24.139.126.000 | 24.960.733.000 | |
| 1.1. | Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lulusan yang berdaya | | | 24.282.652.926 | 33.734.426.000 | 30.842.868.000 | 24.671.592.000 | 24.139.127.000 | 24.960.732.000 | |
| a | Mendapat pekerjaan | IK-1 | Jumlah lulusan yang langsung bekerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus | 235.537.700 | 327.218.000 | 299.171.000 | 239.310.000 | 234.146.000 | 242.115.000 | |
| b | Melanjutkan studi | IK-2 | Jumlah lulusan yang studi lanjut dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus | 170.626.348 | 237.041.000 | 216.723.000 | 173.360.000 | 169.618.000 | 175.391.000 | |
| c | Menjadi wiraswasta | IK-3 | Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus | 593.592.000 | 824.641.000 | 753.957.000 | 603.100.000 | 590.083.000 | 610.168.000 | |
| | | | | IK-4 | IPK Lulusan: | 7.512.624.071 | 10.436.835.000 | 9.542.238.000 | 7.632.954.000 | 7.468.219.000 |
| | | | a. Program Diploma | | | | | | | |
| | | | b. Program Sarjana | | | | | | | |
| | | | c. Program Magister | | | | | | | |
| | | | d. Program Doktor | | | | | | | |
| | | IK-5 | Lama Studi Lulusan: | 7.341.997.723 | 10.199.797.000 | 9.325.517.000 | 7.459.597.000 | 7.298.603.000 | 7.547.020.000 | |
| | | | a. Program Diploma | | | | | | | |
| | | | b. Program Sarjana | | | | | | | |
| | | | c. Program Magister | | | | | | | |
| | | | d. Program Doktor | | | | | | | |
| | | IK-6 | Lulusan Tepat Waktu : | 6.801.868.071 | 9.449.425.000 | 8.639.464.000 | 6.910.814.000 | 6.761.664.000 | 6.991.806.000 | |
| | | | a. Program Diploma | | | | | | | |
| | b. Program Sarjana | | | | | | | | | |
| | c. Program Magister | | | | | | | | | |
| | d. Program Doktor | | | | | | | | | |
| IK-7 | Lulusan Bersertifikat | 710.756.000 | 987.410.000 | 902.774.000 | 722.140.000 | 706.555.000 | 730.603.000 | | | |
| IK-8 | Nilai Skor EPT Lulusan (setara toefl 450) | 35.600.000 | 49.457.000 | 45.218.000 | 36.170.000 | 35.390.000 | 36.594.000 | | | |
| IK-9 | Organisasi Kemahasiswaan berkinerja baik | 880.051.013 | 1.222.602.000 | 1.117.806.000 | 894.147.000 | 874.849.000 | 904.626.000 | | | |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | IKU-1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang | | | 10.054.605.907 | 13.968.258.000 | 12.770.963.000 | 10.215.652.000 | 9.995.176.000 | 10.335.375.000 |
| 2.1. | Program Prioritas: Pengembangan Proses Pembelajaran di Luar | | | 4.210.452.960 | 5.849.329.000 | 5.347.951.000 | 4.277.893.000 | 4.185.566.000 | 4.328.028.000 |
| a | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi | IK-10 | Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (Program Internal dan Eksternal) | 1.200.000.000 | 1.667.088.000 | 1.524.193.000 | 1.219.221.000 | 1.192.907.000 | 1.233.509.000 |
| | | IK-11 | jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa | 200.000.000 | 277.848.000 | 254.033.000 | 203.204.000 | 198.818.000 | 205.585.000 |
| | | IK-12 | Rasio Pendaftar dan yang lulus seleksi | 1.404.726.480 | 1.951.502.000 | 1.784.228.000 | 1.427.226.000 | 1.396.423.000 | 1.443.952.000 |
| | | IK-13 | Rasio yang daftar ulang dan yang lulus seleksi | 1.405.726.480 | 1.952.891.000 | 1.785.498.000 | 1.428.242.000 | 1.397.418.000 | 1.444.981.000 |
| | | IK-14 | Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Program Prioritas: Pengembangan Proses Pembelajaran di Luar | | | 4.940.834.256 | 6.864.004.000 | 6.275.652.000 | 5.019.973.000 | 4.911.631.000 | 5.078.805.000 |
| a | Mahasiswa meraih prestasi | IK-15 | Jumlah Mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional (lomba dan non lomba) | 1.760.102.029 | 2.445.204.000 | 2.235.612.000 | 1.788.294.000 | 1.749.699.000 | 1.809.252.000 |
| | | IK-16 | Jumlah Mahasiswa meraih prestasi tingkat internasional (lomba dan non lomba) | 1.760.102.029 | 2.445.204.000 | 2.235.612.000 | 1.788.294.000 | 1.749.699.000 | 1.809.252.000 |
| | | IK-17 | Persentase mahasiswa S1 dan D3 kelompok UKT I dan II | 1.000.000 | 1.389.000 | 1.270.000 | 1.016.000 | 994.000 | 1.028.000 |
| | | IK-18 | Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi | 1.419.630.199 | 1.972.207.000 | 1.803.158.000 | 1.442.369.000 | 1.411.239.000 | 1.459.273.000 |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Program Prioritas: Peningkatan Jumlah Mahasiswa Asing di UPNVY | | | 903.318.691 | 1.254.926.000 | 1.147.359.000 | 917.787.000 | 897.979.000 | 928.543.000 |
| a | Mahasiswa Asing Non Student Exchange | IK-19 | Jumlah Mahasiswa Asing Non Student Exchange | 903.318.691 | 1.254.926.000 | 1.147.359.000 | 917.787.000 | 897.979.000 | 928.543.000 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | IKT-1.1. Jumlah Program Studi S1, S2, S3 dan Program Profesi baru yang dibuka | | | 4.463.582.123 | 6.200.985.000 | 5.669.465.000 | 4.535.076.000 | 4.437.199.000 | 4.588.225.000 |
| 3.1. | Program Prioritas: Pengembangan Program Studi Baru untuk program S1, S2 dan S3 | | | 4.463.582.123 | 6.200.985.000 | 5.669.465.000 | 4.535.076.000 | 4.437.199.000 | 4.588.225.000 |
| a | Program Prodi Baru yang dibentuk | IK-20 | Jumlah Prodi S1 | 1.115.895.531 | 1.550.246.000 | 1.417.366.000 | 1.133.769.000 | 1.109.300.000 | 1.147.056.000 |
| | | IK-21 | Jumlah Prodi S2 | 1.115.895.531 | 1.550.246.000 | 1.417.366.000 | 1.133.769.000 | 1.109.300.000 | 1.147.056.000 |
| | | IK-22 | Jumlah Prodi S3 | 1.115.895.531 | 1.550.246.000 | 1.417.366.000 | 1.133.769.000 | 1.109.300.000 | 1.147.056.000 |
| | | IK-23 | Jumlah Program Profesi | 1.115.895.531 | 1.550.246.000 | 1.417.366.000 | 1.133.769.000 | 1.109.300.000 | 1.147.056.000 |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | IKT-1.2. Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | | | 8.800.510.143 | 12.226.018.000 | 11.178.060.000 | 8.941.469.000 | 8.748.493.000 | 9.046.259.000 |
| 4.1. | Program Prioritas: Peningkatan Sikap dan Perilaku Bela Negara | | | 8.800.510.143 | 12.226.018.000 | 11.178.060.000 | 8.941.469.000 | 8.748.493.000 | 9.046.259.000 |
| a | Sikap dan Perilaku Bela Negara Mahasiswa | IK-24 | Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa | 8.800.510.143 | 12.226.018.000 | 11.178.060.000 | 8.941.469.000 | 8.748.493.000 | 9.046.259.000 |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen | | | | 37.684.874.282 | 52.367.990.000 | 47.879.247.000 | 38.299.204.000 | 37.472.623.000 | 38.748.055.000 |
| 1 | IKU-2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | | | 16.544.696.777 | 23.014.629.000 | 21.041.921.000 | 16.831.694.000 | 16.468.429.000 | 17.028.954.000 |
| 1.1. | Program Prioritas: Pengembangan kuantitas dan kualitas dosen dalam berkegiatan tridharma di luar kampus | | | 16.544.696.777 | 23.014.629.000 | 21.041.921.000 | 16.831.694.000 | 16.468.429.000 | 17.028.954.000 |
| a | Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain | IK-25 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain | 8.272.348.389 | 11.507.315.000 | 10.520.960.000 | 8.415.847.000 | 8.234.215.000 | 8.514.477.000 |
| b | Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri | IK-26 | Jumlah Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri | - | - | - | - | - | - |
| c | Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | IK-27 | Jumlah dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | 8.272.348.389 | 11.507.315.000 | 10.520.960.000 | 8.415.847.000 | 8.234.215.000 | 8.514.477.000 |
| | | | | - | - | - | - | - | - |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|--|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.2. | Program Prioritas: peningkatan tata kelola jurnal terindeks SINTA | | | 387.000.000 | 484.492.000 | 442.963.000 | 354.332.000 | 346.684.000 | 358.484.000 |
| a | Jurnal terindeks SINTA dan Global | IK-41 | Jumlah Jurnal terindeks Sinta | 193.500.000 | 242.246.000 | 221.482.000 | 177.166.000 | 173.342.000 | 179.242.000 |
| | | IK-42 | Jumlah Jurnal Terindeks Global | 193.500.000 | 242.246.000 | 221.482.000 | 177.166.000 | 173.342.000 | 179.242.000 |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Program Prioritas: peningkatan kualitas luaran pengabdian | | | 1.398.696.600 | 1.945.667.000 | 1.778.893.000 | 1.422.959.000 | 1.392.248.000 | 1.439.635.000 |
| a | Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh masyarakat/ industri | IK-43 | Jumlah Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh masyarakat | 80.079.000 | 111.394.000 | 101.846.000 | 81.468.000 | 79.710.000 | 82.423.000 |
| | | IK-44 | Jumlah Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh lembaga pemerintah | 93.305.037 | 129.793.000 | 118.667.000 | 94.924.000 | 92.875.000 | 96.036.000 |
| | | IK-45 | Jumlah Luaran penelitian yang berhasil diterapkan oleh dunia usaha dunia industri (DUDI) | | | | | | |
| | | IK-46 | Jumlah PkM dengan biaya luar negeri | - | - | - | - | - | - |
| | | IK-47 | Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri di luar UPNVY | 96.846.600 | 134.719.000 | 123.172.000 | 98.527.000 | 96.400.000 | 99.681.000 |
| | | IK-48 | Jumlah PkM dengan biaya | 1.128.465.963 | 1.569.761.000 | 1.435.208.000 | 1.148.041.000 | 1.123.264.000 | 1.161.495.000 |
| | | IK-49 | Jumlah dana PKM yang diperoleh dosen tetap per tahun | - | - | - | - | - | - |
| | | IK-50 | Persentase dana PKM dari total dana PT | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | IKT-2.1 Persentase dosen yang berkualifikasi pendidikan S3, | | | 275.000.000 | 382.541.000 | 349.751.000 | 279.770.000 | 273.732.000 | 283.049.000 |
| 4.1. | Program Prioritas: Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan | | | 275.000.000 | 382.541.000 | 349.751.000 | 279.770.000 | 273.732.000 | 283.049.000 |
| a | Dosen yang berkualifikasi pendidikan S3, Jabatan Fungsional guru besar dan Lektor Kepala | IK-51 | Persentase Dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | - | - | - | - | - | - |
| | | IK-52 | Persentase Dosen dengan jabatan fungsional guru besar | 100.000.000 | 139.106.000 | 127.182.000 | 101.735.000 | 99.539.000 | 102.927.000 |
| | | IK-53 | Persentase Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala | 75.000.000 | 104.330.000 | 95.387.000 | 76.301.000 | 74.654.000 | 77.195.000 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | IK-54 | Rasio dosen tetap dengan jumlah prodi/jurusan | 100.000.000 | 139.106.000 | 127.182.000 | 101.735.000 | 99.539.000 | 102.927.000 |
| | | IK-55 | Rasio dosen tidak tetap dengan dosen tetap | | | | | | |
| | | IK-56 | Rasio dosen dengan jumlah mahasiswa | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | 74.747.797.197 | 103.895.572.000 | 94.990.120.000 | 75.983.777.000 | 74.343.881.000 | 76.874.275.000 |
| 1 | IKU-3.1 Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2 | | | 1.497.414.478 | 2.596.815.000 | 2.374.228.000 | 1.899.174.000 | 1.858.186.000 | 1.921.432.000 |
| 1.1. | Program Prioritas: Pengembangan Kerjasama dengan Mitra di | | | 1.497.414.478 | 2.596.815.000 | 2.374.228.000 | 1.899.174.000 | 1.858.186.000 | 1.921.432.000 |
| a | Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | IK-57 | Jumlah pelaksanaan kerjasama prodi dengan mitra di dalam | 1.347.673.030 | 2.360.741.000 | 2.158.389.000 | 1.726.522.000 | 1.689.260.000 | 1.746.757.000 |
| | | IK-58 | Jumlah pelaksanaan kerjasama prodi dengan mitra di luar negeri | 149.741.448 | 236.074.000 | 215.839.000 | 172.652.000 | 168.926.000 | 174.675.000 |
| 2 | IKU-3.2 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang | | | 61.014.279.118 | 79.864.575.000 | 73.018.950.000 | 58.408.765.000 | 57.148.177.000 | 59.093.292.000 |
| 2.1. | Program Prioritas: Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis | | | 61.014.279.118 | 79.864.575.000 | 73.018.950.000 | 58.408.765.000 | 57.148.177.000 | 59.093.292.000 |
| a | Metode pembelajaran mata kuliah S1 dan Diploma berbasis kasus atau proyek | IK-59 | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sebagai sebagian bobot | 30.339.079.559 | 53.145.460.000 | 48.590.075.000 | 38.867.804.000 | 38.028.952.000 | 39.323.319.000 |
| | | IK-60 | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | 30.675.199.559 | 26.719.116.000 | 24.428.876.000 | 19.540.961.000 | 19.119.224.000 | 19.769.973.000 |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 3 | IKU-3.3 Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi | | | 4.463.582.123 | 7.818.929.000 | 7.148.727.000 | 5.718.355.000 | 5.594.941.000 | 5.785.372.000 |
| 3.1. | Program Prioritas: Peningkatan akreditasi internasional prodi | | | 4.463.582.123 | 7.818.929.000 | 7.148.727.000 | 5.718.355.000 | 5.594.941.000 | 5.785.372.000 |
| a | prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah | IK-61 | Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah | 4.463.582.123 | 7.818.929.000 | 7.148.727.000 | 5.718.355.000 | 5.594.941.000 | 5.785.372.000 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | IKT-3.1 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang | | | 3.308.939.355 | 5.796.322.000 | 5.299.488.000 | 4.239.127.000 | 4.147.637.000 | 4.288.807.000 |
| 4.1. | Program Prioritas: Pengembangan Metode Pembelajaran Bela | | | 3.308.939.355 | 5.796.322.000 | 5.299.488.000 | 4.239.127.000 | 4.147.637.000 | 4.288.807.000 |
| a | Metode pembelajaran mata kuliah S1 dan Diploma berbasis bela negara | IK-62 | Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot | 3.308.939.355 | 5.796.322.000 | 5.299.488.000 | 4.239.127.000 | 4.147.637.000 | 4.288.807.000 |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 5 | IKT-3.2. Persentase program studi S1, S2 dan D4/D3 yang | | | 4.463.582.123 | 7.818.929.000 | 7.148.727.000 | 5.718.355.000 | 5.594.941.000 | 5.785.372.000 |
| 5.1. | Program Prioritas: Peningkatan akreditasi unggul prodi | | | 4.463.582.123 | 7.818.929.000 | 7.148.727.000 | 5.718.355.000 | 5.594.941.000 | 5.785.372.000 |
| a | program studi S1, S2 dan D4/D3 yang akreditasi Unggul | IK-63 | Persentase program studi S1 yang akreditasi Unggul | 2.231.791.062 | 3.909.465.000 | 3.574.363.000 | 2.859.178.000 | 2.797.470.000 | 2.892.686.000 |
| | | IK-64 | Persentase program studi S2/S3 yang akreditasi Unggul | 1.785.432.849 | 3.127.572.000 | 2.859.491.000 | 2.287.342.000 | 2.237.977.000 | 2.314.149.000 |
| | | IK-65 | Persentase program studi D3 yang akreditasi Unggul | 446.358.212 | 781.892.000 | 714.872.000 | 571.835.000 | 559.494.000 | 578.537.000 |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan organisasi | | | | 217.935.494.743 | 302.862.420.000 | 276.902.443.000 | 221.497.704.000 | 216.717.299.000 | 224.093.564.000 |
| 1 | IKU-4.1 Predikat SAKIP | | | 38.508.991.364 | 53.622.663.000 | 49.026.374.000 | 39.216.806.000 | 38.370.421.000 | 39.676.410.000 |
| 1.1. | Program Prioritas: Peningkatan Predikat SAKIP | | | 38.508.991.364 | 53.622.663.000 | 49.026.374.000 | 39.216.806.000 | 38.370.421.000 | 39.676.410.000 |
| a | Predikat SAKIP | IK-66 | Nilai Dokumen Perencanaan Strategis | 45.000.000 | 62.661.000 | 57.290.000 | 45.827.000 | 44.838.000 | 46.364.000 |
| | | IK-67 | Nilai Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan | 263.660.000 | 367.139.000 | 335.670.000 | 268.506.000 | 262.711.000 | 271.653.000 |
| | | IK-68 | Nilai Pelaksanaan pengukuran Kinerja | 74.570.000 | 103.836.000 | 94.936.000 | 75.940.000 | 74.301.000 | 76.830.000 |
| | | IK-69 | Nilai Dokumen Pelaporan Kinerja sesuai standar | 88.780.000 | 123.624.000 | 113.027.000 | 90.412.000 | 88.461.000 | 91.472.000 |
| | | IK-70 | Nilai Pelaksanaan Evaluasi Kinerja sesuai standar | 15.660.000 | 21.806.000 | 19.937.000 | 15.948.000 | 15.604.000 | 16.135.000 |
| | | IK-71 | Ketersediaan dokumen SAKIP setiap unit | 38.021.321.364 | 52.943.596.000 | 48.405.514.000 | 38.720.172.000 | 37.884.506.000 | 39.173.956.000 |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | IKU-4.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | | | 76.642.642.728 | 106.722.676.000 | 97.574.897.000 | 78.051.373.000 | 76.366.853.000 | 78.966.102.000 |
| 2.1. | Program Prioritas: Peningkatan Kinerja Anggaran atas | | | 76.642.642.728 | 106.722.676.000 | 97.574.897.000 | 78.051.373.000 | 76.366.853.000 | 78.966.102.000 |
| a | Kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L | IK-72 | Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) | 38.321.321.364 | 53.361.338.000 | 48.787.449.000 | 39.025.686.000 | 38.183.427.000 | 39.483.051.000 |
| | | IK-73 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 38.321.321.364 | 53.361.338.000 | 48.787.449.000 | 39.025.686.000 | 38.183.427.000 | 39.483.051.000 |
| 3 | IKU-4.3 Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | | | 1.092.055.014 | 1.520.655.000 | 1.390.311.000 | 1.112.127.000 | 1.088.125.000 | 1.125.161.000 |
| 3.1. | Program Prioritas: Peningkatan fakultas yang membangun zona | | | 1.092.055.014 | 1.520.655.000 | 1.390.311.000 | 1.112.127.000 | 1.088.125.000 | 1.125.161.000 |
| a | Fakultas dengan Zona Integritas | IK-74 | Rerata Jumlah pengungkit ZI yang tercapai setiap Fakultas | 1.092.055.014 | 1.520.655.000 | 1.390.311.000 | 1.112.127.000 | 1.088.125.000 | 1.125.161.000 |
| 4 | IKT-4.1. Status Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | | | 200.000.000 | 278.494.000 | 254.623.000 | 203.676.000 | 199.280.000 | 206.063.000 |
| 4.1. | Program Prioritas: Peningkatan tata kelola perencanaan dan | | | 200.000.000 | 278.494.000 | 254.623.000 | 203.676.000 | 199.280.000 | 206.063.000 |
| a | Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | IK-75 | Status Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | 200.000.000 | 278.494.000 | 254.623.000 | 203.676.000 | 199.280.000 | 206.063.000 |
| 5 | IKT 4.2. Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional (EBITDA) | IK-76 | Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional (EBITDA) | 850.390.000 | 1.184.143.000 | 1.082.644.000 | 866.020.000 | 847.330.000 | 876.170.000 |
| 6 | IKT 4.3. Jumlah Pendapatan operasional | IK-77 | Jumlah Pendapatan operasional | | | | | | |
| 7 | IKT 4.4. Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset | IK-78 | Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari Pengelolaan Aset | | | | | | |
| 8 | IKT 4.5. Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama | IK-79 | Jumlah Pendapatan BLU yang berasal dari kerjasama | | | | | | |
| 9 | IKT 4.6. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | IK-80 | Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | | | | | | |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|---|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | IKT 4.7. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU | IK-81 | Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU | | | | | | |
| 11 | IKT 4.8. Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | IK-82 | Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | | | | | | |
| 12 | IKT 4.9. Nilai self Maturity Rating | IK-83 | Nilai self Maturity Rating | | | | | | |
| 5-12 | Program Prioritas: Peningkatan kinerja keuangan berdasarkan indikator kinerja dari kementerian keuangan | | | | | | | | |
| 13 | IKT-4.10. Kualifikasi keterbukaan informasi publik | | | 226.510.000 | 315.409.000 | 288.373.000 | 230.673.000 | 225.695.000 | 233.377.000 |
| 13.1. | Program Prioritas: Pengembangan tata kelola dan dokumen | | | 226.510.000 | 315.409.000 | 288.373.000 | 230.673.000 | 225.695.000 | 233.377.000 |
| a | Keterbukaan informasi publik | IK-84 | Nilai pelaksanaan monitoring kuisisioner (80%) | 54.188.000 | 75.456.000 | 68.988.000 | 55.184.000 | 53.993.000 | 55.831.000 |
| | | IK-85 | Nilai pelaksanaan evaluasi (presentasi) (20%) | 54.618.000 | 76.054.000 | 69.535.000 | 55.622.000 | 54.421.000 | 56.274.000 |
| | | IK-86 | Ketersediaan Dokumen Infomasi Publik setiap unit | 117.704.000 | 163.899.000 | 149.850.000 | 119.867.000 | 117.280.000 | 121.272.000 |
| 14 | IKT-4.11. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan | | | 4.800.000 | 6.684.000 | 6.111.000 | 4.888.000 | 4.783.000 | 4.946.000 |
| 14.1. | Program Prioritas: Peningkatan kepuasan pemangku | | | 4.800.000 | 6.684.000 | 6.111.000 | 4.888.000 | 4.783.000 | 4.946.000 |
| a | Kepuasan Pemangku Kepentingan | IK-87 | Indeks Kepuasan Dosen | 4.800.000 | 6.684.000 | 6.111.000 | 4.888.000 | 4.783.000 | 4.946.000 |
| | | IK-88 | Indeks Kepuasan Mahasiswa | | | | | | |
| | | IK-89 | Indeks Kepuasan Tendik | | | | | | |
| | | IK-90 | Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan | | | | | | |
| | | IK-91 | Indeks Kepuasan Mitra Kerjasama (alumni) | | | | | | |
| | | IK-92 | Indeks Kepuasan masyarakat umum | | | | | | |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|---|-------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | IKT-4.12. Capaian Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai | | | 8.229.268.409 | 11.459.019.000 | 10.476.805.000 | 8.380.526.000 | 8.199.656.000 | 8.478.743.000 |
| 15.1. | Program Prioritas: Peningkatan Standar Pelayanan Minimum | | | 8.229.268.409 | 11.459.019.000 | 10.476.805.000 | 8.380.526.000 | 8.199.656.000 | 8.478.743.000 |
| a | Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai Tugas Fungsinya | IK-93 | Capaian Standar Pelayanan Minimum Setiap Unit Sesuai Tugas Fungsinya | 2.660.318.931 | 3.704.418.000 | 3.386.892.000 | 2.709.217.000 | 2.650.746.000 | 2.740.968.000 |
| | | IK-94 | Tingkat capaian jenis Layanan tridharma yang direncanakan oleh Laboratorium Fakultas | 4.661.562.000 | 6.491.091.000 | 5.934.704.000 | 4.747.244.000 | 4.644.788.000 | 4.802.879.000 |
| | | IK-95 | Tingkat capaian jenis Layanan tridharma yang direncanakan oleh Laboratorium Terpadu | 399.887.235 | 556.831.000 | 509.102.000 | 407.237.000 | 398.448.000 | 412.010.000 |
| | | IK-96 | Tingkat capaian jenis Layanan bidang Riset dan Pengabdian yang direncanakan oleh UPA Pengembangan Sains dan Energi | - | - | - | - | - | - |
| | | IK-97 | Jumlah Jenis Layanan kepada pihak eksternal laboratorium | 171.380.243 | 238.642.000 | 218.186.000 | 174.530.000 | 170.763.000 | 176.575.000 |
| | | IK-99 | Tingkat capaian jenis Layanan UPA yang direncanakan oleh Unit Penunjang Akademik (UPA) | - | - | - | - | - | - |
| | | IK-100 | Skema Sertifikasi Kompetensi baru yang dibentuk | 336.120.000 | 468.038.000 | 427.920.000 | 342.298.000 | 334.911.000 | 346.310.000 |
| 16 | IKT 4.13. Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | IK-101 | Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | 150.721.000 | 209.874.000 | 191.885.000 | 153.491.000 | 150.179.000 | 155.290.000 |
| 17 | IKT 4.14. terwujudnya sistem informasi terintegrasi bidang akademik dan non akademik | IK-102 | Terwujudnya Sistem Informasi Terintegrasi Bidang Akademik dan Non Akademik | 358.930.000 | 499.799.000 | 456.959.000 | 365.527.000 | 357.638.000 | 369.811.000 |
| 18 | IKT 4.15. Ranking Webometric | IK-103 | Ranking Webometric | 1.000.000.000 | 1.392.471.000 | 1.273.115.000 | 1.018.380.000 | 996.401.000 | 1.030.315.000 |
| 16-18 | Program Prioritas: Pengembangan sistem informasi terintegrasi | | | | | | | | |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19 | IKT-4.16. Persentase ketercapaian target peningkatan kuantitas | | | 62.562.560.309 | 87.094.308.000 | 79.628.984.000 | 63.696.213.000 | 62.321.510.000 | 64.442.706.000 |
| 19.1. | Program Prioritas: Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan | | | 62.562.560.309 | 87.094.308.000 | 79.628.984.000 | 63.696.213.000 | 62.321.510.000 | 64.442.706.000 |
| a | Kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 | IK-104 | Persentase ketercapaian target peningkatan sarpras | 61.562.560.309 | 85.724.095.000 | 78.376.219.000 | 62.694.111.000 | 61.341.035.000 | 63.428.860.000 |
| | | IK-105 | Ranking UI Green Matric | 1.000.000.000 | 1.370.214.000 | 1.252.765.000 | 1.002.102.000 | 980.475.000 | 1.013.847.000 |
| 20 | IKT-4.17. Terwujudnya Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | | | 25.435.367.150 | 35.418.017.000 | 32.382.147.000 | 25.902.882.000 | 25.343.841.000 | 26.206.453.000 |
| 20.1. | Program Prioritas: Pengembangan status kelembagaan menuju | | | 25.435.367.150 | 35.418.017.000 | 32.382.147.000 | 25.902.882.000 | 25.343.841.000 | 26.206.453.000 |
| a | Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | IK-106 | Terwujudnya Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | 25.435.367.150 | 35.418.017.000 | 32.382.147.000 | 25.902.882.000 | 25.343.841.000 | 26.206.453.000 |
| 21 | IKT-4.18. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki | | | 1.678.246.342 | 1.752.683.000 | 1.602.451.000 | 1.281.820.000 | 1.254.156.000 | 1.296.843.000 |
| 21.1. | Program Prioritas: peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga | | | 1.678.246.342 | 1.752.683.000 | 1.602.451.000 | 1.281.820.000 | 1.254.156.000 | 1.296.843.000 |
| a | Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | IK-107 | Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | 839.123.171 | 1.168.455.000 | 1.068.301.000 | 854.547.000 | 836.104.000 | 864.562.000 |
| | | IK-108 | Jumlah tenaga kependidikan sesuai standar akreditasi | 839.123.171 | 584.228.000 | 534.150.000 | 427.273.000 | 418.052.000 | 432.281.000 |
| 22 | IKT-4.19. Indeks sikap dan perilaku bela negara pegawai | | | 338.812.427 | 471.786.000 | 431.346.000 | 345.039.000 | 337.593.000 | 349.083.000 |
| 22.1. | Program Prioritas: Peningkatan sikap dan perilaku bela negara | | | 338.812.427 | 471.786.000 | 431.346.000 | 345.039.000 | 337.593.000 | 349.083.000 |
| a | Sikap dan perilaku bela negara pegawai | IK-109 | Indeks sikap dan perilaku bela negara dosen | 169.406.214 | 235.893.000 | 215.673.000 | 172.520.000 | 168.796.000 | 174.542.000 |
| | | IK-110 | Indeks sikap dan perilaku bela negara Tendik | 169.406.214 | 235.893.000 | 215.673.000 | 172.520.000 | 168.796.000 | 174.542.000 |
| 23 | IKT-4.20. Status akreditasi institusi | | | 656.200.000 | 913.739.000 | 835.418.000 | 668.261.000 | 653.839.000 | 676.093.000 |
| 23.1. | Program Prioritas: Peningkatan akreditasi institusi | | | 656.200.000 | 913.739.000 | 835.418.000 | 668.261.000 | 653.839.000 | 676.093.000 |
| a | Akreditasi institusi | IK-111 | Status akreditasi institusi | 134.200.000 | 186.870.000 | 170.852.000 | 136.667.000 | 133.717.000 | 138.268.000 |
| | | IK-112 | Hasil Monev & AMI yang ditindaklanjuti prodi/jurusan | 390.000.000 | 543.063.000 | 496.515.000 | 397.168.000 | 388.596.000 | 401.823.000 |
| | | IK-113 | Jumlah prodi melaksanakan Monev Pembelajaran | 66.000.000 | 91.903.000 | 84.026.000 | 67.213.000 | 65.763.000 | 68.001.000 |
| | | IK-114 | Jumlah prodi melaksanakan AMI | 66.000.000 | 91.903.000 | 84.026.000 | 67.213.000 | 65.763.000 | 68.001.000 |

Lampiran 3. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan

METODE PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC | |
|---|--|---|--|--|----------------|
| Metode Pengukuran Capaian IKU-1 sampai dengan IKU-8: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | | | | | |
| IKU-1.1. | Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan 4/D3/D2/D1 yang berhasil: memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekeadaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam | Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n =responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yalg dikumpulkan). k= konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusarr bekerja dal mendapatkal pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan). | Menggunakan data tracer study yang dilakukan oleh Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPA PKK) | Kepala UPA PKK |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| | | <p>rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder, l perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer). | | | |
| IKU-1.2. | <p>Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi. | <p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah pa-ling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan | <p>Formula:</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. PD Dikti Tingkat Universitas dan Fakultas b. Sistem Informasi Prestasi (SIPRESMA) Mahasiswa di tingkat Universitas dan Fakultas | <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian/ Koordinator Bidang Akademik universitas/ fakultas bertanggung jawab pendataan kegiatan mahasiswa di luar program studi b. Koordinator Kemahasiswaan bertanggung jawab pendataan mahasiswa berprestasi |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|--|---|-------------|-----|
| | | <p>masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri</p> | <p>kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p> | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------|-----|
| | <p>ataupun bersama_sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penangan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya)</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan</p> | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC | |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------|-----|--|
| | | <p>kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/ atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian /lembaga lain terkait. <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ul style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|
| | | 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional | | | |
| IKU-2.1. | Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | <p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. | <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. PD-Dikti Tingkat Universitas b. SISTER UPN "Veteran" Yogyakarta | Kepala Bagian/Koordinator Bidang Akademik terkait data pada PD-Dikti serta Koordinator Bidang Kepegawaian terkait dengan Data SISTER |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| | <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| | <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (iima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri founder)atau pasangan pendtri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|--|---------------------|-------------|-----|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau organisasi nirlaba nasional dan internasional. <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar. <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| | | <p>2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi.</p> <p>3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.</p> <p>4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p> | | | |
| IKU-2.2. | <p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <p>a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau</p> <p>b. persentase pengajar yang</p> | <p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <p>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</p> <p>2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</p> | <p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> | <p>a. PD-Dikti Tingkat Universitas</p> <p>b. SISTER UPN "Veteran" Yogyakarta</p> <p>c. Aplikasi NAKULA</p> | <p>Kepala Bagian/Koordinator Bidang Akademik terkait data PD-Dikti, dan Koordinator Bidang Kepegawaian terkait data SISTER dan aplikasi NAKULA</p> |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|---|--|---|-------------|-----|
| | berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | <p>4) Perusahaan Fortune 500; atau</p> <p>5) Dunia usaha dunia industri.</p> <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <p>1) Bekerja di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional, dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. | z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
| | | <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:</p> <p>a) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</p> <p>b) perusahaan teknologi global;</p> <p>c) perusahaan rintisa (startup company) teknologi; atau</p> <p>d) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</p> <p>3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</p> <p>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat.</p> | | | |
| IKU-2.3. | Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil | <p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah:</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> | <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ | a. SISTER UPN "Veteran" Yogyakarta | Kepala Bagian Umum/Koordinator Bidang Kepegawaian terkait data dalam |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| | mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | <ol style="list-style-type: none"> 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra. <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah). | <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p> | b. Aplikasi SRIKANDI | SISTER, dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait data dalam SRIKANDI |
| IKU-3.1. | Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama program | <p>a. Kriteria kemitraan</p> <p>Pejanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil | <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ | <ol style="list-style-type: none"> a. Silemkerma Kemdikbud b. Aplikasi ANTAREJA | Kepala Bagian Umum/Koordinator Bidang Kerjasama |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|---|-------------|-----|
| studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | <p>(output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajarl dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan resource shaing sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan atau 10) melakukan kemitraan penelitian <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknoigi global; | <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p> | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 200 berdasarkan bidang ilmu subject); 8) subject); 9) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 10) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 11) rumah sakit; 12) UMKM; 13) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 14) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi | | | |
| IKU-3.2. | Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S 1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project). <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemecahan kasus /case methodli | <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atalu team-based project sebgas, metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. PD-Dikti Tingkat Universitas b. Aplikasi NAKULA | Kepala Bagian Akademik/Koordinator Bidang Akademik |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|---|--|---|-------------|-----|
| <p>kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> | <p>a) mahasiswa berperan sebagai 'protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> | <p>t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p> | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------|-----|
| | | b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri. b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas /case method)dan/atau presentasi akhir | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|---|--|---|---|--|---|
| | | pembelajaran kelompok berbasis project (team based project). | | | |
| IKU-3.3. | Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. | <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)</p> | PD-Dikti tingkat Universitas | Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) |
| Metode Pengukuran Capaian IKU-9 sampai dengan IKU-11: Mengacu pada berbagai peraturan yang terkait dengan IKU-9, IKU-10 dan IKU-11, seperti tentang evaluasi SAKIP, Kinerja Keuangan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Zona Integritas | | | | | |
| IKU-4.1. | Predikat SAKIP | <ol style="list-style-type: none"> SAKIP adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, penghitungan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Komponen Penilaian SAKIP: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja Bobot 30% Pengukuran Kinerja 25% Pelaporan Kinerja 15% | <p>Formula:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi SAKIP di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Satuan Kerja (Satker), dan Reviu atas Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal. Evaluasi SAKIP Mandiri berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas | Aplikasi SAKIP yang disediakan Kemdiktisaintek | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|--|---|----------------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Evaluasi Kinerja 10% e. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi <p>3. Predikat Penilaian SAKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. AA= sangat memuaskan dengan nilai >90-100 b. A = memuaskan dengan nilai >80-90 c. BB= sangat memuaskan dengan nilai >70-80 d. B= sangat memuaskan dengan nilai >60-70 e. CC= sangat memuaskan dengan nilai >50-60 f. C= sangat memuaskan dengan nilai >30-50 g. D= sangat memuaskan dengan nilai >0-30 | <p>Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Evaluasi SAKIP yang diterbitkan Kemdiktisaintek dan Peraturan Rektor Tentang SAKIP UPNVY Nomor 15 tahun 2020.</p> | | |
| IKU-4.2. | <p>Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L</p> | <p>1. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L adalah skor atau penilaian yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan capaian pelaksanaan anggaran dalam satu periode anggaran. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) telah dilaksanakan secara efektif,</p> | <p>Formula:</p> <p>Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = 50% x Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran + 50% x Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Capaian Rincian Output, Penggunaan SBK, Efisiensi SBK b. Komponen nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: Revisi DIPA, deviasi | Aplikasi SAKTI | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------|--|-------------|----------|------|----------|--|-----------------|--------|--|--|--|
| | | <p>efisien, tepat waktu, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Nilai ini dinyatakan dalam skor numerik (0–100) atau kategori kinerja (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang).</p> <p>3. 2 aspek/indikator utama dalam penilaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA/KL:</p> <p>a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (50%)</p> <p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)</p> <p>4. Kategori Nilai Kinerja:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Kinerja (%)</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>80 – <90</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>70 – <80</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td><70</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> | Nilai Kinerja (%) | Kategori | ≥ 90 | Sangat Baik | 80 – <90 | Baik | 70 – <80 | Cukup | <70 | Kurang | <p>halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, dan Capaian Output</p> | | |
| Nilai Kinerja (%) | Kategori | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥ 90 | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 – <90 | Baik | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 – <80 | Cukup | | | | | | | | | | | | | | |
| <70 | Kurang | | | | | | | | | | | | | | |
| IKU-4.3. | Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | <p>1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah upaya konkret yang dilakukan oleh unit kerja di instansi pemerintah untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi dalam rangka</p> | <p>Formula: Komponen penilaian: a. Komponen Pengungkit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KOMPONEN PENGUNGKIT PEMENUHAN DAN REFORM</th> <th>BOBOT (60%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | NO. | KOMPONEN PENGUNGKIT PEMENUHAN DAN REFORM | BOBOT (60%) | | | | LKE Internal UPN VY dan Hasil Evaluasi Kementerian terkait | Kepala Biro PKU | | | | |
| NO. | KOMPONEN PENGUNGKIT PEMENUHAN DAN REFORM | BOBOT (60%) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | | | Sumber Data | PIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------|----------------|----------------------|----|---|-------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| | | <p>mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>2. Pembangunan ZI mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI.</p> <p>3. Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>4. Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap</p> | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </table> | 1 | Manajemen Perubahan | 8% | 2 | Penataan Tatalaksana | 7% | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% | 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% | 5 | Penguatan Pengawasan | 15% | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | | | | |
| 1 | Manajemen Perubahan | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan sebelumnya) dan reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit</p> <p>b. Komponen Hasil</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KOMPONEN HASIL</th> <th>BOBOT (40%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | NO. | KOMPONEN HASIL | BOBOT (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | KOMPONEN HASIL | BOBOT (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama/IKU | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | | Sumber Data | PIC |
|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|-------------|-----|
| | | unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas. | Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (22,50) | | | |
| | | | 1 | Survei Persepsi Anti Korupsi | 17,50% | |
| | | | 2 | Capaian Kinerja | 5% | |
| | | | Pelayanan Publik Yang Prima (17,50) | | | |
| | | | 1 | Survei Persepsi Pelayanan Publik | 17,50% | |

METODE PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

| Indikator Kinerja Tambahan/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|--|--|--|--|---|------------------|
| Metode Pengukuran Capaian IKT-1 sampai dengan IKT-25: Mengacu pada berbagai peraturan yang diterbitkan kementerian teknis yang relevan dengan indikator kinerja tambahan | | | | | |
| IKT dari IKU 1.1 | IPK Lulusan: a. Program Diploma b. Program Sarjana c. Program Magister d. Program Doktor | <ol style="list-style-type: none"> IPK lulusan adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh. Nilai ini dihitung dari seluruh mata kuliah yang diambil selama masa studi dan dinyatakan dalam skala 0,00 – 4,00. | <p>Formula:</p> $\text{Rerata IPK} = \frac{\sum \text{IPK Lulusan}}{n}$ <p>\sumIPK Lulusan = total semua IPK mahasiswa yang telah lulus pada periode tertentu. n = jumlah mahasiswa yang lulus pada periode tersebut.</p> | Menggunakan data Keputusan Rektor tentang Yudisium Lulusan Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor yang disediakan Biro Akademik pada periode | Ka Biro Akademik |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----|
| | | 3. Kategori IPK: <ol style="list-style-type: none"> Sangat Baik: $IPK \geq 3,51 - 4,00$ Baik: $IPK 3,01 - 3,50$ Cukup: $IPK 2,76 - 3,00$ Kurang: $IPK < 2,75$ | | perhitungan capaian kinerja | |
| IKT dari IKU 1.1 | Lama Studi Lulusan: <ol style="list-style-type: none"> Program Diploma Program Sarjana Program Magister Program Doktor | <ol style="list-style-type: none"> Lama studi lulusan adalah jangka waktu yang ditempuh oleh seorang mahasiswa mulai dari saat resmi terdaftar sebagai mahasiswa (pada semester pertama) hingga dinyatakan lulus (yudisium atau wisuda) di suatu program studi pada jenjang tertentu. Lama studi dinyatakan dalam satuan waktu tahun atau semester. Kriteria Kategori (opsional): <ol style="list-style-type: none"> Tepat waktu: menyelesaikan studi dalam rentang waktu standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Cepat: menyelesaikan studi lebih cepat dari waktu standar. Lambat: menyelesaikan studi melebihi waktu standar. | Formula: $\text{Rerata Masa Studi} = \frac{\sum \text{Masa Studi Lulusan}}{n}$ <p>\sumMasa Studi Lulusan = total semua masa studi mahasiswa yang telah lulus pada periode tertentu. n = jumlah mahasiswa yang lulus pada periode tersebut.</p> | | |
| IKT dari IKU 1.1 | Lulusan Tepat Waktu: <ol style="list-style-type: none"> Program Diploma Program Sarjana Program Magister | <ol style="list-style-type: none"> Lulusan Tepat Waktu adalah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum program | Formula: $\text{Rerata Lulusan Tepat Waktu} = \frac{\sum \text{Lulusan Tepat Waktu}}{n}$ | | |

| | Indikator Kinerja Tambaha/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
| | d. Program Doktor | <p>studi dalam rentang waktu standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan tertentu, dihitung sejak pertama kali terdaftar (semester awal) hingga dinyatakan lulus (yudisium).</p> <p>2. Kriteria Lulusan Tepat Waktu Setiap Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diploma III (D3): ≤ 6 semester (3 tahun). b. Sarjana (S1): ≤ 8 semester (4 tahun). c. Magister (S2): ≤ 4 semester (2 tahun). d. Doktor (S3): ≤ 6 semester (3 tahun). | <p>ΣLulusan Tepat Waktu = total semua mahasiswa yang telah lulus tepat waktu pada periode tertentu. n = jumlah mahasiswa yang lulus pada periode tersebut.</p> | | |
| IKT dari IKU 1.1 | Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Lulusan bersertifikat kompetensi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi pada program pendidikan tinggi tertentu dan memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi atau sertifikasi yang diakui oleh lembaga independen atau lembaga sertifikasi profesi (LSP) sesuai dengan bidang ilmunya. 2. Sertifikat ini membuktikan lulusan memiliki kemampuan (skill) dan | <p>Formula:</p> $\text{Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Total Jumlah Lulusan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi = Jumlah mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang valid saat lulus. b. Total Jumlah Lulusan = Jumlah seluruh mahasiswa yang dinyatakan | <ul style="list-style-type: none"> a. UPA Layanan Uji Kompetensi b. Prodi/Fakultas yang menyelenggarakan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan | Kepala UPA Layanan Uji Kompetensi |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|--------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| | <p>pengetahuan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja atau profesi tertentu.</p> <p>3. Kriteria Lulusan Bersertifikat Kompetensi:</p> <p>a. Memiliki sertifikat kompetensi dari LSP/BNSP atau lembaga yang diakui.</p> <p>b. Sertifikat masih berlaku (valid) saat kelulusan.</p> | <p>lulus pada periode tertentu (misal per triwulan atau tahun).</p> | <p>lembaga sertifikasi yang diakui</p> | |
| <p>IKT dari IKU 1.1</p> | <p>Nilai Skor EPT Lulusan (setara toefl 450)</p> <p>1. Rerata nilai skor EPT lulusan adalah nilai rata-rata yang diperoleh seluruh lulusan perguruan tinggi pada tes kemampuan bahasa Inggris (English Proficiency Test/EPT) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga sertifikasi bahasa Inggris, sebagai prasyarat kelulusan. Skor tersebut kemudian dikonversikan agar setara dengan skor TOEFL standar internasional (misalnya TOEFL PBT).</p> <p>2. Kriteria Setara TOEFL 450:</p> <p>a. Lulusan dinyatakan memenuhi standar minimal jika nilai skor EPT mereka \geq setara TOEFL 450.</p> <p>b. EPT dapat berupa TOEFL ITP, TOEFL Prediction, TOEIC, IELTS, atau tes bahasa Inggris internal yang dikonversi ke skor TOEFL.</p> | <p>Formula:</p> $\text{Rerata Skor EPT} = \frac{\sum \text{Skor EPT Lulusan}}{n}$ <p>a. \sumSkor EPT Lulusan = Total skor EPT semua mahasiswa yang lulus.</p> <p>b. n = Jumlah mahasiswa yang lulus.</p> <p>c. Jika skor belum dalam standar TOEFL, dilakukan konversi terlebih dahulu.</p> | <p>Hasil Tes EPT yang dikeluarkan UPA Bahasa atau dari lembaga bahasa lainnya yang diakui oleh UPNVY melalui pengurus jurusan</p> | <p>Kepala UPA Bahasa</p> |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|--|--|---|---------------------------|
| IKT dari IKU 1.1 | Organisasi Kemahasiswaan Berkinerja baik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi kemahasiswaan (OK) adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa yang berada di UPN "Veteran" Yogyakarta dalam bentuk pengembangan minat, bakat, potensi, disiplin, kejuangan, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, bela negara dan rasa kebangsaan, kesejahteraan serta tanggung jawab sosial mahasiswa dalam rangka perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi dan Tujuan UPN 2. Organisasi berkinerja baik dibagi 2 kelompok organisasi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Organisasi berkinerja baik tingkat universitas; dan b. Organisasi berkinerja baik tingkat Fakultas. 3. Komponen Penilaian OK: <ol style="list-style-type: none"> a. Legalitas OK 20% b. Program Kerja OK yang sesuai Karakteristik Organisasi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Tata Laksana Organisasi 30% | <p>Formula:</p> <p>Kinerja OK = (NilaixBobot) Legalitas OK + (NilaixBobot) Program Kerja OK sesuai Karakteristik + (NilaixBobot) Program Kerja OK yang mendukung Kinerja Institusi + (NilaixBobot) Prestasi OK + (NilaixBobot) Kerjasama OK</p> | Data Organisasi Kemahasiswaan yang diterbitkan oleh Bagian Kemahasiswaan Biro Kemahasiswaan | Kepala Biro Kemahasiswaan |

| | Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------|---|--|---|----------------|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Program kerja OK yang mendukung kinerja universitas/fakultas/jurusan/prodi 15% d. Prestasi OK 25% e. Kerjasama OK 10% 4. Nilai Klasterisasi Kinerja Organisasi Kemahasiswaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Unggul: 18-22 b. Baik: 8-17 c. Cukup: 1-7 | | | |
| IKT dari IKU-1.2 | Jumlah mahasiswa mahasiswa S1 dan D3 di UPNVY kelompok UKT I dan II | <ol style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa program Sarjana (S1) dan Diploma III (D3) yang terdaftar secara resmi di UPNVY pada tahun akademik tertentu, yang masuk dalam kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) kategori Kelompok I (paling rendah) dan Kelompok II (rendah). 2. UKT Kelompok I: Mahasiswa dengan kemampuan ekonomi sangat rendah yang membayar UKT pada level terendah sesuai kebijakan UPNVY. 3. UKT Kelompok II: Mahasiswa dengan kemampuan ekonomi rendah yang membayar UKT level kedua. 4. Perhitungan jumlah mahasiswa dilakukan berdasarkan data | Formula: $\text{Persentase UKTI \& II} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa UKTI \& II}}{\text{Total Mahasiswa Aktif (S1+D3)}} \times 100\%$ <p>Total Mahasiswa Aktif (S1+D3) = jumlah seluruh mahasiswa aktif pada jenjang S1 dan D3 di UPNVY, pada semester/tahun akademik tertentu.</p> | PD-Dikti UPNVY | Kepala Biro Akademik |

| | Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------|--|---|---|--|---------------------------|
| | | registrasi resmi pada semester berjalan yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sistem administrasi akademik UPNVY | | | |
| IKT dari IKU-1.2 | Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi | <p>1. Jumlah Mahasiswa yang Memperoleh Beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi adalah banyaknya mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi tertentu yang secara resmi terdaftar sebagai penerima bantuan biaya pendidikan melalui skema:</p> <ol style="list-style-type: none"> KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar – Kuliah): program pemerintah untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Afirmasi: beasiswa untuk mahasiswa dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Papua, Papua Barat, atau daerah tertentu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah. Prestasi: beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik di tingkat nasional/internasional. | <p>Formula:</p> $\text{Jumlah Penerima Beasiswa}_{\text{kategori}} = \sum_{i=1}^n M_{\text{beasiswa}(i)}$ <ol style="list-style-type: none"> $M_{\text{beasiswa}(i)}$ = Mahasiswa penerima beasiswa ke-i. n = jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada tahun akademik tertentu. $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa}}{\text{Jumlah Mahasiswa Aktif}} \times 100\%$ | PD-Dikti, Sistem Informasi Kemahasiswaan UPNVY | Kepala Biro Kemahasiswaan |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------------|
| | | 2. Perhitungan dilakukan berdasarkan data penerima beasiswa yang tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sistem administrasi akademik kampus, dan/atau Surat Keputusan Rektor terkait penetapan penerima beasiswa pada tahun akademik tertentu. | | | |
| IKT dari IKU-1.2 | Jumlah Mahasiswa Asing | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa berkewarganegaraan luar negeri yang terdaftar secara resmi sebagai peserta pendidikan akademik pada program studi di UPNVY, baik pada jenjang diploma, sarjana, magister, maupun doktor, yang mengikuti perkuliahan secara penuh waktu (full time) atau tidak penuh waktu (part time). 2. Perhitungan mahasiswa asing dilakukan untuk mengukur tingkat internasionalisasi perguruan tinggi. 3. Data mahasiswa asing dihitung berdasarkan registrasi aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada tahun akademik berjalan. | <p>Formula:</p> $\text{Jumlah Mahasiswa Asing} = \sum \text{Mahasiswa Asing Aktif pada Tahun Akademik Tertentu}$ <p>Mahasiswa asing = mahasiswa dengan kewarganegaraan non-Indonesia dan NIM aktif di PDDikti.</p> | PD-Dikti UPNVY | Kepala Biro Akademik |
| IKT-1.1 | Jumlah Prodi baru untuk program: a. Diploma | 1. Jumlah program studi baru adalah banyaknya program studi yang dibuka dan mendapatkan izin resmi | <p>Formula:</p> $\text{Jumlah Prodi Baru} = \sum \text{Prodi D3} + \sum \text{Prodi S1} + \sum \text{Prodi S2} + \sum \text{Prodi S3}$ | Dokumen SK pendirian Kemendikbudris | Kepala Biro Akademik |

| | Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-----------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. Sarjana c. Magister d. Doktor | <p>operasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau lembaga berwenang lainnya dalam periode waktu tertentu pada jenjang: Diploma (D1–D4/Applied Bachelor), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3)</p> <p>2. Program studi baru dianggap sah apabila telah mendapatkan SK Pendirian dan Izin Operasional dan terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).</p> | | <p>tek, PDDikti, atau laporan akademik institusi.</p> | |
| <p>IKT-1-2</p> | <p>Indeks sikap dan perilaku bela negara mahasiswa</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Sikap dan Perilaku Bela Negara mahasiswa adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemahaman, penerimaan nilai-nilai, serta implementasi sikap dan perilaku Bela Negara oleh Mahasiswa di lingkungan UPNVY. 2. Indeks ini mencerminkan sejauh mana mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. 3. Indeks diukur melalui survei atau instrumen penilaian yang mengacu pada 5 Nilai Dasar Bela Negara, yaitu: Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Setia pada Pancasila sebagai Ideologi | <p>Formula:</p> <p>Untuk menghitung Indeks setiap Dimensi, maka Formulasnya:</p> <p>Indeks <small>(nilai bela negara)</small> = $\sum(\text{Skor diperoleh} \times \text{Bobot Indikator})$</p> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skor untuk setiap indikator 1-4 2. Total bobot indikator tiap dimensi <p>Contoh:</p> <p>Untuk dimensi cinta tanah air dengan bobot indikator pengetahuan (20%), bobot pemahaman (20%), bobot sikap</p> | <p>Pusat Pengembangan Bela Negara LPMP</p> | <p>Kapus Pengembangan Bela Negara</p> |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|---|--|-------------|-----|
| | <p>Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara</p> <p>4. Indikator Operasional:</p> <p>a. Dimensi Pengukuran Indeks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta Tanah Air (20%) 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara (20%) 3) Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara (20%) 4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara (20%) 5) Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara (20%) <p>b. Indikator setiap Dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Pengetahuan (20%): 1) Memahami makna bela negara secara utuh; 2) Memahami 5 nilai dasar bela negara; 3) Memahami ancaman terhadap bangsa dan negara; 4) Memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara; 5) Memahami dasar hukum dan kebijakan bela negara 2) Aspek Pemahaman (20%): 1) Memahami makna bela negara secara utuh; 2) | <p>(30%), dan bobot perilaku (30%) dan setiap indikator diberi nilai antara 3 hingga 4 oleh responden, maka nilainya adalah:</p> $(3 \times 20\%) + (3 \times 20\%) + (4 \times 30\%) + (3 \times 30\%)$ $0,6 + 0,6 + 1,2 + 0,9$ <p>= 3,3</p> <p>Indeks Dimensi Cinta Tanah Air adalah 3,3</p> <p>Dengan asumsi Indeks Sadar Berbangsa dan Bernegara 3,5, Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara 3,8, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 3,6, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara 3,7, Maka Indeks Bela Negara, menggunakan Formula:</p> <p>INDEKS BELA NEGARA MAHASISWA = (Indeks Cinta Tanah Air + Indeks Sadar Berbangsa dan Bernegara + Indeks Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara + Indeks Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara + Indeks Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara) / 5</p> | | |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|
| | | <p>Memahami 5 nilai dasar bela negara; 3) Memahami ancaman terhadap bangsa dan negara; 4) Memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara; 5) Memahami dasar hukum dan kebijakan bela negara</p> <p>3) Aspek Sikap (30%): bagaimana seseorang menunjukkan perilaku dan kecenderungan hati untuk membela negara dalam kehidupan sehari-hari, dengan mendasarkan pada indikator 5 nilai dasar bela negara</p> <p>4) Aspek Perilaku (30%): menunjukkan bagaimana seseorang mewujudkan nilai-nilai bela negara dalam tindakan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, maupun negara dengan merujuk pada indikator 5 nilai dasar bela negara</p> | $= \frac{3,3 + 3,5 + 3,8 + 3,6 + 3,7}{5}$ $= \frac{17,9}{5}$ $= 3,58$ <p>Maka Indeks Bela Negara mahasiswa UPNVY adalah 3,58</p> | | |
| IKT-2.1 | Persentase Dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | 1. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3 adalah ukuran persentase jumlah dosen | | PD Dikti/Sister | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|
| | | <p>tetap di UPNVY yang memiliki kualifikasi akademik tertinggi berupa gelar Doktor (S3), baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap total jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Dosen tetap yang dimaksud adalah dosen yang diangkat secara permanen oleh UPNVY, tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dan aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) pada tahun akademik tertentu.</p> | <p>Formula:</p> $\text{Persentase Dosen S3} = \frac{\text{Jumlah Dosen Tetap dengan S3}}{\text{Jumlah Total Dosen Tetap}} \times 100\%$ <p>a. Jumlah Dosen Tetap dengan S3 = Total dosen tetap yang memiliki ijazah S3 (Doktor)</p> <p>b. Jumlah Total Dosen Tetap = Total dosen tetap yang terdaftar di PDDikti pada tahun berjalan, termasuk yang berkualifikasi S2 dan S3.</p> | | |
| IKT-2.1 | Persentase Dosen dengan jabatan fungsional guru besar | <p>1. Persentase Dosen dengan Jabatan Fungsional Guru Besar adalah ukuran proporsi jumlah dosen tetap di UPNVY yang memiliki jabatan fungsional akademik tertinggi yaitu Guru Besar, terhadap total jumlah dosen tetap yang tercatat di UPNVY pada periode tertentu.</p> <p>2. Dosen tetap yang dimaksud adalah dosen yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan tercatat aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Guru Besar | <p>Formula:</p> $\text{Persentase Dosen Guru Besar} = \frac{\text{Jumlah Dosen Tetap Guru Besar}}{\text{Jumlah Total Dosen Tetap}} \times 100\%$ <p>a. Jumlah Dosen Tetap Guru Besar = Total dosen tetap dengan jabatan fungsional Profesor/Guru Besar.</p> <p>b. Jumlah Total Dosen Tetap = Total semua dosen tetap yang terdaftar di PDDikti pada tahun berjalan, terlepas dari jabatan fungsionalnya.</p> | PD Dikti/Sister | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|---|--|--|--|
| | yang diterbitkan oleh Kemendiktisaintek. | | | |
| IKT-2.1 | <p>Persentase Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala</p> | <ol style="list-style-type: none"> Persentase Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala adalah ukuran proporsi jumlah dosen tetap di UPNVY yang memiliki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, terhadap total jumlah dosen tetap yang tercatat di UPNVY pada periode tertentu. Dosen tetap yang dimaksud adalah dosen yang: <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan tercatat aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Lektor Kepala yang diterbitkan oleh Kemendiktisaintek. | <p>Formula:</p> $\text{Persentase Dosen Lektor Kepala} = \frac{\text{Jumlah Dosen Tetap dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala}}{\text{Jumlah Total Dosen Tetap}} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dosen Tetap Lektor Kepala = Total dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Jumlah Total Dosen Tetap = Total semua dosen tetap yang terdaftar di PDDikti pada tahun berjalan, terlepas dari jabatan fungsionalnya. | <p>PD Dikti/Sister</p> <p>Kepala Biro PKU</p> |
| IKT-3.1 | <p>Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran Bela Negara sebagai sebagian bobot evaluasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> Kriteria metode pembelajaran berbasis bela negara: <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus terhadap masalah bela negara; mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus bela negara untuk membangun | <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan pembelajaran bela negara dan bagian dari bobot evaluasi.</p> | <p>PD-Dikti Tingkat Universitas atau Aplikasi NAKULA</p> <p>Kapus Pengembangan Bela Negara LPMPP</p> |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|--|---|-------------|-----|
| | <p>rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>d) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>e) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>f) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya</p> | <p>t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p> | | |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|---|--|--|---|
| | <p>yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</p> <p>g) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</p> <p>h) kelompok diberikan project dari permasalahan bela negara di masyarakat.</p> <p>2. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi dan pembelajaran kelompok berbasis project tentang permasalahan bela negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</p> | | | |
| <p>IKT-3.2</p> | <p>Persentase prodi S1, S2, S3 dan Diploma yang memiliki akreditasi A/Unggul</p> | <p>1. Persentase program studi pada jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang memiliki status akreditasi tertinggi (A/Unggul) adalah ukuran proporsi program studi yang telah diakui memiliki mutu sangat baik oleh lembaga akreditasi resmi (BAN-PT atau LAM-PT).</p> <p>2. Akreditasi A/Unggul menunjukkan bahwa program studi memenuhi</p> | <p>Formula:</p> $\text{Persentase Prodi Akreditasi A/Unggul} = \frac{\text{Jumlah prodi dengan akreditasi A/Unggul}}{\text{Total jumlah prodi pada jenjang tersebut}} \times 100$ <p>Kriteria pengukuran:</p> <p>a. Jika $\geq 75\%$ prodi pada jenjang tertentu memiliki akreditasi A/Unggul \rightarrow Sangat Baik.</p> <p>b. Jika $50-74\%$ \rightarrow Baik.</p> <p>c. Jika $< 50\%$ \rightarrow Kurang.</p> | <p>Dokumen resmi sertifikat akreditasi dan/atau data dari situs BAN-PT/LAM.</p> <p>Kepala LPMPP</p> |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|--|---|--|-----------------|
| | | <p>atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>3. Kategorisasi akreditasi:</p> <p>a. Unggul (A) = Program studi dengan nilai akreditasi 361–400 (IAPS 4.0).</p> <p>b. Baik Sekali (B) = Program studi dengan nilai 301–360.</p> <p>c. Baik (C) = Program studi dengan nilai 200–300.</p> <p>d. Tidak Terakreditasi = Program studi tanpa status akreditasi yang sah.</p> | | | |
| IKT-4.1 | Opini laporan keuangan oleh Akuntan Publik | <p>1. Opini laporan keuangan adalah pernyataan profesional Akuntan Publik mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas berdasarkan hasil pemeriksaan (audit) yang telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku umum.</p> <p>2. Opini yang dikeluarkan dapat berupa:</p> <p>a. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) – Laporan keuangan disajikan secara wajar.</p> <p>b. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) – Laporan</p> | <p>1. Cara Pengukuran: Pemeriksaan terhadap dokumen hasil audit eksternal (laporan audit) dan identifikasi opini yang tercantum dalam laporan tersebut.</p> <p>2. Skala Ukur Nominal:</p> <p>a. 1 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>b. 2 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP)</p> <p>c. 3 = Tidak Wajar</p> <p>d. 4 = Disclaimer</p> | Laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP), dokumen keuangan tahunan institusi. | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|
| | | <p>keuangan wajar, kecuali untuk hal tertentu.</p> <p>c. Tidak Wajar (Adverse Opinion) – Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar.</p> <p>d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer) – Auditor tidak dapat memberikan opini.</p> <p>3. Dimensi:</p> <p>a. Jenis Opini: WTP, WDP, Tidak Wajar, Disclaimer.</p> <p>b. Kesesuaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah/PSAK.</p> <p>c. Periode Laporan: Tahun fiskal yang diaudit.</p> | | | |
| IKT-4.2 | Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional | <p>1. Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional adalah perbandingan antara total pendapatan yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum (BLU) dengan total biaya operasional dalam periode tertentu.</p> <p>2. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BLU dalam menutupi biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diperoleh, sebagai indikator kemandirian keuangan</p> | <p>Persentase perbandingan antara total pendapatan BLU (baik dari PNBP, hibah, maupun sumber pendapatan lain yang sah) dengan total biaya operasional dalam 1 tahun anggaran, yang dihitung dengan rumus:</p> $\text{Rasio} = \frac{\text{Total Pendapatan BLU}}{\text{Total Biaya Operasional}} \times 100\%$ <p>Skala Ukur: Rasio (%):</p> | Laporan Keuangan BLU yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau BPKP, dokumen RKAT BLU. | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|-----------------|
| | | <p>dan efisiensi pengelolaan keuangan.</p> <p>3. Dimensi:</p> <p>a. Pendapatan BLU: Semua pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan BLU.</p> <p>b. Biaya Operasional: Semua biaya yang dikeluarkan untuk operasional institusi.</p> <p>4. Indikator: Total pendapatan BLU selama periode tahun berjalan; Total biaya operasional selama periode yang sama; dan Nilai rasio (%) antara pendapatan dan biaya.</p> | <p>a. $\geq 100\%$ = Pendapatan mampu menutupi biaya operasional (mandiri).</p> <p>b. $< 100\%$ = Pendapatan belum menutupi biaya operasional (belum mandiri).</p> | | |
| IKT-4.3 | Jumlah Pendapatan BLU | <p>1. Jumlah Pendapatan BLU adalah total penerimaan yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum (BLU) dari berbagai sumber pendapatan yang sah selama periode tertentu (biasanya 1 tahun anggaran), yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional dan pelayanan publik secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pendapatan BLU meliputi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), hasil layanan, hibah, kerja sama, dan sumber lain yang sah.</p> <p>3. Dimensi:</p> | <p>1. Indikator:</p> <p>a. Total pendapatan BLU yang dicatat dalam laporan keuangan audited.</p> <p>b. Persentase pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya (opsional).</p> <p>2. Cara Pengukuran: Mengacu pada angka total pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan audited BLU.</p> <p>3. Skala Ukur: Rasio/Interval (dalam satuan Rupiah atau persentase pertumbuhan).</p> | Laporan Keuangan BLU audited (oleh Kantor Akuntan Publik/BPKP), dokumen RKAT BLU. | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|---|---|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Pendapatan: PNBP, hasil layanan, kerja sama, hibah, dan pendapatan lain yang sah. b. Periode Waktu: 1 tahun anggaran. | $\text{Pertumbuhan Pendapatan (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Tahun Ini} - \text{Pendapatan Tahun Lalu}}{\text{Pendapatan Tahun Lalu}} \times 100$ | | |
| IKT-4.4 | Pendapatan BLU dari optimalisasi Aset Tetap Aset Lainnya, Kerja Sama, serta Pendapatan Unit Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Total nilai penerimaan yang diperoleh BLU dalam satu tahun anggaran dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan aset tetap b. Pemanfaatan aset lainnya c. Kerja sama dengan pihak ketiga d. Pengelolaan unit usaha, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan audited BLU. 2. Dimensi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Aset Tetap (sewa, bangun guna serah, dll) b. Pendapatan Aset Lainnya (royalti, lisensi) c. Pendapatan Kerja Sama (bagi hasil, kontrak layanan) d. Pendapatan Unit Usaha (usaha mandiri yang dikelola BLU). | <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> a. Total pendapatan masing-masing kategori (dalam Rupiah). b. Persentase kontribusi pendapatan per kategori terhadap total pendapatan BLU: $\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Pendapatan per Kategori}}{\text{Total Pendapatan BLU}} \times 100\%$ 2. Cara Pengukuran: Mengacu pada data rinci pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan audited BLU, dengan klasifikasi sumber pendapatan per kategori. 3. Skala Ukur: Rasio/Interval (dalam Rupiah atau persentase). | Laporan Keuangan audited BLU, Laporan Pemanfaatan Aset BLU, Dokumen Kerja Sama, Laporan Unit Usaha BLU. | Kepala Biro PKU |
| IKT-4.5 | Pendapatan BLU dari optimalisasi aset lancar | <ul style="list-style-type: none"> 1. Total nilai penerimaan yang diperoleh BLU dalam satu tahun anggaran dari kegiatan pemanfaatan aset lancar (kas, setara kas, piutang, dan persediaan) sebagaimana tercatat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> a. Total pendapatan dari optimalisasi aset lancar (Rp). b. Persentase kontribusi pendapatan aset lancar terhadap total pendapatan BLU: | | |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------------|
| | | <p>dalam laporan keuangan audited BLU.</p> <p>2. Dimensi:</p> <p>a. Sumber Pendapatan: bunga deposito, giro berbunga, pengelolaan piutang, dan pemanfaatan persediaan.</p> <p>b. Periode Waktu: Tahun Anggaran.</p> | <p>$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Pendapatan dari Aset Lancar}}{\text{Total Pendapatan BLU}} \times 100\%$</p> <p>2. Cara Pengukuran: Mengacu pada laporan keuangan audited BLU yang mengklasifikasikan pendapatan dari aset lancar secara khusus.</p> <p>3. Skala Ukur: Rasio/Interval (Rupiah atau persentase).</p> | | |
| IKT-4.6 | Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | <p>1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU adalah ukuran tingkat kemajuan implementasi program modernisasi dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), yang mencakup peningkatan sistem tata kelola, transparansi, akuntabilitas, inovasi layanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan Kementerian Keuangan/Pengelola BLU.</p> <p>2. Modernisasi ini biasanya diarahkan untuk memperkuat good governance, efisiensi operasional, dan kemandirian finansial BLU.</p> <p>3. Rasio antara jumlah komponen/kegiatan modernisasi</p> | <p>1. Indikator:</p> <p>a. Jumlah kegiatan modernisasi yang direncanakan (N).</p> <p>b. Jumlah kegiatan modernisasi yang selesai tepat waktu (n).</p> <p>c. Persentase penyelesaian: $\left(\frac{n}{N} \times 100\%\right)$</p> <p>2. Cara Pengukuran: Menghitung jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total kegiatan dalam rencana modernisasi BLU.</p> <p>3. Skala Ukur: Rasio (%):</p> <p>a. $\geq 100\%$ = Terlampaui</p> <p>b. $\geq 90\%$ = Sangat Baik</p> <p>c. 75–89% = Cukup Baik</p> <p>d. $< 75\%$ = Perlu Percepatan.</p> | Laporan Pelaksanaan Modernisasi BLU, Roadmap/Rencana Aksi Modernisasi BLU, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemenkeu/ Pengelola BLU. | Kepala Biro PKU dan Kepala UPA TIK |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | <p>pengelolaan BLU yang telah diselesaikan dengan total komponen/kegiatan yang direncanakan, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)</p> <p>4. Dimensi:</p> <p>a. Rencana Modernisasi: Jumlah komponen/kegiatan yang ditetapkan dalam roadmap modernisasi BLU (misalnya: sistem informasi keuangan, manajemen SDM, layanan digital, dll).</p> <p>b. Realisasi Modernisasi: Jumlah komponen/kegiatan yang telah selesai.</p> | | | |
| IKT-4.7 | Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU | <p>1. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU adalah ukuran tingkat ketepatan antara proyeksi pendapatan yang direncanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dengan realisasi pendapatan yang dicapai dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun anggaran).</p> <p>2. Indeks ini digunakan untuk menilai kemampuan BLU dalam membuat estimasi pendapatan yang realistis dan perencanaan keuangan yang efektif.</p> | <p>1. Indikator:</p> <p>a. Total proyeksi pendapatan BLU (Rp).</p> <p>b. Total realisasi pendapatan BLU (Rp).</p> <p>c. Persentase deviasi proyeksi terhadap realisasi.</p> <p>2. Cara Pengukuran: Menghitung rasio dengan rumus berikut:</p> $\text{Indeks Akurasi (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Proyeksi Pendapatan}} \times 100\%$ <p>3. Skala Ukur: Rasio (%):</p> | Dokumen RKAT/DIPA BLU, Laporan Keuangan audited BLU, laporan monitoring pendapatan. | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|--|---|---|-----------------|
| | | <p>3. Rasio antara jumlah realisasi pendapatan BLU dengan jumlah proyeksi pendapatan BLU dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam persentase (%).</p> <p>4. Dimensi:</p> <p>a. Proyeksi Pendapatan: Estimasi pendapatan BLU yang ditetapkan dalam RKAT/DIPA.</p> <p>b. Realisasi Pendapatan: Pendapatan aktual yang tercatat dalam laporan keuangan audited.</p> | <p>a. 95–105% = Proyeksi sangat akurat</p> <p>b. 90–94% / 106–110% = Cukup akurat</p> <p>c. <90% atau >110% = Tidak akurat</p> | | |
| IKT-4.8 | Indeks peningkatan efisiensi layanan BLU | <p>1. Skor yang menunjukkan perubahan (peningkatan) efisiensi dalam penyediaan layanan BLU dari tahun sebelumnya, dihitung berdasarkan perbandingan input (biaya/waktu) terhadap output layanan.</p> <p>2. Efisiensi layanan ini menggambarkan kemampuan BLU dalam memberikan layanan lebih cepat, hemat biaya, tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas, sesuai prinsip tata kelola BLU yang baik (good governance).</p> <p>3. Dimensi:</p> <p>a. Input: Anggaran biaya operasional, waktu layanan, SDM yang digunakan.</p> | <p>1. Indikator:</p> <p>a. Penurunan rasio biaya per output layanan.</p> <p>b. Penurunan waktu rata-rata penyelesaian layanan.</p> <p>c. Peningkatan rasio output per SDM/anggaran.</p> <p>2. Cara Pengukuran: Menggunakan formula rasio efisiensi tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya, lalu dinyatakan dalam persentase atau skor indeks.</p> $\text{Indeks Efisiensi (\%)} = \frac{\text{Input/Output Tahun Lalu}}{\text{Input/Output Tahun Berjalan}} \times 100\%$ | Laporan Kinerja BLU, Laporan Keuangan BLU, Data Waktu Layanan, Survei Pengguna Layanan, RKAT. | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|---|-----------------|
| | | <p>b. Output: Jumlah layanan, kepuasan pengguna layanan, atau volume kegiatan yang dihasilkan.</p> | <p>3. Skala Ukur: Rasio/Interval (dalam % atau skor indeks)</p> <p>a. >100% = Efisiensi meningkat</p> <p>b. =100% = Sama</p> <p>c. <100% = Efisiensi menurun.</p> | | |
| IKT-4.9 | Nilai self Maturity Rating | <p>1. Self Maturity Rating adalah skor penilaian mandiri (self-assessment) yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengukur tingkat kematangan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan peningkatan layanan berbasis kinerja.</p> <p>2. Penilaian ini digunakan untuk melihat sejauh mana BLU telah mencapai standar pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</p> <p>3. Skor atau indeks yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri tingkat kematangan pengelolaan organisasi BLU, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan/Direktorat Pembinaan BLU.</p> <p>4. Dimensi:</p> | <p>1. Indikator:</p> <p>a. Skor penilaian pada setiap aspek maturity (misalnya 1–5 atau 1–100).</p> <p>b. Level maturity (misalnya: Inisiasi, Berkembang, Terkelola, Terdefinisi, Optimal).</p> $\text{Nilai Maturity (\%)} = \frac{\text{Total Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$ <p>Level Maturity:</p> <p>a. Level 1: Inisiasi (0–20%)</p> <p>b. Level 2: Berkembang (21–40%)</p> <p>c. Level 3: Terkelola (41–60%)</p> <p>d. Level 4: Terdefinisi (61–80%)</p> <p>e. Level 5: Optimal (81–100%)</p> <p>2. Cara Pengukuran: Menggunakan instrumen self-assessment yang telah ditetapkan, dengan akumulasi skor seluruh aspek dibandingkan dengan skor maksimal yang memungkinkan.</p> | Hasil kuesioner self-assessment maturity BLU, dokumen pendukung (SOP, laporan kinerja, laporan keuangan). | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Proses Tata Kelola (manajemen organisasi, transparansi, akuntabilitas). b. Sistem Pengendalian Internal. c. Manajemen Risiko. d. Kinerja Layanan dan Keuangan. | 3. Skala Ukur: Ordinal/Interval: Skor 1–5 per aspek atau indeks 0–100 secara total. | | |
| IKT-4.10 | Kualifikasi Keterbukaan informasi publik | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat pemenuhan Badan Publik (termasuk Badan Layanan Umum) terhadap kewajiban menyediakan dan membuka akses informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 2. Kualifikasi ini biasanya ditentukan oleh hasil penilaian atau monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dan/atau pemeringkatan keterbukaan informasi. 3. Tingkat kualifikasi yang menunjukkan kategori pemenuhan standar keterbukaan informasi oleh BLU, berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP). Nilainya ditentukan oleh skor SAQ dan/atau | <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> a. Skor SAQ KIP (0–100). b. Kualifikasi: Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, Tidak Informatif, Informatif. 2. Cara Pengukuran: Berdasarkan hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) keterbukaan informasi publik dan/atau nilai pemeringkatan KIP. 3. Skala Ukur: Ordinal: <ul style="list-style-type: none"> a. Informatif (90–100) b. Menuju Informatif (80–89) c. Cukup Informatif (60–79) d. Kurang Informatif (40–59) e. Tidak Informatif (<40) | Laporan Monev KIP, Hasil SAQ KIP, Dokumen Keterbukaan Informasi Publik (Website PPID BLU, laporan tahunan keterbukaan informasi). | Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | <p>hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik.</p> <p>4. Dimensi:</p> <p>a. Ketersediaan Informasi (wajib disediakan, diumumkan secara berkala, serta informasi setiap saat)</p> <p>b. Pelayanan Permintaan Informasi.</p> <p>c. Infrastruktur KIP (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID).</p> | | | |
| IKT-4.11 | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan | <p>1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan adalah ukuran tingkat kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap layanan, kinerja, dan kontribusi institusi pendidikan tinggi. Pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan (industri/dunia kerja), mitra kerja sama, dan masyarakat.</p> <p>2. Indikator Umum:</p> <p>a. Kualitas layanan akademik dan non-akademik.</p> <p>b. Kompetensi lulusan (bagi pengguna lulusan)</p> | <p>Formula:</p> $IKP = \frac{\text{Total skor jawaban}}{\text{Skor maksimum yang mungkin}} \times 100\%$ <p>Kriteria Penilaian:</p> <p>a. 81–100 = Sangat Puas</p> <p>b. 61–80 = Puas</p> <p>c. 41–60 = Cukup Puas</p> <p>d. ≤40 = Tidak Puas</p> | Hasil survei kepuasan, dokumen laporan tracer study, laporan audit mutu internal. | Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|--|--|--------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Kerja sama dengan mitra eksternal. d. Reputasi institusi di mata masyarakat. <p>3. Teknik Pengumpulan: Kuesioner, wawancara, atau studi dokumen laporan kepuasan stakeholder.</p> | | | |
| IKT-4.12 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Tri Dharma PT | <ul style="list-style-type: none"> 1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah ukuran tingkat pencapaian minimal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tiga kewajiban pokoknya, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti). 2. SPM merupakan tolok ukur minimum yang menjadi kewajiban institusi untuk menjamin mutu layanan akademik. 4. Cara Pengukuran: Membandingkan capaian indikator Tri Dharma terhadap standar minimum yang ditetapkan SN-Dikti, dinyatakan dalam persentase. | <p>Formula:</p> $\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah capaian aktual}}{\text{Jumlah target standar minimal}} \times 100\%$ <p>Skala Ukur: Rasio (0-100%). Kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. $\geq 100\%$ = Terlampaui b. $\geq 75\%$-$<100\%$ = Tercapai c. $<75\%$ = Belum Tercap | Laporan kinerja institusi, data BAN-PT/LAM, laporan kegiatan Tri Dharma, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). | Kepala LPMPP |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|---|---|---|--|----------------|
| IKT-4.13 | Terwujudnya sistem informasi berbasis SSO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi berbasis Single Sign-On (SSO) adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi dan layanan dalam satu ekosistem sistem informasi dengan hanya satu kali login (menggunakan satu akun dan kata sandi yang sama) tanpa perlu login ulang ke setiap aplikasi. 2. SSO diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengakses layanan digital organisasi. 3. Keberadaan dan berfungsinya sistem autentikasi tunggal (SSO) yang memungkinkan pengguna (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan stakeholder lainnya) mengakses seluruh aplikasi internal organisasi melalui satu akun yang terintegrasi 4. Dimensi: <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur Teknologi: Server, protokol autentikasi (mis. SAML, OAuth, OpenID Connect). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator: <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase aplikasi internal yang sudah terintegrasi ke SSO. b. Jumlah user yang aktif menggunakan SSO. c. Tingkat keberhasilan login SSO tanpa error. 2. Cara Pengukuran: <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi implementasi SSO melalui audit sistem informasi. b. Monitoring jumlah aplikasi dan user yang sudah menggunakan SSO. 3. Skala Ukur Nominal: "Terlaksana" / "Belum Terlaksana" atau Rasio: Persentase integrasi aplikasi ke SSO. $\text{Persentase Implementasi SSO} = \frac{\text{Jumlah Aplikasi Terintegrasi SSO}}{\text{Total Aplikasi Internal}} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> a. >80% aplikasi terintegrasi = SSO sudah optimal. b. 40–79% aplikasi terintegrasi = SSO sedang berjalan (belum optimal). c. <40% aplikasi terintegrasi = SSO belum terimplementasi baik. | Dokumen arsitektur sistem informasi, laporan implementasi SSO, log server autentikasi SSO, laporan unit TIK. | Kepala UPA TIK |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Integrasi Sistem: Jumlah aplikasi internal yang sudah terhubung ke SSO. c. Keamanan dan User Experience. | | | |
| IKT-4.14 | Sistem Informasi Terintegrasi berbasis KPI (<i>key Performance Indicator</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Terintegrasi berbasis KPI adalah sebuah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi kinerja institusi pendidikan secara menyeluruh dengan menggunakan indikator-indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang telah ditetapkan sebagai acuan mutu dan capaian strategis. 2. Sistem ini memungkinkan akses data secara real-time, lintas unit kerja, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). 3. Dimensi <ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi Data: Semua unit kerja terhubung dalam satu sistem. b. Pemantauan KPI: Sistem menampilkan capaian KPI secara real-time. c. Aksesibilitas: Stakeholder internal dapat mengakses sesuai level otoritasnya. | <p>Kriteria Ketercapaian:</p> <p>Indikator Ketercapaian Sistem Informasi Terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dashboard KPI yang interaktif. 2. Data dari semua unit (akademik, SDM, keuangan, penelitian, dll) terhubung otomatis. 3. Monitoring capaian KPI dilakukan secara periodik melalui sistem. 4. Sistem mendukung pengambilan keputusan manajemen. <p>Cara Pengukuran Melalui: Studi dokumen dan observasi terhadap keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan KPI institusi.</p> | Dokumen kebijakan sistem informasi, manual pengguna sistem, dashboard KPI institusi, hasil wawancara dengan operator/ manajemen. | Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi |

| | Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|----------|------------------------------|--|--|--|---|
| | | d. Pelaporan: Sistem menghasilkan laporan otomatis berbasis KPI. | | | |
| IKT-4.15 | Ranking Webometric | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ranking Webometrics adalah peringkat yang diberikan oleh Cybermetrics Lab (sebuah unit penelitian dari Consejo Superior de Investigaciones Científicas/CSIC – Spanyol) kepada perguruan tinggi di seluruh dunia, berdasarkan kinerja web presence, visibilitas, dan dampak publikasi ilmiah dalam jaringan internet. 2. Peringkat ini digunakan sebagai indikator tingkat keterbukaan, produktivitas akademik, dan kualitas sistem informasi perguruan tinggi di ranah global. 3. Posisi peringkat perguruan tinggi dalam pemeringkatan Webometrics dunia, yang dihitung berdasarkan indikator visibilitas website, keterbukaan (transparency), dan dampak penelitian (excellence). 4. Dimensi: <ol style="list-style-type: none"> a. Visibilitas (Visibility) – jumlah jaringan eksternal yang terhubung ke domain universitas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator: <ol style="list-style-type: none"> a. Posisi universitas di Webometrics (global, regional, dan nasional). b. Nilai pada setiap komponen indikator: Visibility (50%), Transparency (10%), Excellence (40%). 2. Cara Pengukuran: Mengacu pada hasil resmi pemeringkatan Webometrics yang dirilis secara berkala (Januari dan Juli setiap tahun) oleh Cybermetrics Lab. 3. Skala Ukur: Ordinal: peringkat numerik (misalnya: #1 – #20.000). Semakin kecil angka peringkat, semakin baik kinerja universitas. <p><i>Skor Akhir = (50% × Visibility) + (10% × Transparency) + (40% × Excellence)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visibility (50%): Impact (jumlah backlink eksternal unik ke domain universitas). b. Transparency (10%): Jumlah sitasi Google Scholar untuk penulis teratas. | Situs resmi Webometrics: https://www.webometrics.info , data visibilitas dan publikasi ilmiah kampus. | Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta Kepala UPA TIK |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Transparansi (Openness) – jumlah sitasi untuk 210 penulis teratas universitas. c. Keunggulan (Excellence) – jumlah artikel ilmiah dalam 10% publikasi paling banyak disitasi di 26 disiplin ilmu. | <ul style="list-style-type: none"> c. Excellence (40%): Jumlah artikel yang masuk kategori top 10% publikasi paling banyak disitasi. | | |
| IKT-4.16 | Persentase ketercapaian target peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras berdasarkan roadmap 2025-2029 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini mengukur tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) UPNVY untuk periode 2025–2029. Cakupan indikator meliputi aspek kuantitas (jumlah/volume sarpras yang dibangun atau disediakan) dan kualitas (standar mutu dan kelayakan sarpras sesuai spesifikasi yang direncanakan). 2. Persentase realisasi capaian pengadaan/pengembangan sarpras (baik dari segi jumlah maupun mutu) terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen roadmap sarpras 2025–2029. 3. Dimensi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas – Jumlah fasilitas/sarpras yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah sarpras yang sudah terbangun/dipenuhi dibandingkan dengan target roadmap. b. Tingkat kualitas sarpras yang sudah memenuhi standar dibandingkan dengan rencana. 2. Cara Pengukuran: Menggunakan rasio antara jumlah dan kualitas sarpras yang sudah tercapai dengan total target dalam roadmap (dinyatakan dalam persentase). $\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Sarpras (kuantitas dan kualitas) yang Direalisasikan}}{\text{Jumlah Target Sarpras dalam Roadmap}} \times 100\%$ 3. Skala Ukur: Rasio (%): 0%–100% 4. Interpretasi Capaian: <ul style="list-style-type: none"> a. >90% = Target roadmap tercapai sangat baik. | Dokumen roadmap sarpras 2025–2029; Laporan realisasi pembangunan/pengadaan sarpras; Hasil audit mutu atau verifikasi standar sarpras. | Kepala SPI dan Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|---|---|--|--|-----------------|
| | | <p>dibangun, diperluas, atau ditingkatkan.</p> <p>b. Kualitas – Standar mutu sarpras sesuai spesifikasi teknis atau standar layanan.</p> | <p>b. 70–90% = Target tercapai cukup baik.</p> <p>c. 50–69% = Target tercapai sebagian.</p> <p>d. <50% = Target belum tercapai optimal.</p> | | |
| IKT-4.17 | Terwujudnya Status kelembagaan PT sebagai PTNBH | <ol style="list-style-type: none"> Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki status sebagai badan hukum publik yang otonom dalam pengelolaan akademik dan non-akademik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kondisi di mana perguruan tinggi telah memperoleh pengesahan status kelembagaan sebagai PTNBH melalui peraturan pemerintah (PP) tentang pendirian PTNBH yang berlaku secara sah. Dimensi: <ol style="list-style-type: none"> Aspek Regulasi – Penerbitan PP tentang PTNBH. Aspek Tata Kelola – Kesiapan organisasi, keuangan, SDM, dan sarpras sebagai prasyarat PTNBH. | <ol style="list-style-type: none"> Indikator: <ol style="list-style-type: none"> Terbitnya PP pendirian PTNBH. Ketersediaan statuta PTNBH yang disahkan. Tersusunnya dokumen kesiapan kelembagaan (roadmap, rencana strategis, dll). Cara Pengukuran: Verifikasi dokumen hukum (Peraturan Pemerintah tentang PTNBH) dan dokumen pendukung kesiapan kelembagaan. Skala Ukur: Nominal: “Terlaksana” (sudah PTNBH) / “Belum Terlaksana” (belum PTNBH). | Salinan Peraturan Pemerintah tentang pendirian PTNBH; dan Dokumen kelembagaan PT (statuta, roadmap PTNBH, laporan kesiapan). | Kepala Biro PKU |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|-------------------------------|--|--|---|--|-----------------|
| | | c. Aspek Implementasi – Pelaksanaan operasional perguruan tinggi sebagai PTNBH. | | | |
| IKT-4.18 | Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi | <ol style="list-style-type: none"> Tenaga kependidikan adalah pegawai pada perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan teknis, dan pelayanan fungsional untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sertifikasi keahlian/kompetensi adalah pengakuan formal yang diberikan kepada tenaga kependidikan atas penguasaan kompetensi tertentu yang relevan dengan bidang tugasnya, diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah atau asosiasi profesi. Persentase jumlah tenaga kependidikan yang telah memperoleh sertifikat keahlian/kompetensi sesuai bidang tugasnya terhadap total jumlah tenaga kependidikan yang ada. Dimensi: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat. | <ol style="list-style-type: none"> Indikator: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kependidikan bersertifikasi. Persentase terhadap total tenaga kependidikan. Relevansi sertifikasi dengan bidang tugas. Cara Pengukuran: Menghitung proporsi tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi berdasarkan data kepegawaian dan bukti sertifikat yang sah. $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kependidikan Bersertifikasi}}{\text{Total Jumlah Tenaga Kependidikan}} \times 100\%$ Skala Ukur: Rasio (%): 0%–100% | Data kepegawaian (SIMPEG); Salinan sertifikat keahlian/kompetensi tenaga kependidikan; Laporan unit SDM/perencanaan. | Kepala Biro PKU |

| | Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|----------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | b. Total tenaga kependidikan aktif. | | | |
| IKT-4.19 | Indeks Sikap dan Perilaku Bela Negara Pegawai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Sikap dan Perilaku Bela Negara pegawai adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemahaman, penerimaan nilai-nilai, serta implementasi sikap dan perilaku Bela Negara oleh pegawai di lingkungan UPNVY. 2. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pegawai memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. 3. Indeks diukur melalui survei atau instrumen penilaian yang mengacu pada 5 Nilai Dasar Bela Negara, yaitu: Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara 4. Indikator Operasional: <ol style="list-style-type: none"> c. Dimensi Pengukuran Indeks: <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta Tanah Air (20%) 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara (20%) 3) Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara (20%) | <p>Formula:</p> <p>Untuk menghitung Indeks setiap Dimensi, maka Formulasnya:</p> <p>Indeks <small>(nilai bela negara)</small> = $\Sigma(\text{Skor diperoleh} \times \text{Bobot Indikator})$</p> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Skor untuk setiap indikator 1-4 4. Total bobot indikator tiap dimensi <p>Contoh:</p> <p>Untuk dimensi cinta tanah air dengan bobot indikator pengetahuan (20%), bobot pemahaman (20%), bobot sikap (30%), dan bobot perilaku (30%) dan setiap indikator diberi nilai antara 3 hingga 4 oleh responden, maka nilainya adalah:</p> $(3 \times 20\%) + (3 \times 20\%) + (4 \times 30\%) + (3 \times 30\%)$ $0,6 + 0,6 + 1,2 + 0,9$ $= 3,3$ | Pusat Pengembangan Bela Negara LPMPP | Kapus Pengembangan Bela Negara |

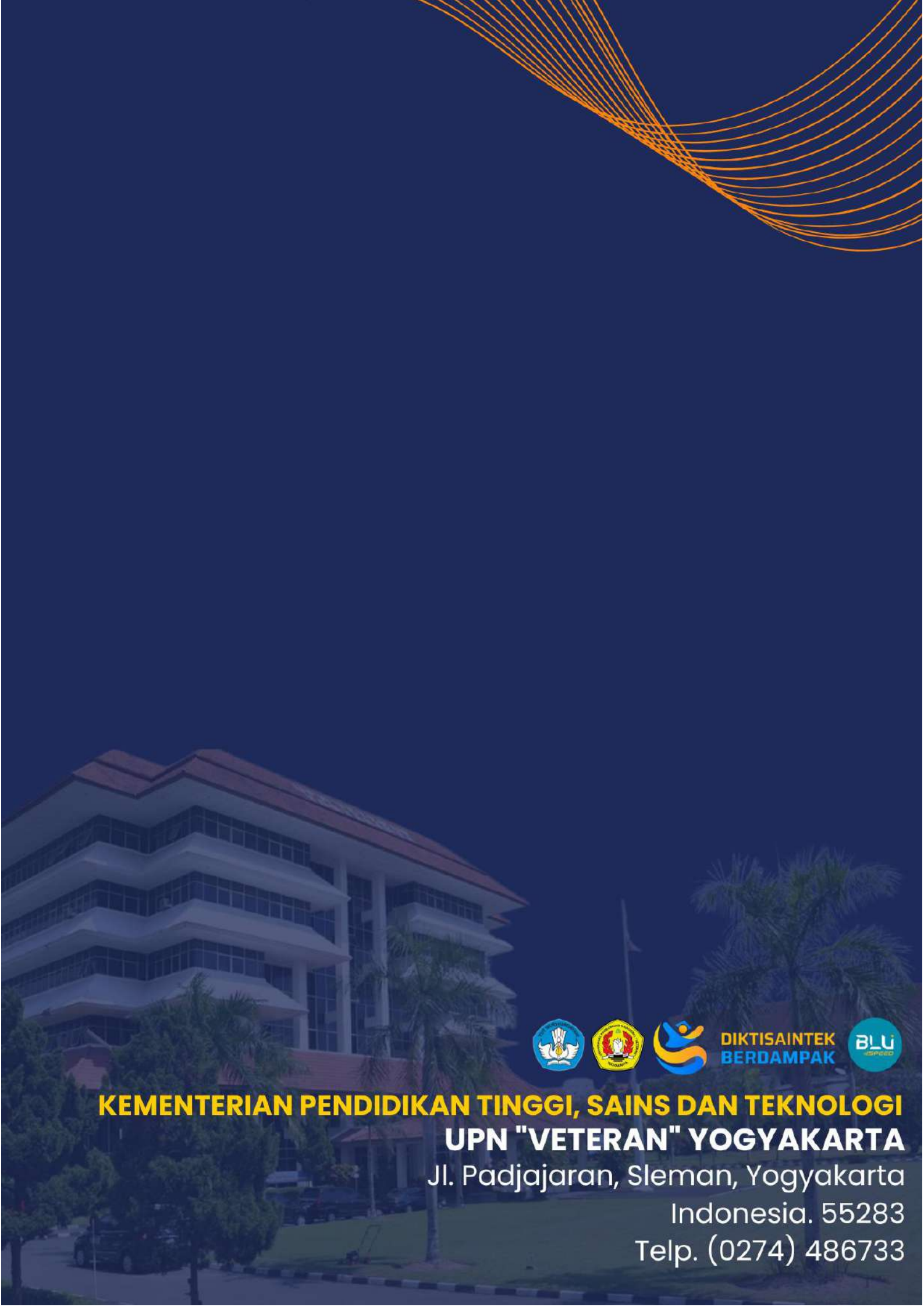
| Indikator Kinerja Tambah/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|--|---|-------------|-----|
| | <p>4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara (20%)</p> <p>5) Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara (20%)</p> <p>d. Indikator setiap Dimensi:</p> <p>1) Aspek Pengetahuan (20%): 1) Memahami makna bela negara secara utuh; 2) Memahami 5 nilai dasar bela negara; 3) Memahami ancaman terhadap bangsa dan negara; 4) Memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara; 5) Memahami dasar hukum dan kebijakan bela negara</p> <p>2) Aspek Pemahaman (20%): 1) Memahami makna bela negara secara utuh; 2) Memahami 5 nilai dasar bela negara; 3) Memahami ancaman terhadap bangsa dan negara; 4) Memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara; 5) Memahami dasar hukum dan kebijakan bela negara</p> <p>3) Aspek Sikap (30%): bagaimana seseorang menunjukkan perilaku dan</p> | <p>Indeks Dimensi Cinta Tanah Air adalah 3,3</p> <p>Dengan asumsi Indeks Sadar Berbangsa dan Bernegara 3,5, Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara 3,8, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 3,6, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara 3,7, Maka Indeks Bela Negara, menggunakan Formula:</p> <p>INDEKS BELA NEGARA PEGAWAI = Indeks Cinta Tanah Air + Indeks Sadar Berbangsa dan Bernegara + Indeks Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara + Indeks Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara + Indeks Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara</p> $\frac{3,3 + 3,5 + 3,8 + 3,6 + 3,7}{5}$ $= \frac{17,9}{5}$ $= 3,58$ | | |

| Indikator Kinerja Tambah/IKT | | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--------------|
| | | <p>kecenderungan hati untuk membela negara dalam kehidupan sehari-hari, dengan mendasarkan pada indikator 5 nilai dasar bela negara</p> <p>Aspek Perilaku (30%): menunjukkan bagaimana seseorang mewujudkan nilai-nilai bela negara dalam tindakan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, maupun negara dengan merujuk pada indikator 5 nilai dasar bela negara</p> | <p>Maka Indeks Bela Negara pegawai UPNVY adalah 3,58</p> | | |
| IKT-4.20 | Status Akreditasi Institusi | <ol style="list-style-type: none"> Status akreditasi institusi adalah tingkat pengakuan formal yang diberikan oleh lembaga akreditasi resmi (misalnya BAN-PT di Indonesia) terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan pada sebuah institusi berdasarkan standar tertentu. Status ini biasanya dinyatakan dalam kategori seperti A (Unggul), B (Baik Sekali), C (Baik), atau bahkan Tidak Terakreditasi. status akreditasi institusi diukur berdasarkan sertifikat akreditasi terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi yang diakui | Perhitungan penilaian akreditasi institusi merujuk pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi | Berbagai dokumen, baik dalam bentuk hard file maupun soft file yang terdapat dalam berbagai sistem informasi yang dimiliki oleh UPNVY | Kepala LPMPP |

| Indikator Kinerja Tambaha/IKT | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data | PIC |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|
| | | | | |

pemerintah. Status ini dikategorikan menjadi:

- a. Unggul/A = Nilai akreditasi 361–400 (Sangat Baik)
- b. Baik Sekali/B = Nilai akreditasi 301–360 (Baik)
- c. Baik/C = Nilai akreditasi 200–300 (Cukup)
- d. Tidak Terakreditasi = Institusi tidak memiliki akreditasi yang sah.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Sleman, Yogyakarta

Indonesia. 55283

Telp. (0274) 486733